EKONOMI PEMBANGUNAN

EDISI REVISI

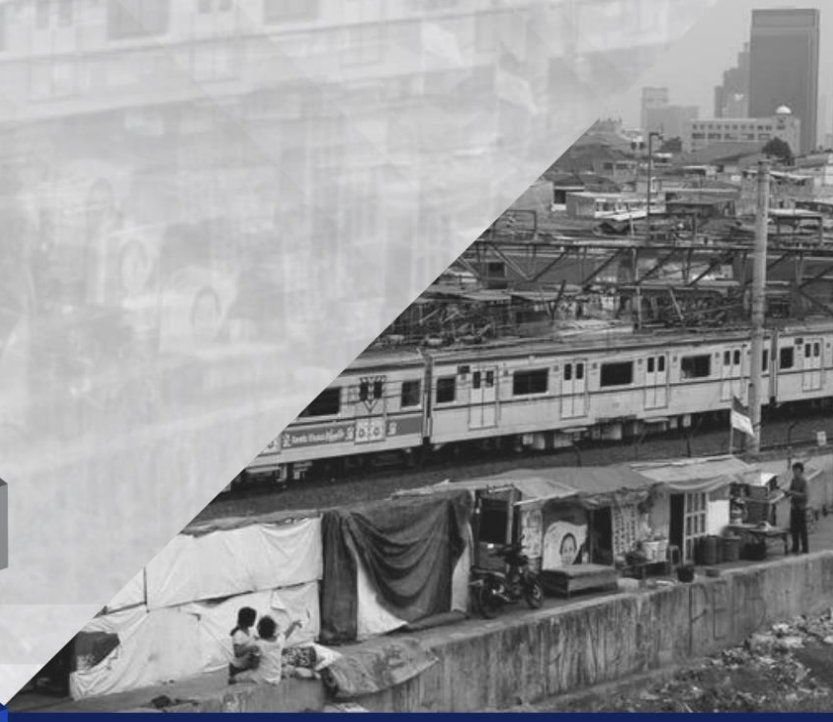

Hani Siti Hanifah, SE., M.Si
Husni Muharam, SE., M.S.M
Erik Kartiko, SE., M.Si., Ak., CA

Ekonomi Pembangunan

Edisi Revisi

Dra. Hani Siti Hanifah, M.Si
Husni Muharam, SE., M.S.M
Erik Kartiko, SE., M.Si., Ak., CA

UNIVERSITAS GARUT
Jl. Raya Samarang No. 52A, Garut 44151

Ekonomi Pembangunan
Edisi Revisi

Penulis:
Hani Siti Hanifah, SE., M.Si
Husni Muharam, SE., M.S.M
Erik Kartiko, SE., M.Si., Ak., CA

ISBN: 978-623-6918-18-0

Penyunting:
Husni Muharam

Desain Sampul dan Tata Letak:
Husni Muharam

Penerbit:
Universitas Garut

Redaksi:
Universitas Garut
Jl. Raya Samarang No. 52A, Garut 44151
Telp./ Fax. (0252) 544217

Cetakan pertama, Januari 2023

Hak Cipta dilindungi Undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit

Pengantar

Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah SWT, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Atas Rahmat dan Karunia-Nya dan dukungan serta bantuan dari berbagai pihak, buku ini dapat diselesaikan.

Dalam penyusunannya, buku ini memiliki suatu pandangan bahwa perlu adanya sumber bacaan yang melengkapi mengenai konsep-konsep serta teori tentang ekonomi pembangunan. Didalamnya terdapat beberapa kajian tentang teori pertumbuhan ekonomi, indicator-indikator pembangunan ekonomi, masalah-masalah pembangunan ekonomi baik factor dalam negeri maupun factor luar negeri, system ekonomi, strategi pembangunan, hutang luar negeri, pembiayaan pembangunan serta modal social. Teori pertumbuhan ekonomi perlu dipelajari sebagai landasan serta modal stakeholder dalam menjalankan roda perekonomian suatu wilayah.

Banyak hal yang mengilhami pakar ekonomi dunia dalam menelaah dinamika ekonomi, mulai dari teori-teori ekonomi yang sifatnya positif maupun bersifat normatif dalam kontribusinya untuk pertumbuhan ekonomi maupun pembangunan ekonomi termasuk didalamnya adalah pergerakan ekonomi pada negara-negara berkembang. Adapun perhatian khusus pada ilmu ekonomi pembangunan berangkat dari tiga aspek yaitu Perasaan perikemanusiaan, Sebagian berpendapat sebagai strategi untuk membendung pengaruh ideologi yang bertentangan dengan ideologi yang dianut oleh mereka dan Tidak dapat dipungkiri bahwa ada muatan didalamnya sebagai suatu cara untuk mempererat hubungan politik dan ekonomi diantara negara- negara yang bekerja sama.

Buku ini disusun kembali dari berbagai sumber serta penambahan referensi, selain itu terdapat beberapa hasil kajian dalam riset-riset internasional. Tujuan dari penyusunan buku ini adalah sebagai salah satu media atau salah satu referensi bagi para mahasiswa, dosen, peneliti yang mempelajari Teori Ekonomi Pembangunan serta untuk memperkaya khasanah keilmuan.

Pada akhirnya, kami dari tim penulis menyadari bahwa penyusunan buku ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak sehingga pada kesempatan ini kami mengucapkan banyak terima kasih dari lubuk hati yang terdalam. Semoga bantuan semua pihak menjadi ladang amal sholeh dan tabungan pahala di akhir zaman kelak. Harapan kami semoga buku kecil ini bisa memberikan sedikit manfaat khususnya bagi penulis, umumnya bagi seluruh umat yang ada di muka bumi ini.

Garut, Januari 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....
DAFTAR ISI.....ii
DAFTAR TABEL.....vi
BAB 1 Paradigma Pertumbuhan Ekonomi Dan Pembangunan 1
1. Teori Pertumbuhan Ekonomi Historis 5
2. Teori Pertumbuhan Ekonomi Frederich List (1789 - 1846).....5
3. Teori Pertumbuhan Ekonomi Karl Bucher (1847 - 1930).....5
4. Teori Pertumbuhan Ekonomi Bruno Hildebrand.....6
5. Teori Pertumbuhan Ekonomi Werner Sombart (1863 - 1947).....6
6. Teori Pertumbuhan Ekonomi Walt Whitmen Rostow (1916 - 1979).....7
7. Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik Dan Neoklasik 8
BAB 2 Indikator Pembangunan Ekonomi.....12
A. Pendapatan Per Kapita.....14
B. Struktur Ekonomi.....16
C. Urbanisasi 16
D. Angka Tabungan.....17
E. Indeks Kualitas Hidup (Ikh).....17
F. Indeks Pembangunan Manusia(Human Development Index).....18
1. Indikator Sosial 20
1) Pendidikan.....21
2) Kesehatan.....22
3) Perumahan 22
4) Angkatan Kerja.....22
5) Kb Dan Fertilitas 22
6) Ekonomi.....22
7) Kriminalitas.....22
8) Perjalanan Wisata 22
9) Akses Media Massa.....23
BAB 3 Masalah Pembangunan Ekonomi Faktor Dalam Negeri.....24
1. Rendahnya Pertumbuhan Ekonomi.....27
2. Kemiskinan.....27
3. Pengangguran.....27
4. Kesenjangan Penghasilan.....28
5. Inflasi.....28
6. Hutang Luar Negeri 28

7. Defisit Anggaran 29
8. Ketidakmampuan Industrial 29
9. Ketidakmampuan Mengelola Sumber Daya Manusia 29
10. Penguasaan Iptek Yang Kurang 29
11. Korupsi 29
12. Masalah Pangan 29
13. Pembangunan Yang Cenderung Tersentralisasi 30

BAB 4 Masalah Pembangunan Ekonomi Faktor Luar Dalam Negeri 31

A. Faktor Eksternal 32
1. Kepercayaan Antara Eksportir Importir 32
2. Pemasaran 33
3. Sistem Kuota Dan Kondisi Hubungan Perdagangan Dengan Negara Lain 34
4. Keterkaitan Dalam Keanggotaan Organisasi Internasional 34
5. Kurangnya Pemahaman Akan Tersedianya Kemudahan-Kemudahan Internasional 34

B. Faktor Internal 34
1. Persiapan Teknis 35
2. Kemampuan Dan Pemahaman Transaksi Luar Negri 35
3. Pembiayaan 35
4. Kekurangsempurnaan Dalam Mempersiapkan Barang 35
5. Kebijaksanaan Dalam Pelaksanan Ekspor Impor 36

BAB 5 Sistem Ekonomi Dalam Masa Transisi 37

A. Biaya Sosial Pada Masa Transisi 38
B. Ekonomi Indonesia Pada Masa Krisis Moneter 39
C. Peran Pemerintah Dalam Masa Transisi 42

BAB 6 Masalah Utama Dalam Pembangunan 45

A. Permasalahan Pokok Pembangunan Ekonomi 45
B. Tantangan Indonesia 51

BAB 7 Strategi Pembangunan 55

A. Konsep Pusat Pinggiran *(Core-Periphery)* 56
B. Konsep Kutub-Kutub Pertumbuhan Dan Pusat-Pusat Pertumbuhan *(Growth Poles Dan Growth Centres)*. 57
C. Strategi Pembangunan Di Indonesia 57

BAB 8 Pembangunan Pertanian Dan Perdesaan 64
1. Memunculkan Potensi Yang Dimiliki Tiap-Tiap Daerah 63
2. Memperluas Pertumbuhan Dengan Menghubungkan Daerah Tertinggal Dengan Pusat Pertumbuhan 64
3. Menghubungkan Daerah Terpencil Dengan Infrastruktur & Pelayanan Dasar Dalam Menyebarkan Manfaat Pembangunan ..... Secara Luas 64
4. Memperluas Lapangan Kerja 64
5. Meningkatkan Pendapatan Daerah Yang Berujung Pula Pada Meningkatnya Pendapatan Nasional 64
A.KUT (Kredit Usaha Tani) 68
B.SRG (Sistem Resi Gudang) 70
BAB 9 Hutang Luar Negeri Dan Pembiayaan Pembangunan 77
A. Penyebab Utang Luar Negeri 76
B. Sejarah Utang Luar Negeri Indonesia Dan Utang Pemerintah Kolonial Hindia Belanda 77
1. Utang Pemerintah Orde Lama 78
2. Perkembangan Utang Pemerintah Era Soeharto 79
3. Utang Pemerintahan Transisi (Habibie) 82
4. Utang Pemerintahan Reformasi (Abdurrahman Wahid) 83
5. Utang Pada Masa Kepemimpinan Megawati Soekarnoputri 84
6. Utang Pada Masa Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono . 84
C. Tiga Komponen Biaya Yang Harus Dipenuhi Pemerintah Sebagai Peminjam 85
D. Peran IMF Dalam Perekonomian Indonesia 85
E. Utang Luar Negeri Dan Neokolonialisme Indonesia 87
F. Utang Dan Imperialisme 88
BAB 10 Modal Sosial 94
Modal Sosial Di Indonesia 103
BAB 11 EKONOMI BERKELANJUTAN 109
A. Pembangunan Berkelanjutan 109
B. Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan 110
C. Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan: Konsep dan Pemikiran 111
1. Dimensi Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan 111
2. Strategi Pembangunan Ekonomi: Export-Led vs. Domestic Demand-Led 113
D. Kunci keberhasilan nasional: 115
1. Memperkuat institusi ekonomi dan politik yang inklusif 115

2. Strategi Kebijakan untuk Mencapai Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan 118
3. Kebijakan Countercyclical: Integrasi Stabilitas Moneter dan Stabilitas Sistem Keuangan 119
4. Penguatan Daya Saing Industri Menuju Integrasi ke Rantai Nilai Global .. 121
5. Peningkatan Ketahanan Energi dan Pangan 122
6. Perluasan Basis Pembiayaan Pembangunan 123
7. Pengembangan Kegiatan Ekonomi Inklusif 123
8. Produktivitas Nasional Dapat Ditingkatkan 124
9. Penguatan Modal Dasar Pembangunan 124

DAFTAR PUSTAKA.....

DAFTAR GAMBAR

1. Perbedaan Pertumbuhan Ekonomi Dan Pembangunan Ekonomi 10
2. Gambar Model: Modal Sosial Menurut Dasgupta dan Ismail Sirajudin ... 95
3. Gambar 11.1Dimensi Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan..... 112
4. Gambar 11.2 Integrasi SM dan SSK dalam Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan..... 115
5. Gambar 11.3 Keterkaitan Kelembagaan Ekonomi dan Politik 117
6. Gambar 11.4 Strategi Kebijakan Untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan..... 118
7. Gambar 11.5 Integrasi Reformasi Struktural untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan..... 121

BAB 1
PARADIGMA PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN EKONOMI

Banyak hal yang mengilhami pakar ekonomi dunia dalam menelaah dinamika ekonomi, mulai dari teori-teori ekonomi yang sifatnya positif maupun bersifat normatif dalam kontribusinya untuk pertumbuhan ekonomi maupun pembangunan ekonomi termasuk didalamnya adalah pergerakan ekonomi pada negara-negara berkembang.Adapun perhatian khusus pada ilmu ekonomi pembangunan berangkat dari tiga aspek (Sukirno: 1985), diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Perasaan perikemanusiaan, yaitu keinginan untuk membantu negara-negara berkembang mempercepat pembangunan ekonomi mereka dan mengejar ketinggalan dari negara maju
b. Sebagian berpendapat sebagai strategi untuk membendung pengaruh ideologi yang bertentangan dengan ideologi yang dianut oleh mereka
c. Tidak dapat dipungkiri bahwa ada muatan didalamnya sebagai suatu cara untuk mempererat hubungan politik dan ekonomi diantara negara- negara yang bekerja sama.

Untuk lebih jelas dalam meninjau ilmu ekonomi pembangunan, biasanya negara-negara di dunia pada umumnya dibagi di dalam tiga golongan, diantaranya sebagai berikut:

1. Negara maju dengan pendapatan perkapita 2000 dolar
2. Negara Berkembang dengan pendapatan perkalpita 200 dolar
3. Negara miskin dengan pendapatan di bawah 200 dolar

Berangkat dari hal tersebut diatas maka dapat digambarkan bagaimana masyarakat di negara maju dapat menikmati tingkat kesejahteraan dari seluruh kebutuhan pokok sampai pada kebutuhan sekunder dan tertier dapat mereka nikmati, fasilitas yang semuanya dapat diakses dengan mobititas yang mudah.Sementara pada negara berkembang dan negara miskin pada umumnya masih bertahan pada kondisi ekonomi yang cukup hidup (subsisten) bahkan ada yang lebih sukar daripada itu, terlihat dari banyaknya kasus anak kekurangan gizi, daya beli yang rendah dengan pengaruhnya pada tingkat pendidikan yang rendah, akses ksehatan yang sulit, dan

fenomena lainnya yang memperlihatkan bahwa pembangunan ekonomi belum sampai kepada seluruh lapisan masyarakat.

Seringkali masyarakat awam memandang pertumbuhan ekonomi adalah pembangunan ekonomi, namun secara mendalam terdapat penjelasan tetang hal tersebut, sehingga masing- masing ilmu tersebut jelas dalam pokok pembahasannya.Adapun ekonomi Pembangunan secara terperinci adalah cabang ilmu ekonomi yang khusus mempelajari:

a. Masalah-masalah pembangunan ekonomi dinegara-negara berkembang.
b. Solusi atas permasalahan- permasalahan ekonomi negara berkembang
c. Upaya-upaya untuk mempercepat proses pembangunan ekonomi tersebut.

Pembangunan ekonomi itu sendiri merupakan suatu proses /perubahan yang terus menerus dalam jangka panjang dan usaha suatu negara untuk memperbesar atau meningkatkan pendapatan per kapita. Oleh karenanya ada tiga aspek yang menjadi bahasan didalamnya yakni:

1. Suatu proses yang berarti perubahan yang terjadi terus menerus
2. Usaha untuk menaikkan pendapatan perkapita
3. Kenaikkan pendapatan perkapita itu harus terus berlangsung dalam jangka Panjang

Membahas pembangunan ekonomi bukankah suatu hal yang dapat diurai secara singkat karena sifatnya yang multi dimensi, didalamnya ada beberapa faktor yang harus menjadi pertimbangan , mengingat sebagian besar negara berkembang adalah bekas negara jajahan yang terkadang masih terdapat pemikiran lama walaupun sudah merdeka, seperti masalah dualisme, pandangan tentang alam , strukutr social, jumlah anak dan sejenisnya dimana terkadang memerlukan waktu dan proses untuk membuat pola fikir baru yang maju dan dinamis. Untuk pembahasan tersebut akan dijelaskan pada bab selanjutnya. Hal yang akan dalam bab ini juga adalah sasaran pembangunan ekonomi dengan tujuan diperoleh metode yang dapat diimplementasikan dinegara- negara berkembang atau negara miskin, sasaran pembangunan tersebut antara lain adalah:

a. Meningkatkan persediaan dan memperluas pembagian /pemerataan bahan pokok yang dibutuhkan untuk bisa hidup, seperti perumahan, kesehatan dan lingkungan.
b. Mengangkat taraf hidup termaksud menambah dan mempertinggi pendapat dan penyedian lapangan kerja, pendidikan yang lebih baik, dan perhatian yang lebih besar terhadap nilai-nilai budaya manusiawi, yang semata-mata bukan hanya

untuk memenuhi kebutuhan materi, tetapi untuk meningkatka kesadaran akan harga diri baik individu maupun nasional.

c. Memperluas jangkauan pilihan ekonomi dan sosial bagi semua individu dan nasional dengan cara membebaskan mereka dari sikap budak dan ketergantungan, tidak hanya hubungan dengan orang lain dan negara lain,tetapi juga dari sumber-sumber kebodohan dan penderitaan.

Pencapaian pembangunan ekonomi sebuah negara sesungguhnya tidak lepas dari upaya untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok masyarakat yang akan menjadi pendorong bagi antisipasi dan bekal dalam menghadapi dinamika ekonomi terutama tantangan globalisasi yang tidak dapat dihindari lagi sekaligus dapat bersaing dengan negara maju untuk ikut serta dalam perdagangan dunia.Ada beberapa upaya untuk mencapai sasaran diatas, terutama dapat menjadi panduan di dalam perencaan ekonomi negara berkembang, berupa strategi pembangunan ekonomi yang secara simultan meliputi (Todaro: 2002):

1. Meningkatkan output nyata /produktivitas yang tinggi yang terus menerus meningkat. Karena dengan output yang tinggi ini akhirnya akan dapat meningkatkan persedian dan memperluas pembagian bahan kebutuhan pokok untuk hidup, termaksut penyediaan perumahan, pendidikan, dan kesehatan.
2. Tingkat pembangunan tenaga kerja yang tinggi dan pengangguran yang rendah yang ditandai dengan tersedianya lapangan kerja yang cukup.
3. Pengurangan dan pemberantasan ketimpangan
4. Perubahan sosial, sikap mental, dan tingkah laku masyarakat dan lembaga pemerintah.

Paradigma pertumbuhan ekonomi tentulah berbeda dengan pembangunan ekonomi seperti terurai pada penjelasan diatas,cakupan pertumbuhan ekonomi lebih sempit dari pembangunan ekonomi yang bersifat multi dimensi.Lebih jauh akan dijelaskan dalam pengertian dari pertumbuhan ekonomi dalam uraian selanjutnya.

Adapun pertumbuhan ekonomi adalah suatu kondisi dimana terjadi peningkatan pendapatan yang disebabkan oleh meningkatnya jumlah produksi barang dan jasa.Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang pesat antara lain output yang meningkat, perkembangan teknologi, penyesuaian dan inovasi dalam bidang sosial. Setelah mengetahui pengertian pertumbuhan ekonomi, tentunya seluruh negara menginginkan terjadinya pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada setiap tahunnya.Negara-negara tersebut perlu melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan jumlah produksi barang dan

jasa.Faktor- faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi antara lain adalah:

1. Sumber daya manusia yang merupakan faktor utama yang mempengaruhi cepat lambatnya proses pembangunan.Jika kompetensi sumber daya manusia baik,maka proses pembangunan akan semakin cepat terlaksana.
2. Sumber daya alam, Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yaitu tanah yang subur, kekayaan tambang, hasil laut, tumbuh-tumbuhan, dan masih banyak lagi. Sumber daya alam tersebut harus diolah oleh sumber daya manusia yang berkompeten sehingga dapat dimanfaatkan secara bijak untuk kepentingan proses pembangunan.
3. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang mana untuk meningkatkan produksi barang dan jasa, dibutuhkan teknologi yang canggih agar kegiatan produksi semakin efektif.
4. Sumber daya modal sebagai sarana untuk meningkatkan kompetensi dari sumber daya manusia,dan menambah ilmu pengetahuan serta teknologi,maka dibutuhkan sumber daya modal yang akan memperlancar proses pembangunan.
5. Manajemen yang mana manajemen yang baik dapat mendukung terciptanya pertumbuhan ekonomi karena semua sumber daya diolah dengan baik.
6. Kewirausahaan yang berperan untuk membuka kesempatan kerja, meningkatkan output, dan menambah pemasukan negara dari pajak.Hal tersebut karena wirausahawan menanam investasi sebagai sumber daya modal.

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi diharapkan akan mewujudkan beberapa hal yaitu taraf hidup masyarakat meningkat sehingga terwujud kemakmuran,serta terciptanya kesempatan kerja meski jumlah penduduk selalu bertambah.Hal tersebut dapat dicapai tidak dalam waktu yang singkat.Maka dari itu,pertumbuhan ekonomi termasuk dalam masalah perekonomian jangka panjang.

Untuk memahami lebih dalam lagi tentang pertumbuhan ekonomi,terdapat banyak ahli ekonomi yang memiliki teori tentang pertumbuhan ekonomi yang dapat menjadi parameter dalam pencapaian kegiatan ekonomi suatu negara.

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses perubahan kondisi perekonomian suatu Negara yang berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu.Menurut Sukirno pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Sehingga pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk

kenaikan pendapatan nasional.Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi.Teori dibangun berdasarkan pengalaman empiris, sehingga teori dapat dijadikan sebagai dasar untuk memprediksi dan membuat suatu kebijakan.

Secara umum teori pertumbuhan ekonomi menurut para ahli dapat dibagi menjadi 2, yaitu: Teori pertumbuhan ekonomi historis dan teori pertumbuhan ekonomi klasik dan neoklasik menurut Sadono (2005) adalah sebagai berikut:

1. **Teori Pertumbuhan Ekonomi Historis**

   Aliran historis berkembang di Jerman dan kemunculannya merupakan reaksi terhadap pandangan kaum klasik yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dipercepat dengan revolusi industri, sedangkan aliran historis menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dilakukan secara bertahap.Pelopor aliran historis antara lain, Frederich List, Karl Bucher, Bruno Hildebrand, Wegner Sombart, dan W.W. Rostow.

2. **Teori pertumbuhan ekonomi Frederich list (1789 - 1846)**

   Tahap-tahap pertumbuhan ekonomi menurut frederich list adalah tingkat-tingkat yang dikenal dengan sebutan Stuffen theorien (teori tangga).Menurut Friendrich List, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa dapat dibagi menjadi empat tahap sebagai berikut:

   1. Masa berburu dan mengembara. Pada masa ini manusia belum memenuhi kebutuhan hidupnya sangat mengantungkan diri pada pemberian alam dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri.
   2. Masa berternak dan bertanam.Pada masa ini manusia sudah mulai berpikir untuk hidup menetap. Sehingga mereka bermata pencaharian bertanam.
   3. Masa Bertani dan kerajinan. Pada masa ini manusia sudah hidup menetap sambil memelihara tanaman yang mereka tanam kerajinan hanya mengajar usaha sampingan.
   4. Masa kerajinan, Industri, dan perdagangan.Pada masa ini kerajinan bukan sebagai usaha sampingan melainkan sebagai kebutuhan untuk di jual ke pasar, sehingga industri berkembang dari industri kerajinan menjadi industri besar.

3. **Teori pertumbuhan ekonomi Karl Bucher (1847 - 1930)**

   Pada tahap Perekonomian menurut Karu Bucher ini dapat dibagi menjadi 4, yaitu:

   1. Rumah tangga tertutup
   2. Rumah tangga kota
   3. Rumah tangga bangsa
   4. Rumah tangga dunia

4. **Teori pertumbuhan ekonomi Bruno Hildebrand**

   Bruno Hildebrand melihat pertumbuhan ekonomi masyarakat dari perkembangan alat tukar-menukarnya, yaitu:

   1. masa tukar-menukar secara barter
   2. masa tukar-menukar dengan uang
   3. masa tukar-menukar dengan kredit

5. **Teori pertumbuhan ekonomi Werner sombart (1863 - 1947)**

   Menurut Werner Sombart pertumbuhan ekonomi suatu bangsa dapat dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu:

1. **Masa perekonomian tertutup;** Pada masa ini,semua kegiatan manusia hanya semata-mata untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.Individu atau masyarakat bertindak sebagai produsen sekaligus konsumen sehingga tidak terjadi pertukaran barang atau jasa.Adapu yang menjadi ciri khusus pada masa pererokonomian ini yaitu kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan sendiri, setiap individu sebagai produsen sekaligus sebagai konsumen**,**dan **b**elum ada pertukaran barang dan jasa
2. **Masa kerajinan dan pertukangan;** Pada masa ini, kebutuhan manusia semakin meningkat, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif akibat perkembangan peradaban.Peningkatan kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi sendiri sehingga diperlukan pembagian kerja yang sesuai dengan keahlian masing-masing.Pembagian kerja ini menimbulkan pertukaran barang dan jasa.Pertukaran barang dan jasa pada masa ini belum didasari oleh tujuan untuk mencari keuntungan, namun semata-mata untuk saling memenuhi kebutuhan. Masa kerajinan dan pertukangan memiliki beberapa ciri-ciri seperti; Meningkatnya kebutuhan manusia**,** adanya pembagian tugas sesuai dengan keahlian**, t**imbulnya pertukaran barang dan jasa**,** dan pertukaran belum didasari profit motive
3. **Masa kapitalis;** Pada masa ini muncul kaum pemilik modal (kapitalis).Dalam menjalankan usahanya kaum kapitalis memerlukan para pekerja (kaum buruh).Produksi yang dilakukan oleh kaum kapitalis tidak lagi hanya sekedar memenuhi kebutuhanya, tetapi sudah bertujuan mencari laba. Werner Sombart membagi masa kapitalis menjadi empat masa sebagai berikut:
   a. Tingkat prakapitalis
   b. Tingkat kapitalis
   c. Tingkat kapitalisme raya
   d. Tingkat kapitalisme akhir

Berikut penjelasan lebih rincinya:

1. **Tingkat prakapitalis** ; Masa ini memiliki ciri-ciri seperti ; kehidupan masyarakat masih statis, bersifat kekeluargaan, bertumpu pada sektor

pertanian, bekerja untuk memenuhi kebutuhan sendiri, dan hidup secara berkelompok

2. **Tingkat kapitalis** ; masa ini memiliki cirri-ciri seperti ; kehidupan masyarakat sudah dinamis, bersifat individual, adanya pembagian pekerjaan, dan terjadi pertukaran untuk mencari keuntungan
3. **Tingkat kapitalisme raya** : masa ini memiliki cirri-ciri seperti ; usahanya semata-mata mencari keuntungan, munculnya kaum kapitalis yang memiliki alat produksi, produksi dilakukan secara masal dengan alat modern, perdagangan mengarah kepada ke persaingan monopoli, serta dalam masyarakat terdapat dua kelompok yaitu majikan dan buruh
4. **Tingkat kapitalisme akhir** ;Masa ini memiliki cirri-ciri seperti ;munculnya aliran sosialisme,adanya campur tangan pemerintah dalam ekonomi,dan mengutamakan kepentingan bersama.

6. **Teori pertumbuhan ekonomi Walt Whitmen Rostow (1916 - 1979)**

W.W.Rostow mengungkapkan teori pertumbuhan ekonomi dalam bukunya yang bejudul *The Stages of Economic Growth* menyatakan bahwa pertumbuhan perekonomian dibagi menjadi 5(lima) sebagai berikut:

1. **Masyarakat Tradisional (*The Traditional Society*) ;** Merupakan masyarakat yang mempunyai struktur pekembangan dalam fungsi-fungsi produksi yang terbatas, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi modern, serta terdapat suatu batas tingkat output per kapita yang dapat dicapai
2. **Masyarakat pra kondisi untuk periode lepas landas (*the preconditions for take off*);** Merupakan tingkat pertumbuhan ekonomi dimana masyarakat sedang berada dalam proses transisi dan sudah mulai penerapan ilmu pengetahuan modern ke dalam fungsi-fungsi produksi baru,baik di bidang pertanian maupun di bidang industri.
3. **Periode Lepas Landas (*The take off*)** ; merupakan interval waktu yang diperlukan untuk mendobrak penghalang-penghaang pada pertumbuhan yang berkelanjutan, kekuatan-kekuatan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi diperluas**, t**ingkat investasi yang efektif dan tingkat produksi dapat meningkat**, i**nvestasi efektif serta tabungan yang bersifat produktif meningkat atau lebih dari jumlah pendapatan nasional, dan Industri-industri baru berkembang dengan cepat dan industri yang sudah ada mengalami ekspansi dengan cepat.

4. **Gerak Menuju Kedewasaan (*Maturity*) ;** Merupakan perkembangan terus menerus daimana perekonoian tumbuh secaa teratur serta lapangan usaha bertambah luas dengan penerapan teknologi modern, investasi efektif serta tabungan meningkat dari 10 % hingga 20 % dari pendapatan nasional dan

investasi ini berlangsung secara cepat, o*utput* dapat melampaui pertambahan jumlah penduduk**,** barang-barang yang dulunya diimpor, kini sudah dapat dihasilkan sendiri, serta tingkat perekonomian menunjukkkan kapasitas bergerak melampau kekuatan industri pad masa take off dengan penerapan teknologi modern.

5. **Tingkat Konsumsi Tinggi (*high mass consumption*) ;** Sektor-sektor industri merupakan sektor yang memimpin (*leading sector*) bergerak ke arah produksi barang-barang konsumsi tahan lama dan jasa-jasa,pendapatn riil per kapita selalu meningkat sehingga sebagian besar masyarakat mencapai tingkat konsumsi yang melampaui kebutuhan bahan pangan dasar, sandang, dan pangan, kesempatan kerja penuh sehingga pendapata nasional tinggi, dan pendapatan nasional yang tinggi dapat memenuhi tingkat konsumsi tinggi.

Teori dari Rostow mendapat sanggahan dari kuznets……in nglish.

7. Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik dan Neoklasik

a. Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik

Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi klasik, ada 4 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu: jumlah penduduk, jumlah stok barang-barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, serta tingkat teknologi yang digunakan.Dalam teori pertumbuhan mereka, dimisalkan luas tanah dan kekayaan alam adalah tetap jumlahnya dan tingkat teknologi tidak mengalami perubahan.Berdasarkan kepada teori pertumbuhan ekonomi klasik yang baru menjelaskan bahwa perkaitan di antara pendapatan per kapita dan jumlah penduduk.Teori tersebut dinamakan teori penduduk optimum.Teori pertumbuhan klasik dapat dilihat bahwa apabila terdapat kekurangan penduduk,produksi marjinal adalah lebih tinggi daripada pendapatan per kapita.Akan tetapi apabila penduduk semakin banyak,hukum hasil tambahan yang semakin berkurang akan mempengaruhi fungsi produksi,yaitu produksi marjinal akan mulai mengalami penurunan.Oleh karenanya pendapatan nasional dan pendapatan per kapita menjadi semakin lambat pertumbuhannya.

1. Teori pertumbuhan ekonomi menurut Adam Smith

"An Inquiry into the nature and causes of the wealth of the nation", teorinya yang dibuat dengan teori*the invisible hands* (Teori tangan-tangan gaib)

Teori pertumbuhan ekonomi Adam Smith ditandai oleh dua faktor yang saling berkaitan,yaitu:

1. Pertumbuhan penduduk
2. Pertumbuhan output total

Sedangkan pertumbuhan output yang akan dicapai dipengaruhi oleh 3 komponen berikut ini :

1. Sumber-sumber alam
2. Tenaga kerja (pertumbuhan penduduk)
3. Jumlah persediaan

2. Teori pertumbuhan ekonomi David Ricardo dan T.R Malthus

Menurut David Ricardo faktor pertumbuhan penduduk yang semakin besar hingga menjadi dua kali lipat pada suatu saat akan menyebabkan jumlah tenaga kerja melimpah.Pendapat Ricardo ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Thomas Robert Malthus, menyatakan bahwa makanan (hasil produksi) akan bertambah menurut deret hitung (satu, dua, dan seterusnya).Sedangkan penduduk akan bertambah menurut deret ukur (satu, dua, empat,delapan, enam belas, dan seterusnya) sehingga pada saat perekonomian akan berada pada taraf subisten atau kemandegan.

3. Teori Pertumbuhan Ekonomi Neoklasik

Teori pertumbuhan Neo-klasik melihat dari sudut pandang yang berbeda, yaitu dari segi penawaran.Menurut teori ini, yang dikembangkan oleh Abramovits dan Solow pertumbuhan ekonomi tergantung kepada perkembangan faktor-faktor produksi.Dalam persamaan, pandangan ini dapat dinyatakan dengan persamaan:

AY=f(AK,AL,AT)

Dimana:

AY adalah tingkat pertumbuhan ekonomi

AK adalah tingkat pertumbuhan modal

AL adalah tingkat pertumbuhan penduduk

At adalah tingkat pertumbuhan teknologi

Analisis solow selanjutnya membentuk formula matematik untuk persamaan itu dan seterusnya membuat pembuktian secara kajian empiris untuk menunjukkan kesimpulan berikut: faktor terpenting yang mewujudkan pertumbuhan ekonomi bukanlah pertambahan modal dan pertambahan tenaga kerja.Faktor yang paling penting adalah kemajuan teknologi dan pertambahan kemahiran dan kepakaran tenaga kerja.

1. **Teori pertumbuhan ekonomi Robert Sollow**
   Rober Sollow lahir pada tahun 1950 di Brookyn, ia seorang peraih nobel di bidang dibidang ilmu ekonomi pada tahun 1987.Robert Sollow menekankan perhatiannya pada pertumbuhan out put yang akan terjadi atas hasil kerja dua faktor input utama.Yaitu modal dan tenaga kerja.
2. **Teori pertumbuhan ekonomi Harrod dan Domar**
   RF. Harrod dan Evsey Domar tahun 1947 pertumbhan ekonomi menurut Harrod dan domar akan terjadi apabila ada peningkatan produktivitas modal (MEC) dan produktivitas tenaga kerja.
3. **Teori pertumbuhan ekonomi Joseph Schumpeter**
   Menurut J. Schumpeter, pertumbuhan ekonomi suatu negara ditentukan oleh adanya proses inovasi-inovasi (penemuan-penemuan baru di bidang teknologi produksi) yang dilakukan oleh para pengusaha.Tanpa adanya inovasi, tidak ada pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi adalah dasar bagi maju atau mundurnya sebuah peradaban negara, menjadi paradigma yang harus diukur dan diaktualisasikan dalam implementasi di masyarakat dalam usaha mencapai kemakmuran yang diharapkan.Secara jelas perbedaan dari dua tinjauan tentang pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi dapat terlihat pada tabel di bawah ini :

Perbedaan Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Ekonomi :

Pertumbuhan Ekonomi	Pembangunan Ekonomi
1.Peningkatan jumlah produksi dari tahun ke tahun dalam satu tahun (jangka pendek)	1.Peningkatan jumlah dan kualitas produksi dalam jangka panjang.
2.Kenaikan pendapatan nasional(tidak melihat naik atau turunnyajumlah penduduk)	2.Kenaikan pendapatan perkapita(dg melihat faktor penduduk)
3. Kenaikan pendapatan nasional tidak disertai dengan perubahan struktur ekonomi dan kesejahteraan masyarakat	3 Kenaikan pendapatan perkapita daritahun ketahun yang disertai dengan perubahan struktur ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Demikian pembahasan tentang konsep dasar ilmu ekonomi pembangunan yang saat ini sedang dipelajari dan terus berkembang sesuai dengan dinamika yang terjadi dalam masyarakat.

BAB 2
INDIKATOR PEMBANGUNAN EKONOMI

Pembanguanan nasional di negara-negara dunia ketiga telah dimulai sejak pasca Perang Dunia Kedua. Negara-negara bekas jajahan di Asia dan Afrika, juga Amerika Latin telah menjadi arena pengujian teori-teori pembangunan, melalui praktek formulasi kebijakan pembangunan beserta implementasinya. Hasil dari berbagai pengujian teori di berbagai belahan dunia tersebut, telah memberikan hasil yang beragam dan sumbangan terhadap beberapa cabang ilmu sosial, terutama Ekonomi, Sosiologi dan Ilmu Politik (termasuk Adminisrasi Negara). Pembangunan nasional *(national development)* adalah proses perubahan yang meliputi seluruh dimensi kehidupan masyarakat, seperti ekonomi, politik, infrastruktur, pertahanan, pendidikan, tekonologi, budaya.

Transformasi sosial dapat dilihat dari adanya pendistribusian kemakmuran melalui pendapatan dan pemerataan untuk memperoleh akses terhadap sumber daya sosial-ekonomi, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, fasilitas rekreasi, dan partisipasi dalam proses pembuatan keputusan politik. Transformasi budaya, biasa dikaitkan, antara lain, dengan bangkitnya semangat kebangsaan dan nasionalisme, disamping adanya perubahan nilai dan norma yang dianut masyarakat, seperti perubahan dari spiritualisme ke materialisme/ sekularisme. Pergeseran dari penilaian yang tinggi kepada moralitas menjadi penilaian yang tinggi kepada penguasaan materi, dari kelembagaan tradisional menjadi organisasi modern dan rasional. Secara umum dapat dipahami bahwa pembangunan adalah perubahan sosial, sedangkan perubahan sosial tidak selalu identik dengan pembangunan. Dalam konteks ini, pembangunan adalah perubahan yang direncanakan,disengaja dan diinginkan untuk mencapai tujuan tertentu.Proses pembangunan terjadi dalam semua aspek kehidupan masyarakat,baik yang berlangsung pada tingkat nasional maupun wilayah/daerah.Karakteristik yang cukup penting dalam pembangunan adalah adanya kemajuan/perbaikan *(progress)*,pertumbuhan,dan difersifikasi.Kemajuan misalnya, dapat diidentifikasi dari adanya peningkatan dalam rasionalisasi kehidupan masyarakat, teknologi dan efisiensi. Sedangkan pertumbuhan identik dengan kemajuan ekonomi yang ditandai oleh peningkatan pendapatan masyarakat sebagai akibat dari pertumbuhan produktifitas dan diikuti oleh diversifikasi kegiatan ekonomi, baik vertikal maupun horizontal. Dengan

demikian, pembangunan memiliki tiga ciri dasar yaitu: pertumbuhan, diversifikasi/diferensiasi dan perbaikan *(progress)* yang terjadi pada semua aspek dan tingkat kehidupan masyarakat. Proses pembangunan dapat dibedakan menurut kecepatan *(rate)*, arah *(direction)* dan level dimana proses tersebut berlangsung.Hal ini terjadi karena variabel-variabel pembangunan berubah dengan *rates* (kecepatan) yang berbeda di tempat yang berbeda. Sebuah bangsa yang baru membangun mungkin hanya dapat memusatkan usaha-usaha pembangunannya kepada aspek-aspek primer seperti *nation building*, penurunan angka kelahiran dan kematian, pendidikan dasar, dan infrastruktur seperti jalan/jembatan dan komunikasi.

Penggunaan indikator dan variabel pembangunan bisa berbeda untuk setiap negara atau wilayah. Misalnya, di negara-negara yang masih miskin, ukuran kemajuan dan pembangunan mungkin masih sekitar pemenuhan berbagai kebutuhan dasar seperti listrik masuk desa, layanan kesehatan pedesaan, dan harga makanan pokok yang rendah. Sementara itu, untuk negara-negara/wilayah yang telah dapat memenuhi kebutuhan tersebut, indikator pembangunan akan bergeser kepada faktor-faktor sekunder dan tersier, seperti:

(1) Pertumbuhan ekonomi yang mendorong pemerataan, kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup;
(2) Menguatkan ekonomi nasional/domestik yang dapat memperluas lapangan kerja, sehingga daya beli masyarakat terus meningkat baik untuk barang lokal maupun impor;
(3) Diversifikasi kegiatan/sektor ekonomi dengan penguatan sektor industri dan jasa disertai dengan keseimbangan antara produksi barang ekspor dan impor;
(4) Partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik dan proses pembuatan keputusan;
(5) Tersedianya kesempatan untuk memperoleh pendidikan untuk semua lapisan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan;
(6) Stabilitas sosial, politik dan pemerintahan yang disertai dengan penguatan hak-hak azasi manusia.

Dalam perkembangan selanjutnya, *development* dapat dibedakan menjadi *economic development* dan *social development,* seperti yang dikemukakan oleh Blakely (1989), Pembangunan ekonomi berkenaan dengan investasi, peningkatan penyerapan angkatan kerja, dan peningkatan upah buruh. Dalam pandangan pembangunan endogen, pembangunan ekonomi dapat dipahami sebagai proses melalui mana pemerintah lokal bekerjasama dengan kelompok-kelompok masyarakat dan swasta dalam mengelola sumberdaya yang tersedia untuk menciptakan lapangan kerja dan menstimulasi kegiatan ekonomi. Pembangunan sosial berkenaan dengan

pembangunan masyarakat secara menyeluruh, yang mencakup ekonomi, politik, budaya, hukum, kelembagaan, kesehatan, pendidikan dan dimensi-dimensi sosial lainnya. Didalamnya mencakup juga pemberdayaan sektor swasta dan masyarakat sipil, proses politik yang partisipatif dan akuntabel, pembangunan infrastruktur ekonomi dan sosial, termasuk pelayanan sosial yang memadai dan memuaskan.

Dari uraian diatas, dapat diidentifikasi beberapa indikator dalam berbagai dimensi pembangunan yang dapat diklasifikasikan menjadi indikator ekonomi, kesejahteraan sosial dan partisipasi politik atau demokratisasi. Sejumlah indikator ekonomi yang banyak digunakan oleh lembaga-lembaga internasional antara lain pendapatan per kapita (GNP atau PDB) dan jumlah tabungan, sebagai indikator pertumbuhan.Struktur perekonomian dan tingkat urbanisasi, sebagai indikator diferensiasi sosial-ekonomi.Sedangkan indikator *progress,* antara lain, dapat dilihat dalam tingkat pendidikan dan kesehatan.Masing-masing indikator ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pendapatan per kapita

Pendapatan per kapita, baik dalam ukuran GNP maupun PDB merupakan salah satu indikator makroekonomi yang telah lama digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.Dalam perspektif makroekonomi, indikator ini dapat menggambarkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan merupakan bagian kesejahteraan manusia yang dapat diukur.Pendapatan juga dapat digunakan sebagai data kegiatan ekonomi, terutama dalam kaitannya dengan produksi barang dan jasa oleh masyarakat dalam suatu periode tertentu.Selama ini, peningkatan dalam pendapatan nasional telah menjadi fokus dari pengukuran pembangunan. Badan-badan internasional,seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional telah menggunakannya untuk melihat dan membandingkan kinerja perekonomian negara-negara di seluruh dunia.Tampaknya, pendapatan per capita telah menjadi indikator makroekonomi yang tidak bisa diabaikan, walaupun memiliki beberapa kelemahan.Sehingga pertumbuhan pendapatan nasional, selama ini, telah dijadikan tujuan pembangunan di negara-negara dunia ketiga.Seolah-olah ada asumsi bahwa kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara otomatis ditunjukkan oleh adanya peningkatan pendapatan nasional (pertumbuhan ekonomi).

Walaupun demikian, beberapa pakar mengganggap, bahwa penggunaan indikator ini sebagai tujuan pembangunan telah mengabaikan pola distribusi pendapatan nasional. Dengan kata lain, indikator ini tidak mengukur distribusi pendapatan dan pemerataan kesejahteraan, termasuk pemerataan

akses terhadap sumber daya ekonomi. Indikator ini tidak dapat menjelaskan situasi ketimpangan pendapatan dalam sebuah masyarakat atau bangsa. Sebagai indikator pemerataan, Bank Dunia menggunakan ukuran 20 persen dari penduduk lapisan paling atas yang dapat menikmati pendapatan nasional, dibandingkan dengan 20 persen penduduk pada lapisan terbawah. Struktur pendapatan masyarakat dapat juga diklasifikasikan menjadi tiga kolompok, yaitu 40 persen tingkat bawah, 40 persen tingkat menengah dan 20 persen tingkat atas. Ketimpangan pendapatan, misalnya, bisa dilihat pada angka 20 persen kelompok atas yang menguasai 73.5 persen pendapatan nasioanal seperti terjadi di Equador pada 1970. Sebaliknya, indikasi pemerataan tampak lebih baik di Amerika Serikat, dimana 38,8 persen pendapatan nasional disumbangkan oleh 20 persen kelompok masyarakat tingkat atas, pada tahun yang sama. Besarnya kelas menengah juga bisa dilihat dari penguasaan kelas ini terhadap pendapatan nasional. Misalnya, di Amerika Serikat 41,5 persen (1970) dan Inggris 42,2 persen (1968). Pada umumnya, ketimpangan pendapatan yang cukup tajam lebih banyak ditemukan di negara-negara miskin.

Melalui indikator pendapatan perkapita ini Bank Dunia (2003) mengklasifikasikan negara menjadi tiga golongan (Kuncoro : 2001), yaitu :

a) Negara berpenghasilan rendah (*low-income economies*), Negara-negara ini memiliki Pendapatan perkapita Kurang atau sama dengan US$ 745 petahun.
b) Negara berpenghasilan menengah (*middle-income economies*), kelompok Negara ini memiliki Pendapatan perkapita lebih dari US$ 745 namun kurang dari US$ 8.626 pertahun

Indeks Gini juga digunakan untuk mengukur distribusi pendapatan dalam sebuah negara/masyarakat. Penggunaan index dan ukuran pemerataan kesejahteraan perlu dipertimbangkan, karena menurut para ahli, pada awal terjadinya pertumbuhan ekonomi di negara-negara miskin, tidak akan memperbaiki status kaum miskin. Pada tahap awal pembangunan, yang akan memperoleh keuntungan dan menikmati hasil-hasilnya adalah mereka yang berada dalam kelompok berpenghasilan tinggi dan menengah. Sedangkan mereka yang di dalam kelompok berpenghasilan rendah akan tetap tertinggal sampai pada tahap pembangunan tertentu dalam waktu yang cukup lama.

Adapun kelemahan dalam indikator ini adalah bersumber pada anggapan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat ditentukan oleh besarnya pendapatan per kapita masyarakat tersebut.Dilain pihak Nilai pendapatan perkapita secara khusus merupakan indeks untuk menunjukkan perbandingan kesejahteraan dan

jurang tingkat kesejahteraan antar masyarakat masih mempunyai kelemahan.Kelemahan tersebut timbul karena perbandingan dengan cara demikian mengabaikan adanya perbedaan-perbedaan antara Negara dalam hal seperti, struktur umur penduduk, distribusi pendpatan masyarakat nasional, metode perhitungan pendapatan, dan perbedaan nilai mata uang nasional dengan mata uang dolar Amerika Serikat.

b. Struktur Ekonomi

Telah menjadi asumsi bahwa peningkatan pendapatan per kapita akan mencerminkan transformasi struktural dalam bidang ekonomi dan kelas-kelas sosial. Dengan adanya perkembangan ekonomi dan peningkatan pendapatan per kapita, kontribusi sektor manufaktur/industri dan jasa terhadap pendapatan nasional akan meningkat terus. Perkembangan sektor industri dan perbaikan tingkat upah akan meningkatkan permintaan atas barang-barang industri, yang akan diikuti oleh perkembangan investasi dan perluasan penyerapan angkatan kerja. Di lain pihak, kontribisi sektor pertanian terhadap pendapatan nasional akan semakin menurun. Angkatan kerja sektoral juga akan mengalami transformasi sesuai dengan perkembangan industrialisasi. Pada tahap awal pembangunan, proporsi terbesar angkatan kerja adalah di sektor pertanian, kemudian diikuti oleh sektor-sektor industri/manufaktur dan jasa. Pada tahap berikutnya, angakatan kerja akan terkonsentrasi di sektor industri. Terjadinya proses industrialisasi dapat dilihat dari perubahan yang dialami oleh tiga sektor utama ekonomi, yaitu sektor primer (pertanian), sekunder (industri) dan tersier (jasa). Sebuah negara bisa dikatakan negara industri apabila proporsi sektor primer di dalam pendapatan nasional kurang dari 15 persen dan proporsi angkatan kerja di sektor ini tidak lebih dari 20 persen. Sedangkan proporsi penduduk perkotaan (urban) diatas 60 persen.

c. Urbanisasi

Urbanisasi dapat diartikan sebagai meningkatnya proporsi penduduk yang bermukim di wilayah perkotaan dibandingkan dengan di pedesaan. Urbanisasi dikatakan tidak terjadi, apabila pertumbuhan penduduk di wilayah urban sama dengan nol. Sesuai dengan pengalaman industrialisasi di negara-negara Eropa Barat dan Amerika Utara, maka proporsi penduduk di wilayah urban berbanding lurus dengan proses industrialisasi. Ini berarti bahwa kecepatan urbanisasi akan semakin tinggi sesuai dengan cepatnya proses industrialisasi. Di negara-negara industri, sebagian besar penduduk tinggal di wilayah perkotaan; sedangkan di negara-negara yang sedang berkembang proporsi terbesar tinggal di wilayah pedesaan. Berdasarkan kepada fenomena ini, maka urbanisasi telah digunakan sebagai salah satu indikator pembangunan.

Negara-negara dengan tingkat urbanisasi yang tinggi akan memiliki pertumbuhan yang rendah. Sedangkan negara-negara dengan tingkat urbanisasi yang masih rendah, biasanya memiliki tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi. Misalnya, pertumbuhan penduduk urban di Amerika Serikat dan Inggris, dengan tingkat urbanisasi yang telah mencapai 77 dan 89 persen, lebih rendah dari yang terjadi di negara-negara dunia ketiga. Secara demografis, pertumbuhan penduduk wilayah urban, bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Antara lain perpindahan penduduk desa ke kota, angka kelahiran yang lebih tinggi dan angka kematian yang lebih rendah dari pada di desa, sehingga pertumbuhan alami menjadi lebih besar. Peristiwa migrasi masyarakat desa ke kota karena industrialisasi dapat memberik an kontribusi yang cukup berarti terhadap tingginya angka urbanisasi.

d. Angka Tabungan

Perkembangan sektor manufaktur/industri selama tahap industrialisasi memerlukan investasi dan modal. *Financial capital* merupakan faktor utama dalam proses industrialisasi dalam sebuah masyarakat, sebagaimana terjadi di Inggris dan Eropa pada umumnya pada awal pertumbuhan kapitalisme yang disusul oleh revolusi industri. Dalam masyarakat yang memiliki produktifitas yang tinggi, modal usaha ini dapat dihimpun melalui tabungan, baik swasta maupun pemerintah. Sejarah perkembangan ekonomi di Eropa menunjukkan bahwa sektor primer telah berhasil menciptakan surplus yang merupakann awal dari proses pembentukan modal *(capital formation)*. Investasi, baik untuk industrialisasi maupun perdaganagan bisa didukung oleh ketersediaan modal yang dibentuk oleh surplus dan tabungan masyarakat. Dengan demikian, jumlah tabungan masyarakat *(domestic saving)* dapat dijadikan salah satu indikator pembangunan. Misalnya, angka tabungan di Indonesia selama periode 1989-1993 adalah 23,9 persen dari PDB.

e. Indeks Kualitas Hidup (IKH)

IKH atau *Physical Quality of Life Index (PQLI)* digunakan untuk mengukur kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Indeks ini dibuat karena apabila hanya indikator makroekonomi digunakan dalam mengukur keberhasilan ekonomi, maka ia tidak dapat memberikan gambaran tentang kesejahteraan masyarakat. Misalnya, pendapatan nasional sebuah bangsa dapat tumbuh terus, tetapi tanpa diikuti oleh peningkatan kesejahteraan sosial. Indeks ini dihitung berdasarkan kepada (1) angka rata-rata harapan hidup pada umur satu tahun, (2) angka kematian bayi, dan (3) angka melek huruf. Dalam indeks ini, angka rata-rata harapan hidup dan kematian bayi akan dapat menggambarkan status gizi anak dan ibu, derajat kesehatan, dan lingkungan keluarga yang langsung berasosiasi denga kesejahteraan keluarga. Pendidikan yang diukur dengan angka

melek huruf, dapat menggambarkan jumlah orang yang memperoleh akses pendidikan sebagai hasil pembangunan. Seperti dikemukakan diatas, variabel ini menggambarkan kesejahteraan masyarakat, karena tingginya status ekonomi keluarga akan mempengaruhi status pendidikan para anggotanya. Oleh para pembuatnya, index ini dianggap sebagai yang paling baik untuk mengukur kualitas manusia sebagai hasil dari pembangunan, disamping pendapatan per kapita sebagai ukuran kuantitas manusia.

f. Indeks Pembangunan Manusia(Human Development Index)

The United Nations Development Program (UNDP) telah membuat indikator pembangunan yang lain,sebagai tambahan untuk beberapa indikator yang telah ada.Ide dasar yang melandasi dibuatnya index ini adalah pentingnya memperhatikan kualitas sumber daya manusia.Menurut UNDP,pembangunan hendaknya ditujukan kepada pengembangan sumber daya manusia.Dalam pemahaman ini, pembangunan dapat diartikan sebagai sebuah proses yang bertujuan untuk mengembangkan piliha-pilihan yang dapat dilakukan oleh manusia.Hal ini didasarkan kepada asumsi bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia akan diikuti oleh terbukanya berbagai pilihan dan peluang untuk menentukan jalan hidup manusia secara bebas. Pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai faktor penting di dalam kehidupan manusia, tetapi tidak secara otomatis akan mempengaruhi peningkatan martabat dan harkat manusia.Dalam hubungan ini, ada tiga komponen yang dianggap sangat menentukan dalam pembangunan yaitu umur panjang dan sehat, perolehan dan pengembangan pengetahuan, dan peningkatan terhadap akses untuk kehidupan yang lebih baik.Index ini dibuat dengan mengkombinasikan tiga komponen, yaitu (1) rata-rata harapan hidup pada saat lahir, (2) rata-rata pencapaian pendidikan tingkat SD, SMP, dan SMU, dan (3) pendapatan per kapita yang dihitung berdasarkan *Purchasing Power Parity*.Pengembangan manusia berkaitan erat dengan peningkatan kapabilitas manusia yang dapat dirangkum dalam peningkatan *Knowledge, Attitude* dan *Skills*, disamping derajat kesehatan seluruh anggota keluarga dan lingkungannya.Istilah Pembangunan Ekonomi atau Pembangunan saja pada umumnya diartikan sebagai serangkaian usaha dalam suatu perekonomian untuk mengembangkan kegiatan ekonominya sehingga infrastruktur lebih banyak tersedia, perusahaan semakin banyak dan semakin berkembang, taraf pendidikan semakin tinggi dan teknologi semakin meningkat.Sebagai implikasi dari perkembangan ini diharapkan kesempatan kerja akan bertambah, tingkat pendapatan meningkat, dan kemakmuran masyarakat menjadi semakin tinggi.Istilah Ekonomi Pembangunan mempunyai arti yang sangat berbeda dari yang dijelaskan di atas, tetapi kedua istilah itu mempunyai hubungan yang sangat erat.Ekonomi Pembangunan adalah suatu bidang studi

dalam ilmu ekonomi yang mempelajari tentang masalah-masalah ekonomi di negara-negara berkembang dan kebijakan-kebijakan yang perlu dilakukan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi.

Keberhasilan dalam mewujudkan pembangunan ekonomi tergambarkan dari pencapaian suatu sasaran atau tujuan dari indikator pembangunan yang telah ditetapkan.Oleh karena itu indikator harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam perencanaan,pelaksanaan maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi.

Secara umum indikator berfungsi untuk memperjelas tentang apa,berapa dan kapan suatu kegiatan pembangunan dilaksanakan serta membangun dasar bagi pengukuran, analisis, dan evaluasi kinerja organisasi.Beberapa pertimbangan dalam penyusunan indikator pembangunan adalah kesederhanaan, skop yang jelas,pengukuran elemen,kuantifikasi,sensitivitas dan batas waktu.

Indikator pembangunan sangat berguna untuk menganalisis dan mengevaluasi hasil-hasil pembangunan.Indikator pembangunan dapat memberikan gambaran mengenai lajunya perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat dan corak perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat yang terjadi di berbagai negara.Selain itu,indikator pembangunan juga dapat dipergunakan untuk mengetahui syarat-syarat yang diperlukan oleh negara berkembang untuk menyamakan tingkat kehidupannya dengan negara maju.

Dari berbagai pendekatan yang ada, terdapat tiga kelompok cara dalam menetapkan indikator pembangunan, yakni: (1) indikator berbasis tujuan pembangunan, (2) indikator berbasis kapasitas sumberdaya, dan (3) indikator berbasis proses pembangunan.

Indikator berbasis tujuan pembangunan merupakan sekumpulan cara mengukur tingkat kinerja pembangunan dengan mengembangkan berbagai ukuran operasional berdasarkan tujuan – tujuan pembangunan. Dari berbagai pendekatan dismpulkan tiga tujuan pembangunan yakni:

1. Produktivitas, efesiensi dan pertumbuhan
2. Pemerataan keadilan dan keberimbangan
3. Keberlanjutan

Indikator non meneter (non monetary indicator)merupakan indicator yang diambil dari beberapa hal pokok yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat.Sama halnya dengan indicator sebelumnya, Indikator memiliki beberapa macam-macam sub- Indikator.Berikut ini adalah uraiannya.

1. **Indikator Sosial**

   Ahli Pembangunan Ekonomi yang bernama Beckerman membedakan berbagai penelitian tentang cara-cara membandingkan tingkat kesejahteraan dalam 3 kelompok.

   Kelompok pertama,merupakan suatu usaha untuk membandingkan tingkat kesejahteraan yang terjadi dalam masyarakat yang ada di dalam dua atau beberapa Negara dengan cara memperbaiki pelaksanaan dalam perhitungan pendapatan nasional biasa.Usaha ini dipelopori oleh Colin Clark yang selanjutnya disempurnakan oleh Gilbert dan Kravis dalam Sukirno (1985).

   Kelompok kedua,dengan usaha membuat penyesuaian dalam pendapatan masyarakat yang dibandingkan dengan melihat pertimbangan perbedaan tingkat harga disetiap Negara.

   Kelompok ketiga,adalah usaha untuk membuat perbandingan tingkat kesejahteraan dari setiap Negara berdasarkan pada data yang tidak bersifat moneter seperti, jumlah kendaraan bermotor, konsumsi minyak, jumlah penduduk yang mengenyam pendidikan, dan usaha ini dipelopori oleh tokoh yang bernama Bennet (2004).

   Menurut Beckerman, dari tiga cara diatas,cara yang dirasa paling tepat adalah cara yang dilakukan oleh Gilbert dan Kravis.Cara ini merupakan usaha untuk membandingkan tingkat kesejahteraan dan pembangunan di berbagai Negara dengan memperbaiki metode pembanding dengan menggunakan data pendapatan nasional dari masing-masing Negara.

   Dengan cara-cara diatas memiliki kelemahan pada Negara sedang berkembang.Pada dasarnya Negara berkembang tidak memiliki data-data tentang cara-cara diatas.Sehingga Beckerman (1993) mengemukakan lagi cara yang lain dalam membandingkan tingkat kesejahteraan masyarakat di berbagai Negara yaitu dengan menggunakan data yang bukan bersifat moneter untuk menentukkan indeks kesejahteraan masyarakat disetiap Negara.Cara ini sering disebut dengan Indikator Non-Moneter Disederhanakan.Untuk itu, berikut adalah data yang dapat digunakan untuk memperoleh indikator tersebut.

a. Jumlah konsumsi baja dalam satu tahun (kg)
b. Jumlah konsumsi semen dalam satu tahun dikalikan 10 (ton)
c. Jumlah surat dalam negeri dalam satu tahun.
d. Jumlah persediaan pesawat radio dikalikan 10.
e. Jumlah persediaan telpon dikalikan 10.
f. Jumlah persediaan berbagai jenis kendaraan.
g. Jumlah konsumsi daging dalam satu tahun (kg).

Usaha lain juga dilakukan oleh United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD) untuk menentukan dan membandingkan tingkat kesejahteraan suatu Negara.Untuk menciptakan indeks taraf pembangunan,ada 18 jenis data yang harus diperoleh yakni :

a. Tingkat harapan hidup.
b. Presentase anak-anak yang belajar di sekolah dasar dan menengah.
c. Persenatse tenaga kerja (dari seluruh tenaga kerja yang mempunyai pekerjaan) yang bekerja di sector listrik, gas, air, kesehatan, pengangkut, pergudangan, dan komunikasi.
d. Persentase tenaga kerja (dari keseluruhan tenaga kerja yang memiliki pekerjaan) yang memperoleh gaji.
e. Produk pertanian rata-rata dari pekerja laki-laki di sector pertanian.
f. Pendapatan per kapita Produk Nasional Bruto.

Apabila indeks pembangunan yang diusulkan oleh UNRISD ini digunakan sebagai indicator kesejahteraan atau pembangunan ekonomi,maka perbedaan tingkat pembangunan antara negara maju dan negara sedang berkembang tidak terlalu besar seperti yang digambarkan berdasarkan pendapatan perkapita masing-masing Negara.Namun seringkali pula digambarkan dalam indikator campuran untuk menjelaskan pembangunan ekonomi suatu negara, hal tersebut antara lain meliputi:

1) Pendidikan

Pendidikan adalah suatu indicator yang digunakan dalam mengukur pembangunan ekonomi suatu Negara.Pada umumnya,dalam Negara maju tingkat pendidikan rata-rata tinggi dengan TPAK dari tahun ketahun selalu meningkat.Negara maju sangat memperhatikan tingkat pendidikan para penduduknya.Berbeda dengan Negara sedang berkembang, pendidikan di NSB masih rendah jika dibandingkan Negara maju.Terbukti tingkat melek huruf dan TPAk serta angka partisipasi sekolah masih rendah.Sehingga, dari perbandingan tersebut, indicator yang dapat diukur dalam pendidikan yakni ;tingkat pendidikan,tingkat melek huruf,dan tingkat partisipasi pendidikan.

2) **Kesehatan**

Kesehatan merupakan hak asasi yang harus dipenuhi demi keberlangsungannya kehidupan bermasyarakat.Indikator tingkat kesehatan dapat dilihat dari rata-rata hari sakit dan ketersediaannya fasilitas kesehatan.Ketika terpenuhinya pembangunan ekonomi berupa kesejahteraan dalam bidang kesehatan,dapat dilihat dari beberapa indikasi berupa tingkat mortalitas yang rendah, angka pertumbuhan penduduk yang tinggi, dan angka harapan hidup yang tinggi.

3) **Perumahan**

Rumah merupakan kebutuhan primer yang harus terpenuhi oleh masing-masing penduduk.Indicator perumahan yang sesuai dengan tujuan kesejahteraan penduduk yakni sumber air bersih dan listrik,sanitasi,dan mutu rumah tinggal.

4) **Angkatan Kerja**

Penduduk yang dikatakan angkatan kerja adalah orang yang telah berumur 15-64 tahun.Angkatan kerja ini juga dibagi lagi menjadi dua yakni bekerja dan sedang mencari pekerjaan (Menganggur).Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kesejahteraan angkatan kerja adalah, partisipasi tenaga kerja, jumlah jam kerja, sumber penghasilan utama, dan status pekerjaan.

5) **KB dan Fertilitas**

Indikator yang dapat digunakan yakni,penggunaan asi,tingkat imunisasi,kehadiran tenaga kesehatan pada kelahiran,dan penggunaan alat kontrasepsi.

6) **Ekonomi**

Pembangunan ekonomi pada dasarnya di ikuti dengan pertumbuhan ekonomi.Dengan adanya pertumbuhan ekonomi, kita dapat melihat Indikator ekonomi itu sendiri,yakni tingkat pendapatan dan konsumsi per kapita.

7) **Kriminalitas**

Pada dasarnya Negara maju memiliki tingkat kriminalitas yang rendah,hal ini disebabkan sudah lengkapnya alat keamanan Negara yang digunakan oleh Negara tersebut. Hal ini berbeda dengan keadaan di Negara sedang berkembang.Di NSB,banyak terjadi kriminalitas yang disebabkan beberapa factor seperti adanya cultural shock,ketidak mampuan dalam memenuhi kebutuhan, dan adanya kepentingan dari suatu pihan.Indicator kriminalitas itu sendiri diantaranya adalah, jumlah pencurian per tahun, jumlah pembunuhan per tahun, dan jumlah pemerkosaan per tahun.

8) **Perjalanan Wisata**

Indikatornya adalah frekuensi perjalanan wiata per tahun.

9) **Akses Media Massa**

Akses media bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi dalam masyarakat itu sendiri.Indikatornya antara lain:jumlah surat kabar,jumlah radio, dan jumlah televise.

Indikator pembangunan dapat memberikan gambaran mengenai lajunya perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat dan corak perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat yang terjadi di berbagai negara.Selain itu,indikator pembangunan juga dapat dipergunakan untuk mengetahui syarat-syarat yang diperlukan oleh negara berkembang untuk menyamakan tingkat kehidupannya dengan negara maju.

BAB 3
MASALAH PEMBANGUNAN EKONOMI FAKTOR DALAM NEGERI

Kondisi yang ada hari ini adalah pola aktivitas ekonomi yang begitu dinamis, konsumsi yang tinggi dan mobilitas yang mudah untuk mengakses semua kebutuhan hidup pada negara maju berbading terbalik dengan negara berkembang maupun negara miskin yang mana mayoritas masyarakatnya masih kesulitan memenuhi kebutuhan pokoknya, seperti perumahan, makanan, pendidikan dan kebutuhan pokok lainnya.Daya beli yang rendah, tingkat pengangguran yang tinggi, inflasi yang sering menggoyang ekonomi baik konsumen, produsen maupun pelaku kebijakan. Hal inilah yang akan dijelaskan di dalam bab ini dengan tujuan bermuara pada solusi yang sejatinya dapat memecahkan permasalahan tersebut.

Ada beberapa hal akan diurai dalam menggambarkan kondisi di dalam negri,hal tersebut terangkum di bawah ini (Sukirno:2000):

a. Penduduk dan tingkat kesejahteraan
b. Dualisme
c. Lingkaran perangkap kemiskinan
d. Struktur eksport bahan mentah
e. Proses sebab akibat kumulatif

Untuk mengenal permasalahan diatas,maka selanjutnya akan diuraikan tentang masalah yang menjadi penghambat pembangunan ekonomi tersebut.

a. Penduduk yang kita analisa adalah dua hal, pertama adalah jumlah penduduk dunia yang sudah sangat banyak sedangkan yang kedua adalah tingkat pertambahan penduduk yang semakin meningkat disertai penduduk pada angkatan kerja (15-65 tahun) yang memiliki permasalahan sendiri di setiap negara berkembang terutama pengangguran yang tersebunyi (disguised unemployment) yang bekerja namun produktivitas mereka rendah,hal ini merupakan permasalahan tersendiri bagi pelaku kebijakan selain banyaknya pengangguran oleh karena penawaran pekerjaan lebih rendah dari permintaan pekerjaan dalam aktivitas ekonomi. Penduduk yang tidak produktif merupakan sumber permasalahan kriminalitas, depresi, sasaran narkoba dan sejumlah impact lainnya yang mengganggu ketertiban masyarakat. Sesungguhnya penduduk yang

banyak merupakan potensi bagi terciptanya lapangan pekerjaan dengan catatan bahwa pendiduk yang dimaksud memiliki kompetensi yang mumpuni jika posisinya sebagai produsen, sebaliknya penduduk yang banyak merupakan potensi pasar dimana penduduk selaku konsumen dari hasil produksi tersebut memiliki daya beli untuk memenuhi semua kebutuhannya.Disinilah letak posisi penduduk yang produktif.Namun apabila tidak terpenuhinya persyaratan tersebut,seringkali penduduk terjebak pada level tingkat kesejahteraan yang rendah (*The law level equilibrium trap*)atau cukup hidup bahkan tidak layak dalam konsumsi sehari-harinya.Inilah gambaran permasalahan penduduk negara berkembang pada saat ini.

b. **Dualisme** adalah suatu kondisi di masyarakat dimana terdapat dua sistem yang berbeda dengan hidup berdampingan dan satu sama lain tidak dapat saling menguasai.Terdapat dualism sosial, dualism teknologi,dualisme finansial dan dualism regional.Adapun *dualisme sosial* di dalam masyarakat terdapat dua sistem sosial yang pertama system sosial yang sudah maju sedangkan lainnya sistem sosial yang menandakan masih terdapatnya sisa-sisa budaya lama yang masih lekat dengan feodalimse warisan jajahan di jaman dahulu, yang kedua adalah *dualisme teknologi* yang dapat digambarkan bahwa pada masyarakat saat ini ada sekelompok masyarakat yang sudah menguasai teknologi dan nuansa yang canggih dan update sedangkan pada sisi lain masih terdapat masyarakat yang jauh dari teknologi dan ironisnya mereka masih mempethahnkan hal tersebut, pada sisi lain tidak kalah pentingnya untuk ditelaah adalah *dualisme finansial* dimana beberapa orang sudah dapat menyimpan asetnya di dalam sistem kelembagaan yang resmi dan fasilitas dana yang aman dan mudah, sementara pada masyarakat lainnya masih berlaku sistem penyimpanan dan peminjaman yang sarat dengan budaya lama seperti sistem yang dikelola perorangan tanpa lembaga yang resmi yang seringkali merugikan masyarakat. Terakhir adalah *dualisme regional* adalah pola kebijakan pembanguna wilayah yang berbeda, seringkali antara pusat dan daerah atau antar daerah yang saling bertolak belakang. Dualisma ini merupakan salah satu masalah dan hambatan di dalam pembangunan ekonomi di negara berkembang oleh karena sangan menyulitkan di dalam koordimasi perencanaan wilayah maupun gerak bersama ke arah kemajuan.

c. **Lingkaran perangkap kemiskinan,** adalah suatu rangkaian kekuatan-kekuatan yang saling mempengaruhi satu sama lain secara sedemikian rupa sehingga menimbulkan keadaan dimana suatu negara akan tetap miskin dan akan mengalami banyak kesukaran untuk mencapai tingkat pembangunan yang lebih tinggi.Nurske mengemukakan teorinya tersebut sebagai landasan perlunya strategi pembangunan di negara- negar berkembang.Secara singkat kondisi tersebut berawal dari tingkat produktivitas masyarakat yang rendah berakibat

pada tingkat tabungan rendah selanjutnya investasi yang rendah sehingga penguasaan terhadap barang-barang modal juga rendah kemudian berujung pada produktivitas yang rendah pula.Adapun langkah untuk keluar dari kondisi tersebut antara lain adalah adanya suntikan dana (*injection*).

d. **Struktur eksport,** yang seringkali disebut sebagai struktur ekspot kolonial dimana ada tiga hal bentuk ekport, *pertama* adalah sebagaian besar barang yang dieksport merupakan hasil indutri primer seperti pertambangan dan sejenisnya, *kedua* yakni bahan mentah yang dieksport jenis- jenisnya terbatas dan yang *terakhir* adanya penguasaan eksport oleh penguasa- penguasa yang ada dibawah pengaruh penjajah.Inilah yang mengakibatkan hilangnya nilai tambah (*value added*) dari eksport dan tidak dapat memberikan sumbangan pada percepatan pembangunan ekonomi.

e. **Proses sebab akibat kumulatif (circular cumulative causation),** yang dikemukakan oleh Myrdal bahwa dalam proses pembangunan terdapat faktor-faktor yang akan memperburuk perbedaan tingkat pembanguan diantara berbagai daerah atau negara yang digolongkan pada backwash effects dan spread effect. Faktor yang menyebabkan backwash effects ditimbulkan oleh perpindahan penduduk dari daerah miskin ke daerah maju yang mana biasanya para pekerja memiliki tingkat pendidikan yang rendah dengan tingkat penghasilan yang rendah, hal ini menyebabkan terakumulasinya pemukiman yang kumuh, berlakunya kriminalitas dan sejenisnya. Dilain pihak dapat pula terbentuknya spread effects dimana akibat perkembangan didaerah maju merebak hingga ke daerah miskin, berdirinya pabrik- pabrik ataupu efek pertumbuhan ekonomi lain di daerah miskin yang membawa pada kemakmuran daerah miskin. Namun yang perlu ditelaah adalah pada umumnya backwash effects lebih sering terjadi dibandingkan dengan spread effects di mayoritas negar berkembang. Inilah sebagian dari permasalahan di dalam negri yang memerlukan pola kebijakan yang dapat merubah keadaan tersebut diatas.

Demikian kondisi permasalahan umum yang terjadi pada negara berkembang yang perlu dikaji lebih dalam dan dibuat perencanaan yang langsung menjangkau pada akar masalah sehingga perkembangan pembangunan ekonomi dapat segera terwujud.

Permasalahan ekonomi yang terjadi di suatu negara dapat memperlambat laju pertumbuhan ekonomi.Di Indonesia permasalahan ekonomi dapat menghambat terwujudnya dan kesejahteraan masyarakat.Beberapa permasalahan ekonomi Indonesia menurut Kuncoro (2010),sebagai berikut:

1. **Rendahnya Pertumbuhan Ekonomi**

   Pertumbuhan ekonomi suatu negara merupakan salah satu indikasi yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan negara tersebut.Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat melalui tingkat produksi barang dan jasa yang dapat dihasilkan selama satu periode tertentu.Pertumbuhan ekonomi negara berkembang seperti Indonesia sering terkendala masalah modal dan investasi.Indonesia masih bergantung pada modal dari investasi pihak asing untuk menunjang kegiatan ekonominya.Lambatnya pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi naiknya harga minyak dunia.Kenaikan harga minyak dunia merupakan akibat langkanya minyak mentah.Kelangkaan disebabkan menipisnya cadangan minyak serta terhambatnya distribusi minyak.Kenaikan harga minyak menyebabkan harga barang pokok lain ikut naik.Akibatnya,daya beli masyarakat menjadi berkurang dan terjadi penurunan kegiatan ekonomi masyarakat.

2. **Kemiskinan**

   Kemiskinan merupakan keadaan masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.Kebutuhan hidup meliputi makanan,pakaian,tempat tinggal,pendidikan,dan kesehatan.Kemiskinan sebagai akibat berkurangnya pendapatan masyarakat secara riil.Masyarakat mengalami penurunan daya beli barang-barang kebutuhan pokok secara umum.Akibatnya, masyarakat tidak dapat hidup secara layak sehingga taraf hidupnya menurun. Berdasarkan data BPS bulan Maret 2012 jumlah penduduk yang berada dalam garis kemiskinan berjumlah sekitar 29,13 juta orang (11,96%).Jumlah ini berkurang sebanyak 0,89 juta orang dari periode yang sama tahun sebelumnya.Menurunnya angka kemiskinan ditunjang adanya penurunan harga komoditas makanan sedikit lebih besar dibandingkan peranan komoditas bukan makanan.

3. **Pengangguran**

   Secara umum pengangguran diartikan sebagai angkatan kerja yang tidak bekerja.Pengangguran merupakan rantai masalah yang dapat menimbulkan beberapa permasalahan pada suatu negara.Pengangguran disebabkan jumlah angkatan kerja yang tidak seimbang dengan jumlah lapangan kerja/kesempatan kerja.Akibatnya, banyak angkatan kerja yang tidak dapat terserap dalam lapangan pekerjaan sehingga menimbulkan pengangguran.Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah angkatan kerja di Indonesia tahun 2012 mencapai 120,4 juta jiwa. Sementara itu, jumlah pengangguran pada bulan Februari 2012 sebanyak 7,61 juta jiwa turun dari tahun sebelumnya sebanyak 7,7 juta jiwa.Hal ini diharapkan sebagai indikasi yang baik mengenai perbaikan keadaan ketenagakerjaan di Indonesia. Untuk mencapai harapan tersebut, pemerintah perlu mengusahakan kebijakan di bidang ketenagakerjaan, misalnya perbaikan kualitas tenaga kerja / sumber daya manusia, menciptakan lapangan pekerjaan,

mendorong tumbuhnya investasi dan modal, menyediakan informasi lapangan pekerjaan, serta memberikan pelatihan dan keterampilan bagi tenaga kerja.

4. **Kesenjangan Penghasilan**

   Penghasilan digunakan masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhannya.Dalam masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhannya.Dalam masyarakat terdapat kelompok masyarkat dengan penghasilan tinggi dan kelompok masyarakat dengan penghasilan rendah.Masyarakat yang memiliki penghasilan tinggi mampu memenuhi kebutuhan hidupnya mulai dari kebutuhan primer,sekunder,hingga tersier.Sementara itu, kelompok masyarakat yang memiliki penghasilan rendah tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya meskipun kebutuhan yang paling dasar.Perbedaan kelompok masyarakat dengan penghasilan tertentu menimbulkan permasalahan kesenjangan penghasilan.Oleh karena itu, diperlukan peran pemerintah dalam memeratakan penyaluran distribusi pendapatan.Hal ini dilakukan untuk meratakan kemampuan masyarakat dalam menikmati hasil pembangunan.Selain itu, upaya pemerintah dalam meratakan penghasilan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan dan kecemburan sosial masyarakat.

5. **Inflasi**

   Berdasarkan data BPS, inflasi Indonesia pada tahun 2011 sebesar 3,79%.Inflasi yang terjadi di Indonesia disebabkan tingginya permintaan agregat, sementara permintaan barang dan jasa tidak diimbangi dengan kemampuan produksi dan kenaikan biaya produksi.Inflasi ditandai oleh kenaikan harga barang dan jasa secara keseluruhan.Hal ini akan menimbulkan penurunan daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa.Inflasi berdampak pada lesunya kegiatan perekonomian, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah, melemahnya nilai rupiah, dan ketidakstabilan perekonomian negara.Berdasarkan sumbernya inflasi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu inflasi tarikan permintaan dan inflasi dorongan biaya.

6. **Hutang Luar Negeri**

   Indonesia memiliki hutang luar negeri yang sangat banyak yakni lebih dari USD 100 miliar.Setiap kementerian mempunyai hutang.Indonesia adalah negara dengan hutang luar negeri terbesar ke-3 di dunia setelah Brazil dan Meksiko.Hutang yang terus menumpuk tersebut menyebabkan terjadinya berbagai masalah perekonomian seperti nilai mata uang Rupiah yang terus menurun.

7. **Defisit Anggaran**

   APBN Indonesia selalu mengalami defisit.Defisit adalah saat ketika anggaran belanja lebih tinggi dari anggaran pendapatan.Itulah salah satu alasan kenapa hutang negara kita terus menumpuk.Penyebab utamanya adalah korupsi,perilaku pemerintah yang sangat boros anggaran,dan subsidi yang tidak tepat sasaran.

8. **Ketidakmampuan Industrial**

   Industri di Indonesia kebanyakan hanya merakit barang saja.Kalaupun ada industri besar, industri tersebut pasti milik asing.Perindustrian masih sangat bergantung pada ekonomi, bahan baku, dan teknologi asing.Padahal kita memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang sangat besar.Namun karena kita tidak dapat mengelolanya dengan baik, maka kita harus meminta bantuan asing.Akibatnya, sebagian keuntungan dibawa ke luar negeri sedangkan Indonesia hanya mendapatkan pendapatan dari pajak dan upah buruh saja.

9. **Ketidakmampuan Mengelola Sumber Daya Manusia**

   Walaupun penduduk Indonesia terbanyak ke-4 di dunia,namun kualitasnya masih sangat buruk.Sehingga Indonesia selalu kekurangan para ahli dan harus mendatangkannya dari luar negeri.Sedangkan kebanyakan orang Indonesia yang bekerja di luar negeri hanya bisa menjadi pembantu saja.

10. **Penguasaan Iptek yang Kurang**

    Penguasaan iptek di Indonesia juga masih sangat kurang.Ini disebabkan karena jumlah tenaga ahli di Indonesia masih sangat sedikit.Kalaupun ada, mereka lebih memilih untuk bekerja di luar negeri karena penghasilannya jauh lebih tinggi.Penguasaan iptek yang kurang menyebabkan Indonesia tidak bisa mengelola kekayaan alamnya sendiri.

11. **Korupsi**

    Korupsi menjadi masalah serius di negeri ini.Hampir di semua bidang terjadi korupsi dan suap-menyuap baik itu "kelas teri" maupun "kelas kakap".Akibatnya bermacam-macam,mulai dari program pemerintah yang menjadi kacau,penegakan hukum menjadi lemah,dan pemborosan anggaran.

12. **Masalah Pangan**

    Ketidakmampuan pemerintah dalam mengendalikan harga pangan membuat harga pangan terus meroket terutama sembako.Ditambah lagi dengan semakin sempitnya lahan pertanian akibat alih fungsi lahan.Sangat ironis memang mengingat Indonesia adalah negara agraris yang sangat subur.Kesejahteraan petani yang kurang diperhatikan menjadi salah satu penyebabnya.Untuk memenuhi kebutuhan pangan saat ini,pemerintah harus mengimpornya dari luar negeri.

13. **Pembangunan yang Cenderung Tersentralisasi**
    Indonesia memang sedang pesat-pesatnya membangun.Tetapi yang disayangkan adalah kenapa hanya kawasan tertentu saja yang dibangun sedangkan daerah lain ditinggalkan begitu saja.Hal ini menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial dan daerah perkotaan menjadi semakin padat.Jika pemerintah melakukan pembangunan secara merata,maka setiap daerah akan berkembang lebih cepat dan itu juga bisa mempercepat kemajuan Indonesia.

Namun demikian dengan seluruh potensi ekonomi yang ada maka optimime untuk keluar dari kesulitan diatas selalu ada dengan memperbaiki kinerja di setiap sektor ekonomi maupun sektor lainnya.

BAB 4
MASALAH PEMBANGUNAN EKONOMI FAKTOR LUAR DALAM NEGERI

Ada beberapa hal yang sangat penting peran eksport bagi suatu negara yang mana anatara lain terdapat kemungkinan mencapai tingkat konsumsi yang lebih tinggi dibandingkan dengan tanpa adanya kegiatan tersebut, selanjutnya dapat memperluas pasar prosuk dalam negri dan dapat terserapnya tingkat teknologi yang lebih tinggi yang telah dikembangkan di luar negri. Pandangan dari Miynt tentang comparative cost dimana sebuah negara dapat melakukan spesialisasi pada produksi barang-barang yang memiliki keuntungan berbading di pasaran luar negri serta adanya peningkatan produktivitas pada barang-barang yang di eksport atau doktrin productivity, sedangkan analisa dari Smith menunjukkan tentang timbulnya perluasan pasar sebagai keuntungan utama dari perdagangan luar negri yang sering dinamakan vent for surplus **(**Sadono: 2000). Sebuah negara yang melakukan perdagangan luar negri mendapata keuntungan mutlak maupun keuntungan berbanding yang dapat dijelaskan sebagai berikut, dimana keuntungan mutlak adalah keuntungan yang diperoleh suatu negara dari mengkhususkan kegiatannya kepada memproduksikan barang-barang dengan efisiensi yang lebih tinggi dari negar-negara lain. Adapun keuntungan berbading dapat diartikan sebagai keuntungan yang diperoleh oleh suatu negara dari melakukan spesialisasi dalam memproduksikan barang-barang yang mempunyai harga relatif yang lebih rendah dari negara lain.

Permasalahan inilah yang terdapat pada negara berkembang yang mana pada umumnya sukar untuk memperoleh keuntungan tersebut,secara umum perdagangan luar negri tidaklah menaikkan kesejahteraan mereka namum malah memperburuk neraca pembayaran negara tersebut , struktur eksport colonial dapat menjadi salah satu penyebabnya yang seringkali kondisi ini disebut sebagai disequalizing forces atau kekuatan yang tidak menyeimbangkan.

Secara umum sebuah negara mendapatkan keuntungan dari perdagangan luar negri apabila hal di bawah ini berlaku,antara lain:

a. Tingkat perkembangan eksport yang tinggi dimana sebuah Negara berada pada posisi neraca pembayaran internasonal yang surplus menjadikan modal bagi pembiayaan pembangunan maupun cadangan bagi pembayaran hutang luar

negri, hal sbaliknya akan berdampak buruk apabila eksport tidak dapat menutup kewajiban tersebut yang berakibat pada lemahnya ekonomi secara nasional.

b. Kesempatan kerja naik,hal ini sangat berdampak luas pada kekuatan daya beli masyarakat yang merupakan indicator kesejahteraan.
c. Marginal propencity to import rendah,angka ini menujukkan bahwa sebuah Negara sudah mandiri dalam produk dalam negri sehingga tidak terlalu tergantung pada sektro impor yang hanya akan menguras devisa dalam negri.
d. Investasi yang naik, dapat mendorong kegiatan ekonomi pada berbagai sektor sehigga pada gilirannya dapat berakumulasi pada peningkatan pendapatan Negara sebuah bangsa.
e. Terjadinya ekonomis ekstern yang merupakan dampak positif dari tumbuhnya sektor pemimpin (*leading sector*)yang menumbuhkan pertumbuhan ekonomi ke depan (*forward linkage*) maupun ke belakang (*upward linkage*).

Untuk mengatasi berbagai hal diatas, negara kita meminta bantuan dari asing dalam bentuk hutang luar negri,bantuan yang dibawa para donor ini memiliki motivasi tertentu yang dapat berupa ikatan keuangan denagn kata lain konsekwensi dari kebijakan tersebut pada sisi tertentu dapat mendorong pembangunan ekonomi tetapi pada sisi lain dapat menimbulkan meningkatnya permintaan barang dan jasa dari Negara donor.Tidak selamanya kegiatan perdagangan internasional dapat berjalan sesuai dengan kondisi yang diinginkan, biasanya sering terjadi hambatan atau masalah-masalah yang menjadi faktor penghalang bagi setiap negara yang terlibat didalamnya.Masalah eksport di negeri ini terbagi dalam dua kelompok utama yaitu masalah internal dan eksternal.

A. Faktor Eksternal

Masalah yang bersifat eksternal meliputi hal-hal yang terjadi di luar perusahaan yang akan mempengaruhi kegiatan ekspor impor.Masalah tersebut antara lain:

1. Kepercayaan Antara Eksportir Importir

Kepercayaan adalah salah satu faktor eksternal yang penting untuk menjamin terlaksananya transaksi antara eksportir dan importir.Dua pihak yang tempatnya berjauhan dan belum saling mengenal merupakan suatu resiko bila dilibatkan dengan pertukaran barang dengan uang.Apakah importir percaya untuk mengirimkan uang terlebih dahulu kepada eksportir sebelum barang dikirim atau sebaliknya apakah eksportir mengirimkan barang terlebih dahulu kepada importir sebelum melakukan pembayaran.

Oleh karena itu, sebelum kontrak jual beli diadakan masing-masing pihak harus sudah mengetahui kredibilitas masing-masing.Beberapa cara yang lazim dilakukan untuk mencari kontrak dagang antara lain :

a. Memanfaatkan buku petunjuk perdagangan yang berisi nama,alamat,dan jenis usaha.
b. Mencari dan mengunjungi perusahaan di negara lain.
c. Meminta bantuan bank di dalam negri yang selanjutnya mengadakan kontak dengan bank korespondennya di luar negri untuk menghubungkan nasbah kedua bank.
d. Membaca publikasi dagang dalam dan luar negri.
e. Konsultasi dengan pengusaha dalam bidang yang sama.
f. Melalui perwakilan perdagangan.
g. Iklan

Pada dasarnya faktor kepercayaan ini lebih dititikberatkan pada kemampuan kedua belah pihak baik eksportir maupun importir dalam menilai kredibilitas masing-masing.

2. Pemasaran

Faktor yang perlu dipertimbangkan dalam masalah ono adalah ke negara mana barng akan dipasarkan untuk mendapatkan harga yang sebaik-baiknya.Sebaliknya bagi importir yang penting diketahui adalah dari mana barang-barang tertentu sebaiknya akan diimpor untuk memperoleh kondisi pembayaran yang lebih baik. Dalam hal penetapan harga komoditi ekspor dan konsep pemasarannya, eksportir perlu mengetahui apakah dapat bersaing dalam penjualannya di luar negri,dengan mengetahui informasi mengenai :

a. Ongkos atau biaya barang
b. Sifat dan tingkat persaingan
c. Luas dan sifat permintaan

Sedangkan penentuan jenis-jenis barang didasarkan pada informasi mengenai :

a. Peraturan perdagangan negara setempat
b. Pembatasan mutu dan volume barang-barang tertentu
c. Kontinuitas produksi barang
d. Negara tujuan barang-barang ekspor

Masalah pokok lain dalam hal pemasaran yang sering dihadapi oleh eksportir maupun importir adalah daya saing, yang meliputi :

a. Daya saing rendah dalam harga dan waktu penyerahan
b. Daya saing dianggap sebagai masalah intern eksportir, padahal sesungguhnya menjadi masalah nasional
c. Saluran pemasaran tidak berkembang di luar negri

d. Kurangnya pengetahuan akan perluasan pemasaran serta teknik-teknik pemasaran

3. **Sistem Kuota dan Kondisi Hubungan Perdagangan Dengan Negara Lain**

Keinginan Eksportir dan importir untuk mencari,memelihara atau meningkatkan hubungan dagang dengan sesamanya juga tergantung pada kondisi negara kedua pihak yang bersangkutan.Bilamana terdapat pembatasan seperti ketentuan kuota barang dan kuota negara,maka upaya meningkatkan transaksi yang saling menguntungkan tidak sepenuhnya dapat terlaksana.

Upaya yang dapat dilakukan oleh setiap negara adalah dengan meningkatkan hubungan antar negara baik yang bersifat bilateral, multilateral, regional maupun internasional, guna menciptakan suatu turan dalam hal pembatasan barang (kuota) bagi transaksi perdaganga.Hal ini membuktikan bahwa pembatasan terhadap barang-barang yang masuk ke suatu negara serta hubungan antara negara tempat terjadinya perdagangan menjadi faktor penentu kelancaran proses ekspor impor

4. **Keterkaitan Dalam Keanggotaan Organisasi Internasional**

Keikutsertaan suatu negara dalam organisasi internasional dimaksudkan untuk mengatur stabilitas harga barang ekspor di pasar internasional.Namun terlepas dari manfaat yang diperoleh dari keanggotaan organisasi tersebut, keanggotaan didalamnya tak jarang merupakan penghambat untuk dapat melakukan tindakan tertentu bagi peningkatan transaksi komoditi yang bersangkutan, seperti contoh ICO dengan kuota kopi, serta penentuan harga yang lebih bersaing yang sering dihadapi anggota-anggota OPEC.

5. **Kurangnya Pemahaman Akan Tersedianya Kemudahan-kemudahan Internasional**

Kemudahan-kemudahan internasional seperti ASEAN Preferential Trading Arrangement yang menyediakan kemudahan trarif sangat berguna bagi pengembangan perdagangan antara negara ASEAN.Kemudahan tarif yang disediakan bersifat timbal balik dan pemanfaatannya dilakukan dengan menerbitkan.Formulir C oleh negara asal barang.Juga adanya tax treaty antar negara-negara tersebut.

B. Faktor Internal

Keharusan perusahaan-perusahaan ekspor impor untuk memenuhi persyaratan berusaha adakalanya tidak mendapat perhatian sungguh-sungguh.Persiapan teknis yang seharusnya telah dilakukan diabaikan karena diburu oleh tujuan yang lebih utama yakni mendapatkan keuntungan yang cepat dan nyata.Masalah yang bersifat internal meliputi hal-hal yang terjadi di dalam perusahaan yang akan mempengaruhi kegiatan ekspor impor. Masalah tersebut antara lain:

1. **Persiapan Teknis**

   Menyangkut persyaratan-persyaratan dasar untuk pelaksanaan transaksi ekspor impor berupa:

   a. Status badan hukum perusahaan
   b. Adanya izin usaha (SIUP) serta izin ekspor maupun impor (APE,APES, API, APIS, APIT)
   c. Kemapuan menyiapkan persyaratan-persyaratan lain seperti dokumen pengapalan, realisasi pengapalan serta kejujuran dan kesungguhan berusaha termasuk itikad baik.

   Dari sisi eksportir terkadang masalah yang timbul adalah kemampuang yang bersangkutan dalam menyiapkan dokumen-dokumen pengapalan serta itikad baik dan kejujuran untu mengirimkan barangnya. Perusahaan ekspor impor haruslah menjaga reputasi perusahannya, disamping itu untuk menjamin kelangsungan izin usahanya maka kontinuitas aktivitas –aktivitas transaksinya harus dipertahankan dan ditingkatkan.

2. **Kemampuan dan Pemahaman Transaksi Luar Negri**

   Keberhasilan transaksi ekspor impor sangat didukung oleh sejauhmana pengetahuan atau pemahaman eksportir/importir menyangkut dasar-dasar transaksi ekspor impor,tata cara pelaksanaan,pengisian dokumen serta peraturan-peraturan dalam dan luar negri.

3. **Pembiayaan**

   Pembiayaan transaksi merupakan masalah yang penting yang tidak jarang dihadapi oleh para pengusaha eksportir/importir kita.Biasanya masalah yang dihadapi antaralain ketercukupan akan dana,fasilitas pembiayaan dana yang dapat di peroleh serta bagaimana cara memperolehnya.Dalam hal ini para pengusaha harus mampu mengatur keuangannya secara bijak dan mempelajari serta memanfaatkan kemungkinan fasilitas-fasilitas pembiayaan untuk pelaksanaan transaksi-transaksi yanmg dilakukan.Menyangkut bagaimana para eksportir/importir membiayai transaksi perdagangan.

4. **Kekurangsempurnaan dalam Mempersiapkan Barang**

   Khusus dalam transaksi ekspor, kurang mampunya eksportir dalam menanggulangi penyiapan barang dapat menimbulkn akibat yang tidak baik bagi kelangsungan hubungan transaksi dengan rekannya di luar negri.

   Masalah-masalah yang timbul adalah akibat dari hal-hal berikut :

   a. Pengiriman barang terlambat disebabkan oleh kesulitas administrasi dan pengaturan pengangkutan, peraturan-peraturan pemerintad dan sebagainya.
   b. Mutu barang yang tidak dapat dipertahankan sesuai dengan perjanjian

c. Kelangsungan penyediaan barang sesuai dengan perjanjian tidak dapat dipenuhi.
d. Pengepakan yang tidak memenuhi syarat
e. Keterlambatan dalam pengiriman dokumen-dokumen pengapalan.

5. **Kebijaksanaan dalam pelaksanan ekspor impor**

Kelancaran transaksi ekspor impor sangat tergantung pada peraturan-peraturan yang mendasarinya.Peraturan-peraturan yang apabila sering berubah-ubah dapat membingungkan dan menimbulkan salah pengertian dan kekliruan,baik di pihak pengusaha di dalam negri maupun pengusaha di luar negri.Diperlukan penjelasan yang cukup tentang latar belakang perubahan-perubahan dan tujuannya, sehingga masing-masing pihak memaklumi dan mengetahui aturan main dalam transaksi selanjutnya.

Uraian diatas menjadi sebuah pola untuk dapat segera mengatasi permasalahan ekspor kita ke luar negri karena dengan perdagangan internasional yang maju dapat menjadi pendorong pembangunan ekonomi dengan catatan,nilai tukar kita ada dalam kondisi yang menguntungkan.

BAB 5
SISTEM EKONOMI DALAM MASA TRANSISI

Keadaan sistem ekonomi Indonesia pada masa pemerintahan transisi memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Kegoncangan terhadap rupiah terjadi pada pertengahan 1997, pada saat itu dari Rp 2500 menjadi Rp 2650 per dollar AS. Sejak masa itu keadaan rupiah menjadi tidak stabil.
- Krisis rupiah akhirnya menjadi semakin parah dan menjadi krisis ekonomi yang kemudian memuncuilkan krisis politik terbesar sepanjang sejarah Indonesia.
- Pada awal pemerintahan yang dipimpin oleh Habibie disebut pemerintahan reformasi. Namun, ternyata pemerintahan baru ini tidak jauh berbeda dengan sebelumnya, sehingga kalangan masyarakat lebih suka menyebutnya sebagai masa transisi karena KKN semakin menjadi, banyak kerusuhan.

Para ahli berpendapat bahwa pada masa ini begitu krusial untuk di bahas, oleh karena menentukan langkah pembangunan selanjutnya sebuah negara yang akan mengarah pada perubahan ekonomi yang semakin membaik atau memburuk. Menurut David Korten (2000) pada masa ini ditandai dengan:

1. Adanya Rekonsiliasi dan demilititerisasi yang mana uapaya untuk mengkondisikan situasi politik yang aman dan tenag dari gangguan dalam negeri maupun luar negeri dengan tidak menggunakan kekuatan militer yang akan membuatbmasyarakat ketakutan akan situasi yang ada.
2. Gaya hidup dan teknologi memiliki arti bahwa masyarakat didorong untuk memiliki gaya hidup yang hemat dengan penggunaan teknologi hanya pada aspek yang urgen saja sehingga dapat menyimpan tabungan untuk investasi.
3. Pembangunan spiritual melalui keharmonisan diadalam interaksi masyarakat maupun situasi dalam pemerintahan yang menjadikan situasi politik menjadi aman dan tentram
4. Demokrasi politik dan ekonomi yang memberikan kebebasan bagi masyarakat untyuk ikut berperan aktif dalam pembangunan serta adanya demokrasi ekonomi yang menumbuhkan setiap sektor ekonomi untuk berkembang.

Uraian diatas cukup memberikan gambaran tentang fenomena pada masa transisi dari berbagai sudut acuan,baik ekonomi,politik,spiritual, dan seterusnya.

A. Biaya Sosial Pada Masa Transisi

Biaya sosial yang didapat rakyat semakin besar jika masa transisi semakin lama. Pada saat ini saja sudah dapat disaksikan betapa besarnya penderitaan rakyat akibat berbagai kebijakan ekonomi yang dihasilkan di masa transisi. Keluarga yang mendaftarkan diri saat ini sebagai keluarga miskin bertambah menjadi 10 juta keluarga. Setelah melalui verifikasi pemerintah, hanya 2,5 juta keluarga yang berhak menerima bantuan langsung tunai (BLT). Sebelumnya sudah ada 15 juta keluarga yang menerima BLT. Dengan demikian total keluarga yang akan mendapat BLT adalah 17,5 juta. Jika yang 15 juta ditambahkan dengan 10 juta keluarga yang mengusulkan mendapat BLT maka akan ada 25 juta keluarga miskin di Indonesia. Jika diasumsikan setiap keluarga terdiri dari 4 orang maka jumlah orang miskin adalah sebesar 100 juta jiwa.

Sementara jumlah keluarga yang berada di atas kriteria keluarga miskin jumlahnya juga tidak sedikit. Disamping itu kriteria keluarga miskin juga masih bisa diperdebatkan mengingat selama ini pengertian miskin oleh pemerintah belum sesuai dengan realitas di masyarakat. Keluarga miskin dicirikan dengan rumah kayu atau non tembok dan tidak memiliki televisi. Padahal keluarga yang rumahnya tembok dan memiliki televisi banyak juga yang tergolong miskin karena mereka tidak mampu menyekolahkan anak-anaknya dan sulit memenuhi biaya kesehatan serta sulit memnuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Paradoks antara perkembangan demokrasi dan peningkatan jumlah penduduk miskin adalah hasil dari semakin panjangnya masa transisi yang harus dilalui bangsa Indonesia. Tidak pernah terpikirkan kapan bisa berakhir. Hal ini juga sangat tergantung kepada pemerintah karena konsekuensi dari pemilihan presiden langsung adalah timbulnya hak presiden menjabarkan visi pemerintahannya. Jika pemerintah terjebak kepada dinamika politik yang berkembang, maka bisa diramalkan transisi akan lebih panjang. Ini mengakibatkan tumpulnya kepekaan terhadap kesulitan ekonomi rakyat.

Memburuknya kinerja ekonomi, suburnya praktik korupsi, dan suasana politik yang centang perenang selama 10 tahun reformasi memaksa rakyat untuk berhemat pada setiap sektor dengan beban pajak yang semakin banyak, perlunya reformasi dari berbagai sektor ekonomi bukanlah sebuah hal yang harus ditunda lagi, seperti mengembalikan pada swasembada beras ataupun ekspor pada sektor riil yang

menjadi unggulan sebagai negara agraris. Kebijakan yang implementatif dapat memacu pada seluruh sektor termasuk didalamya adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang di cita- citakan.

B. Ekonomi Indonesia pada Masa Krisis Moneter

Sejak krisis moneter yang melanda Indonesia pada pertengahan tahun 1997, perusahaan perusahaan swasta mengalami kerugaian yang tidak sedikit, bahkan pihak perusahaan mengalami kesulitan memenuhi kewajibannya untuk membayar gaji dan upah pekerjanya.Keadaan seperti ini menjadi masalah yang cukup berat karena disatu sisi perusahaan mengalami kerugaian yang cukup besar dan disisi lain para pekerja menuntut kenaikan gaji.Tuntutan para pekerja untuk menaikkan gaji sangat sulit dipenuhi oleh pihak perusahaan, akhirnya banyak perusahaan yang mengambil tindakan untuk mengurangi tenaga kerja dan terjadilah PHK.Kondisi perekonomian semakin memburuk, karena pada akhir tahun 1997 persedian sembilan bahan pokok sembako di pasaran mulai menipis.Hal ini menyebabkan harga-harga barang naik tidak terkendali.Kelaparan dan kekurangan makanan mulai melanda masyarakat. Ini adalah kesalahan Pemerintah Orde Baru yang mempunyai tujuan menjadikan Negara Republik Indonesia sebagai negara industri, namun tidak mempertimbangkan kondisi riil di Masyarakat Indonesia yang merupakan sebuah masyarakat agrasis dan tingkat pendidikan yang tergolong masih rendah.Dan ujung-ujungnya masyarakat miskin Indonesia menjadi bertambah dan bertambah pula beban pemerintah dalam mendongkrak perekonomian guna meningkatkan kesejehteraan rakyat.Habibie yang menjabat sebagai presiden menghadapi keberadaan Indonesia yang serba parah.Langkah-langkah yang dilakukan oleh Habibie adalah berusaha untuk dapat mengatasi krisis ekonomi dan untuk menjalankan pemerintahan, Presiden Habibie tidak mungkin dapat melaksanakannya sendiri tanpa dibantu oleh menteri-menteri dari kabinetnya.Pada tanggal 22 Mei 1998, Presiden Republik Indonesia yang ketiga B.J. Habibie membentuk kabinet baru yang dinamakan Kabinet Reformasi Pembangunan.

Langkah pertama yang dilakukan BJ Habibie dalam mengatasi krisis ekonomi Indonesia antara lain mendapatkan kembali dukungan dari Dana Moneter Internasional (IMF) dan komunitas negara-negara donor untuk program pemulihan ekonomi.Pertumbuhan ekonomi mulai positif pada Triwulan I dan II tahun 1999.Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia mengalami pemulihan.Untuk mewadahi reformasi ekonomi telah diberlakukan beberapa Undang-Undang yang mendukung persaingan sehat, seperti UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan usaha tidak sehat dan UU Perlindungan Konsumen.Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau

lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persai ngan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Sedangkan Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.Dan semuanya berdasarkan kepada asas Demokrasi Ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Serta untuk mecapai tujuan menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar,pelaku usaha menengah,dan pelaku usaha kecil.

Pengembangan ekonomi kerakyatan yang dalam rangka memberdayakan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan dan memperkuat ketahanan ekonomi sosial penekanannya adalah pada usaha kecil, menengah dan koperasi menjadi salah satu perhatian utama.Nilai tukar rupiah terjun bebas dari Rp 2.000 per dolar AS menjadi Rp 12.000-an per dolar pada awal terjadinya krisis moneter dan utang luar negeri yang jatuh tempo sehinga membengkak akibat depresiasi (penyusutan) rupiah.Hal ini diperbarah oleh perbankan swasta yang mengalami kesulitan likuiditas.Inflasi meroket diatas 50%, dan pengangguran mulai terjadi dimana-mana.

Ada beberapa hal yang dilakukan oleh pemerintahan Habibie untuk memperbaiki perekonomian Indonesia antaranya :

1. Merekapitulasi perbankan dan menerapkan independensi Bank Indonesia agar lebih fokus mengurusi perekonomian. Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independent berdasarkan UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia. Dalam rangka mencapai tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia didukung oleh 3 (tiga) pilar yang merupakan 3 (tiga) bidang utama tugas Bank Indonesia yaitu Menetapkan dan melaksanakan kebijaksanaan moneter , mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran serta Mengatur dan mengawasi Bank
2. Melikuidasi beberapa bank bermasalah.

   Likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya.Pengertian lain adalah kemampuan seseorang atau perusahaan untuk memenuhi kewajiban atau utang yang segera harus dibayar dengan harta lancarnya.Banyaknya utang perusahaan swasta yang jatuh tempo dan tak mampu membayarnya dan pada akhirnya pemerintah mengambil alih bank-bank yang

bermasalah dengan tujuan menjaga kestabilan ekonomi Indonesia yang pada masa itu masih rapuh.

3. Menaikan nilai tukar rupiah

Selama lima bulan pertama tahun 1998, nilai tukar rupiah terhadap dollar AS berfluktuasi. Selama triwulan pertama, nilai tukar rupiah rata-rata mencapai sekitar Rp9200,- dan selanjutnya menurun menjadi sekitar Rp8000 dalam bulan April hingga pertengahan Mei. Nilai tukar rupiah cenderung di atas Rp10.000,- sejak minggu ketiga bulan Mei. Kecenderungan meningkatnya nilai tukar rupiah sejak bulan Mei 1998 terkait dengan kondisi sosial politik yang bergejolak. nilai tukar rupiah menguat hingga Rp. 6500 per dollar AS di akhir masa pemerintahnnya.

4. Mengimplementasikan reformasi ekonomi yang diisyaratkan oleh IMF.

Pada tanggal 15 januari 1998 (masih orde baru) Indonesia telah menandatangani 50 butir kesepakatan (letter of intent atau Lol) dengan IMF.Salah satunya adalah memberikan bantuan (pinjaman) kepada bank-bank yang mengalami masalah likuiditas.Skema ini dilakukan berdasarkan perjanjian Indonesia dengan IMF dalam mengatasi masalah krisis.Pemberian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) merupakan konsekuensi diterbitkannya kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Kepres No.26/1998 dan Kepres No.55/1998. Keppres itu terbit setelah sebelumnya didahului munculnya Surat Gubernur BI (Soedradjad Djiwandono, ketika itu) tertanggal 26 Desember 1997 kepada Presiden dan disetujui oleh Presiden Soeharto sesuai surat Mensesneg No.R 183/M.sesneg/12/19997.Atas dasar hukum itulah Bank Indonesia melaksanakan penyaluran BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) kepada perbankan nasional. Total BLBI yang dikucurkan hingga program penyehatan perbankan nasional selesai mencapai Rp144,5 triliun, dana itu tersalur ke 48 bank.

Pada tahun 1999 di zaman Presiden BJ Habibie sebanyak 48 Bankir penerima BLBI melakukan penyelesaiaan settlement aset atas BLBI yang diterimanya melalui berbagai macam perjanjian dengan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang terdiri dari lima bankir mengikat perjanjian dengan skema Master of Settlement Acquisition Agreement (MSAA) dimana nilai aset yang diserahkan kepada pemerintah sama dengan total hutang BLBI yakni sebesar Rp89,2 triliun, tiga bankir menyelesaikan utang dengan mengikat perjanjian Master of Refinancing and Notes Issuence Agreement (MRNIA) dimana nilai aset lebih kecil dibandingkan hutang BLBI yang diterima sehingga harus ditambah personal guarantee dengan total utang BLBI sebesar Rp22,7 triliun.Selain itu terdapat 25 bankir mengikat perjanjian penyelesaian hutang melalui skema Akte Pengakuan Utang (APU) sebesar Rp20.8 triliun, sementara 15 bankir semua asetnya langsung ditangani oleh Bank Indonesia yang sampai hari ini belum jelas pertanggung

jawabannya sebesar Rp11,8 triliun. Jadi untuk MSAA dan MRNIA saja sudah 77 % mewakili penyelesaain BLBI.Khusus untuk perjanjian APU tidak semua menandatanganinnya di era Presiden Habibie, sebagian di era Presiden Abdurahman 'Gusdur' Wahid, sebagian lagi dimasa Presiden Megawati. Sementara sebagian yang tidak kooperatif dan diserahkan kepolisi pada masa pemerintahan Megawati jumlahnya delapan orang, diantarannya Atang Latief (Bank Bira), James Januardy (Bank Namura), Ulung Bursa (Lautan Berlian).

Beberapa keberhasilan ekonomi di era Habibie sebenarnya tidak lepas dari usaha kerja keras para kabinetnya yang reformis.Namun, perlu disadari bahwa Habibie bukanlah presiden yang benar-benar reformis dalam menolak kebijakan ekonomi ala IMF.Dengan keterbatasannya, beliau terpaksa menjalani 50 butir kesepakatan (LoI) antara pemerintah Indonesia dengan IMF, sehingga penangganan krisis ekonomi di Indonesia pada hakikatnya lebih pada penyembuhan dengan "obat generik", bukan penyembuhan ekonomi "terapis" ataupun "obat tradisional".Sehingga ketika meninggalkan tampuk kekuasaan, Indonesia masih rapuh. Disisi lain,Habibie masih sangat mempercayai tokoh-tokoh Orde baru duduk di kabinetnya, padahal masyarakat menuntut reformasi.Dan tampaknya, Habibie memang menempatkan dirinya sebagai Presiden Transisi.

C. Peran Pemerintah Dalam Masa Transisi

Masa transisi yang panjang perlu disikapi dengan melihat kebijakan ekonomi apa yang bisa mengeluarkan rakyat dari jebakan masa transisi. Jebakan transisi menumbuhkembangkan birokrasi yang kurang peka terhadap kesulitan ekonomi rakyat. Untuk itu perlu adanya lembaga di luar birokrasi yang mampu memberikan pencerahan ekonomi seperti halnya kemunculan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bisa memberikan sedikit pencerahan dalam penegakan hukum pemberantasan korupsi. Zakat adalah potensi yang selama ini belum tergarap secara optimal. Sosialisasinya masih sangat minim. Meskipun masyarakat Indonesia adalah mayoritas muslim, namun kesadaran dan pengetahuan tentang kewajiban zakat relatif masih kurang. Di tengah carut marut masa transisi, sosialisasi zakat perlu diperkuat agar terjadi distribusi aset dalam skala ekonomi yang besar.

Untuk itu perlu dibuat lembaga yang menangani zakat yang anggotanya diseleksi dan diuji kelayakan dan kepatutan di depan DPR agar didapatkan personil yang mampu mengelola masalah zakat dengan baik serta mendapatkan dukungan dari pemerintah baik berupa dana maupun lainnya. Pemerintah perlu diberikan masukan yang intensif untuk masalah ini agar terbuka pemikirannya untuk memperbaiki ekonomi rakyat. Kebijakan memperbaiki ekonomi rakyat tak lepas

dari upaya pengurangan jumlah kemiskinan. Pada masa tansisi ini, rakyat miskin menjadi pihak yang paling merasakan akibat kebnijakan pemerintah seperti kenaikan harga BBM yang menyebabkan inflasi tinggi. Program pemerintah bagi orang miskin masih kurang efektif akibat birokrasi yang kurang peka terhadap beban penderitaan rakyat, namun di sisi lain diakui distribusinya sudah lebih baik dan ada niat baik dari pemerintah.

Di masa transisi ini, kebijakan ekonomi pemerintah lebih mengharapkan adanya investasi dari luar yang akan mendatangkan devisa, modal serta memberi peluang kerja kepada rakyat. Sayangnya, iklim investasi di Indonesia saat ini masih kurang menarik dibanding negara Asia Tenggara lainnya. Dengan adanya kebijakan zakat, jelas akan membantu pemerintah. Pemerintah perlu juga didorong agar komisi zakat nasional bisa memberikan hasil yang signifikan bagi pengurangan angka kemisknan dan memberikan efek muliplier bagi ekonomi.

Menyikapi masa transisi yang panjang ini, kemiskinan harus mendapat perhatian. Upaya pemerintah keluar dari krisis masih didominasi dominannya konflik kepentingan sehingga kepentingan nasional tidak berada di depan. Inilah yang menyebabkan berlarutnya masa transisi.

Sebagian orang meyakini bahwa demokrasi dapat mengurangi bahkan memberantas kemiskinan. Namun di Indonesia, demokrasi yang kian mekar belum menunjukkan ke arah tersebut, bahkan timbul berbagai paradoks. Vietnam yang komunis, perekonomiannya mampu menunjukkan kinerja yang lebih baik. Namun demikian, pilihan terhadap demokrasi yang sudah terlaksanan jangan sampai menghambat usaha-usaha pengoptimalan zakat. Bahkan sebaliknya, momentum demokratisasi harus mampu menjadi alat mengintensifkan pengurusan zakat dan permasalahannya.

Para pemimpin umat mesti menyikapi masa transisi ini dengan memberi perhatian yang besar kepada masalah kemiskinan. Masa transisi yang panjang yang diwarnai konflik kepentingan akan menjauhkan perhatian kepada masalah kemiskinan. Para pemimpin umat dapat memanfaatkan momentum demokrasi sebagai upaya pemihakan kepada rakyat miskin yang tidak hanya bertambah jumlahnya, akan tetapi semakin sulit memenuhi kebutuhan primernya.

Menyikapi masa transisi yang panjang hendaknya dengan mencari solusi yang bisa dimanfaatkan, disamping mengkritisi kebijakan ekonomi yang kadang jauh dari keberpihakan terhadap kesejahteraan rakyat. Masa transisi yang panjang perlu

disikapi dengan melihat kebijakan ekonomi apa yang bisa mengeluarkan rakyat dari jebakan masa transisi. Jebakan transisi menumbuhkembangkan birokrasi yang kurang peka terhadap kesulitan ekonomi rakyat.

Ketidak jelasan sistem politik-ekonomi Indonesia dalam masa transisi merupakan kelemahan Indonesia dalam menghadapi perkembangan dunia saat ini.Jika ditanya apa sistem politik-ekonomi Indonesia, orang menjawab bukan marksis, bukan sosialis, bukan ini dan bukan itu.Sistem politik dan ekonomi Indonesia selama ini tidak jelas karena terus berubah di setiap pergantian pemimpin.Hal inilah yang menurutnya membuat perkembangan ekonomi Indonesia tidak bisa berkembang cepat. Sementara negara lain sedang sibuk mengembangkan ilmu pengetahuannya, Indonesia justru terus mengalami perubahan sistem politik dan ekonomi yang terus berubah di tiap pemerintahan.

Kondisi perekonomian Indonesia saat ini dalam masa transisi lantaran terpengaruh Trump Effect. Perekonomian global dan Indonesia, masih menunggu pergerakan dari kebijakan Presiden Donald Trump dimana melakukan kebijakan seperti yang dikatakan saat kampanye yakni menggenjot ekonomi domestik dengan membesarkan anggatan Pemerintah AS dengan tambahan utang, menurunkan pajak dan menambah utang, maka bunga surat utang AS meningkat. Orang akan melihat dolar menjadi menarik. Di lain pihak, Trump saat kampanye yang mengatakan ekspor negara berkembang masuk ke AS harus diproteksi, mengkritik Tiongkok, dan lainnya, bisa mengakibatkan ekspor negara berkembang turun. Bank Indonesia optimistis 2017 merupakan periode yang lebih baik dari 2016 meskipun ada Trump Effect. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2016 diperkirakan pada tataran 5,0% dan pada 2017 optimistis 5,0 % hingga 5,4% atau titik tengah 5,2%, sikap kita sebagai bagian dari warga negara negri ini adalah mensikapinya dengan optimisme.

.

BAB 6
MASALAH UTAMA DALAM PEMBANGUNAN

A. PERMASALAHAN POKOK PEMBANGUNAN EKONOMI

Studi pembangunan pada prinsipnya menggarap sungguh-sungguh terhadap masalah yang dihadapi oleh Negara-negara yang sedang berkembang.Masalahnya terletak pada hasil pembangunan masa lampau, di mana strategi pembangunan ekonomi yang menitik beratkan secara pembangunan dalam arti pertumbuhan ekonomi yang pesat, ternyata menghadapi kekecewaan.Banyak Negara dunia ketiga yang sudah mengalami pertumbuhan ekonomi, tapi sedikit sekali manfaatnya terutama dalam mengatasi kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan dalam distribusi pendapatannya.

Ketimpangan dan ketidakmerataan serta pengangguran tidak hanya dalam kontek nasional, tetapi dalam konteks internasional yang memandang Negara-negara yang sedang berkembang sebagai bagian peningkatan interpedensi (saling ketergantungan) yang sangat timpang dalam system ekonomi dunia.Di Negara maju titik berat strategi pembangunan nampaknya ditekan untuk mengalihkan pertumbuhan menuju kepada usaha-usaha yang menyangkut kualitas hidup.Usaha-usaha tersebut dimanifestasikan secara prinsip dalam perubahan keadaan lingkungan hidup.Adapun permasalahan pokok pembangunan di negara berkembnag saat ini (Todaro,2004) antara lain,***Pertama*** adalah Pengangguran,Pertumbuhan penduduk di negara berkembang lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan lapangan pekerjaan.Masalah pengangguran adalah salah satu masalah utama yang terjadi dalam pembangunan ekonomi negara berkembang.Negara berkembang, sebagai contoh Negara Indonesia adalah negara agraris yang kini tengah mengalami suatu masa transisi atau peralihan.Dari negara agraris menjadi negara industri.Tenaga kerja yang tersedia tentu saja ada di sektor agraris, sementara yang dibutuhkan adalah orang-orang yang mempunyai kompetensi atau kemampuan di sektor industri.Karena keterbatasan SDM yang berkompeten di sektor industri, maka menimbulkan banyaknya pengangguran.Dalam rangka meningkatkan keahlian yang dimiliki dan mengembangkan bakat, maka pemerintah pun melakukan pelatihan tenaga kerja supaya mereka memiliki keterampilan sesuai dengan lapangan pekerjaan yang

tersedia.Pelatihan ini dilakukan oleh BLK atau Balai Latihan Kerja.***Kedua*** yakni kemiskinan yang merupakan salah satu masalah yang menjadi perhatian serius pemerintah.Tentu saja ukuran kemiskinan suatu negara berbeda-beda. Seseorang atau sekelompok masyarakat dikatakan miskin apabila mereka tidak mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari dengan layak, kurang pangan dan sandang, serta tidak mempunyai tempat tinggal yang pantas huni (contohnya : tinggal di kolong jembatan, rumah kardus, dan sebagainya).Di Indonesia sendiri, pemerintah telah melakukan segala upaya untuk menurunkan jumlah penduduk miskin, salah satu yang pernah dilakukan adalah adanya subsidi silang, yang ***Ketiga*** adalah masyarakatnya yang masih terbelakang.Terbelakang di sini artinya tidak memiliki kesadaran dalam memelihara fasilitas umum, tingkat disiplin rendah, dan lain-lain. Dalam mengatasi masalah keterbelakangan ini Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan mutu pendidikan nasional, meningkatkan alokasi dana pendidikan di APBN dari tahun ke tahun. Hal ini bertujuan untuk membantu sekolah-sekolah di Indonesia yang mengalami kerusakan dan kekurangan sarana prasarana, menambah buku-buku pelajaran yang masih kurang, Adapun selanjutnya yakni ***Keempat***, Kekurangan modal dimana hampir semua negara berkembang memiliki masalah pembangunan ekonomi yang sama yaitu kekurangan modal.Kurangnya modal berdampak pada terhambatnya percepatan pembangunan.Dalam mengatasi masalah yang satu ini pemerintah terus berupaya untuk menarik investor baik dari dalam maupun luar negeri.Dengan naiknya investasi maka diharapkan tabungan pemerintah akan bertambah.***Kelima***, Kota besar selama ini menjadi pusat perekonomian, terutama kota-kota besar yang ada di Pulau Jawa.Hal ini menyebabkan pendapatan yang tidak merata.Padahal daerah memiliki potensi ekonomi yang luar biasa.Akan tetapi kini kesenjangan pembangunan yang terjadi antara perkotaan dan daerah sudah berangsur kurang, hal ini disebabkan adanya undang-undang otonomi daerah. Di mana daerah bebas mengembangkan potensi seluas-luasnya tanpa ada lagi campur tangan yang dominan dari pemerintah pusat, dengan kata lain terdapat ketidakmerataan pembangunan.

Pada prinsipnya problema-problema kemiskinan dan distribusi pendapatan menjadi sama-sama penting dalam pembangunan Negara tersebut.Penghapusan kemiskinan yang meluas dan pertumbuhan ketimpangan pendapatan merupakan pusat dari semua problema pembangunan yang banyak mempengaruhi strategi dan tujuan pembangunan.Oleh karena itu ahli ekonomi mengemukakan bahwa untuk perbaikan jurang pendapatan nasional hanya mungkin bila strategi pembangunan mengutamakan apa yang disebut keperluan mutlak, syarat minimum untuk memenuhi kebutuhan pokok, serta yang dinamakan kebutuhan

dasar.Hingga saat ini, pandangan banyak ahli ekonomi pembangunan terhadap pembangunan ekonomi masih diwarnai oleh dikotomi antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan.Masih adanya kontroversi antara mana yang lebih dahulu untuk dilakukan dan dicapai, pertumbuhan ekonomi atau pemerataan pembangunan.Kontroversi tersebut muncul disebabkan karena penerapan strategi pembangunan ekonomi yang mengacu pada pertumbuhan (growth) dan pemerataan (equity) belum menunjukkan hasil yang memuaskan.Istilah pembangunan seringkali digunakan dalam hal yang sama dengan pengembangan.Sehingga istilah pembangunan dan pengembangan (development) dapat saling dipertukarkan.Namun berbagai kalangan di Indonesia cenderung menggunakan secara khusus istilah pengembangan untuk beberapa hal yang spesifik.Meski demikian, sebenarnya secara umum kedua istilah tersebut diartikan secara tidak berbeda untuk proses-proses yang selama ini secara universal dimaksudkan sebagai pembangunan atau development (Rustiadi, 2006). Ada yang berpendapat bahwa kata "pengembangan" lebih menekankan proses meningkatkan dan memperluas. Dalam pengertian bahwa pengembangan adalah melakukan sesuatu yang tidak dari "nol", atau tidak membuat sesuatu yang sebelumnya tidak ada, melainkan melakukan sesuatu yang sebenarnya sudah ada tapi kualitas dan kuantitasnya ditingkatkan atau diperluas.

Sumitro (1994) mendefinisikan pembangunan sebagai "suatu transformasi dalam arti perubahan struktur ekonomi.Perubahan struktur ekonomi diartikan sebagai perubahan dalam struktur ekonomi masyarakat yang meliputi perubahan pada perimbangan keadaan yang melekat pada landasan kegiatan ekonomi dan bentuk susunan ekonomi.Menurut penulis, pemahaman Sumitro ini terkait dengan pandangan Arthur Lewis (1954) tentang pentingnya transformasi struktur ekonomi pertanian ke struktur ekonomi industri dalam upaya menuju pertumbuhan (dalam aspek ini pengertian pertumbuhan asosiatif dengan pembangunan) ekonomi.Dalam pada itu, Budiman (1995) membagi teori pembangunan ke dalam tiga kategori besar yaitu teori modernisasi, dependensi dan pasca-dependensi. Teori modernisasi menekankan pada faktor manusia dan budayanya yang dinilai sebagai elemen fundamental dalam proses pembangunan.

Di lain sisi,Kartasasmita (1996) menyatakan,pembangunan adalah usaha meningkatkan harkat martabat masyarakat yang dalam kondisinya tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.Membangun masyarakat berarti memampukan atau memandirikan mereka.Menurut Tjokrowinoto (1997), batasan pembangunan yang nampaknya bebas dari kaitan tata nilai tersebut dalam realitasnya menimbulkan interpretasi-interpretasi yang

seringkali secara diametrik bertentangan satu sama lain sehingga mudah menimbulkan kesan bahwa realitas pembangunan pada hakikatnya merupakan self project reality. Secara filosofis, suatu proses pembangunan dapat diartikan sebagai upaya yang sistematik dan berkesinambungan untuk menciptakan keadaan yang dapat menyediakan berbagai alternatif yang sah bagi pencapaian aspirasi setiap warga yang paling humanistik (Rustiadi, 2006).Di lain sisi, UNDP mendefinisikan pembangunan dan khususnya pembangunan manusia sebagai suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk (a process of enlarging people's choices) (dalam Rustiadi, 2006). Dalam konsep tersebut, penduduk ditempatkan sebagai tujuan akhir (the ultimate end), bukan alat, cara atau instrumen pembangunan sebagaimana dilihat oleh model formasi modal manusia (human capital formation) sedangkan upaya pembangunan dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan itu.

Pembangunan yang dijalankan di Indonesia sejak tahun 1970-an hingga sekarang masih cenderung fokus pada pembangunan ekonomi,bahkan pada pertumbuhan ekonomi yang cenderung jangka pendek.Sehingga masalah keberlanjutan belum menjadi prioritas utama.Oleh karena itu tidak mengherankan jika pertumbuhan ekonomi pun kualitasnya semakin memburuk.Apalagi dengan keterbatasan APBN dan sumber daya yang kita miliki, sehingga tidak mengherankan apabila pengambil kebijakan lebih memilih jalan pintas, yang cepat kelihatan hasilnya, kurang memperhatikan keberlanjutannya.Padahal pembangunan berkelanjutan sudah menjadi tuntutan bagi pengambil kebijakan pembangunan dalam bumi yang semakin rusak ini.Namun demikian lingkungan hidup tidak mendapatkan banyak perhatian sejak lama baik pada skala global, regional ataupun negara.Apalagi negara sedang berkembang yang tengah banyak menghadapi permasalahan ekonomi seperti Indonesia.Sehingga degadrasi lingkungan telah banyak menurunkan kualitas hidup masyarakat, khususnya di negara sedang berkembang seperti Indonesia.Oleh karena itulah masyarakat dunia sejak tahun 1970-an mulai memberikan perhatian yang besar pada masalah lingkungan,dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan. Hal itu dapat dilihat diantaranya dari Stockholm Conference (1972), Agenda 21 di Rio Earth Summit (1992), dan Johannesburg Declaration (2002).Meski komitmen dan perhatian besar telah diberikan pada tingkat internasional, namun kondisi lingkungan hidup masih saja memburuk. Kita sekarang masih hidup dalam kondisi yang dapat merusak lingkungan hidup semakin parah, sehingga akan membahayakan kehidupan umat manusia pada masa mendatang.Oleh karena itulah usaha untuk menjaga lingkungan hidup agar pembangunan dapat berkelanjutan sehingga kepentingan kehidupan generasi yang akan datang terproteksi,menjadi semakin penting untuk

diperjuangkan.Dengan demikian perlu adanya jaminan agar supaya dalam memenuhi kebutuhan sekarang kita tidak akan mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya.

Dalam perkembangannya disadari bahwa pembangunan berkelanjutan tidak hanya terkait dengan aspek lingkungan hidup, namun juga pembangunan ekonomi dan sosial yang dikenal dengan the living triangle.Tidaklah mungkin lingkungan dapat dijaga dengan baik bila kondisi sosial dan ekonomi masyarakat buruk.Oleh karena itulah dalam rangka melestarikan lingkungan hidup kita secara berkelanjutan, pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan juga perlu dilakukan.Tidaklah mungkin masyarakat yang untuk hidup saja sulit akan dapat menjaga lingkungannya dengan baik.Perhatian dan komitmen yang besar masyarakat internasional pada pembangunan berkelanjutan khususnya dari negera maju dalam beberapa conference adalah cukup besar.Namun demikian dalam implementasinya ternyata jauh dari harapan. Dapat dilihat bahwa Official Development Assistance (ODA) yang diberikan negara maju rata-rata hanya sebesar 0,27% dari PDB mereka pada tahun 1995, turun dari 0,34% pada tahun 1992. Pada tahun 2000 didapati hanya 4 negara yang menandatangi komitmen ODA memenuhi komitmennya.Hal ini mencerminkan bahwa pembangunan berkelanjutan pada tingkat globalpun seringkali hanya menjadi retorika politik belaka.Sehingga tidaklah mengherankan bahwa upaya pembangunan berkelanjutan tidak mudah diimplementasikan (Cooper & Vargas, 2004).

Rendahnya komitmen negara maju dalam memenuhi komitmennya dalam kerangka pembangunan yang berkelanjutan tentu saja tidak dapat dipisahkan dengan rendahnya kepentingan negara maju untuk mendukung pembangunan berkelanjuitan global.Hal ini tentu saja erat kaitannya dengan kalahnya prioritas menjaga lingkungan dengan masalah aktual seperti meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi taupun menjaga agar dunia usaha dari negaranya yang banyak diwakili oleh TNCs (perusahaan transnational) terus berkembang dalam pasar global. Tingginya nilai politis dari kepentingan ekonomi jangka pendek tersebut memang akan mudah membuat politisi baik dari negara maju ataupun sedang berkembang akan mengedepankan kepentingan jangka pendek. Selain itu jangan lupa bahwa bargaining power dari bisnis raksasa di negara maju tentu saja juga besar sekali, sehingga akan mampu mendistorsi keputusan yang diambil oleh pejabat publik, dapat mengalahkan kepentingan publik dalam jangka panjang. Hal yang sama juga terjadi di negara kita, dimana seringkali pengambilan keputusan dibengkokan oleh kepentingan pemodal yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan. Sehingga tidaklah mengherankan jika World Trade Organization

(WTO) yang menawarkan liberalisasi serta akses pasar yang lebih luas, serta kadang menawarkan solusi yang lebih menarik/menguntungkan terhadap berbagai isu yang sama (terkait dengan isu pembangunan berkelanjutan) dapat menjadi salah satu outlet bagi mereka.Oleh karena itulah dapat dipahami jika WTO berkembang pesat akhir-¬akhir ini.Sementara pembangunan berkelanjutan semakin tenggelam ditengah-tengah berbagai kemelut ekonomi yang dihadapi oleh banyak negara, khususnya negara Selatan.

Prinsip-prinsip ekonomi yang menekankan pada efisiensi ekonomi dengan maximizing benefit dan minimizing cost dari sudut pandang teori ekonomi memang sangat rasional. Sehingga dengan ekonomi yang semakin liberal ekonomi pada akhirnya banyak dikuasai oleh perusahaan transnational (TNCs) yang banyak beroperasi di negara sedang berkembang, baik untuk mendapatkan input khususnya sumber daya alam, maupun tenaga kerja murah, ataupun untuk memperluas pasar produk mereka.Sedangkan bagi negara sedang berkembang, globalisasi yang menjadikan masyarakatnya menjadi konsumen dari TNCs, juga menggunakan globalisasi untuk memperluas pasarnya, meskipun biasanya untuk produk primer ataupun sekunder dengan tingkat teknologi yang rendah.Sehingga banyak negara sedang berkembang yang terjerat utang ataupun masih harus berkubang dengan kemiskinan yang kronis. Bahkan Stiglitz dalam bukunya Globalization and Its Discontent (2002) mengatakan bahwa manfaat dari globalisasi lebih rendah dari klaim yang selama ini diyakininya, sebab harga yang harus dibayar juga mahal, karena lingkungan yang semakin rusak, demikian juga proses politik korup berkembang, dan cepatnya perubahan yang terjadi membuat masyarakat tidak dapat menyesuaikan budayanya.

Liberalisasi pasar yang semakin melibas perekonomian di banyak Negara juga telah menghambat pembangunan berkelanjutan.Martin Khor direktur dari Third World Network melihat bahwa lieberalisasi dan globalisasi yang menekankan pada "daya saing" telah menghambat pembangunan berkelanjutan sehingga merusak lingkungan.Liberalisasi dan globalisasi telah memperburuk lingkungan global karena tidak adanya aturan dan pengawasan pada TNCs di pasar global sehingga meningkatnya volume bisnis mereka meningkatkan kerusakan lingkungan.Padahal aktivitas TNCs telah banyak merusak lingkungan hidup (penghasil lebih dari 50% greenhouse gases).Demikian juga kebijakan yang liberal dan integrasi pasar telah mendorong peningkatan eksploitasi dari sumber daya alam seperti hutan dan kelautan sehingga mendorong kerusakkan lingkungan yang serius.Selain itu globalisasi mendorong ekplorasi sumber daya alam yang

melampau batas keberlangsungannya seperti air, tanah, dan mineral, telah banyak merusak lingkungan hidup.

Bagi negara seperti Indonesia, yang baru saja keluar dari krisis ekonomi, serta masih menghadapi banyak masalah ekonomi dan sosial yang berat, sehingga menghadapi proses globalisasi baik dalam kerangka ASEAN Free Trade Area (AFTA) tahun 2010, ASEAN Economic Community tahun 2015, Asia Pacific Economic Cooperation (APEC), dan WTO adalah tidak mudah.Oleh karena itu membangun kembali Indonesia tidaklah mudah pada saat ini.Apalagi membangun secara berkelanjutan ditengah-tengah pasar yang semakin liberal.

B. TANTANGAN INDONESIA

Potret pembangunan berkelanjutan di Indonesia tidak jauh berbeda dengan potret internasional, bahkan cenderung lebih buruk.Meskipun komitmen pemerintah nampaknya cukup besar sejak jaman Orde Baru, diantaranya dapat dilihat dengan keberadaan Kementrian Negara Lingkungan Hidup yang tentunya diikuti dengan kebijakan dan anggaran untuk melestarikan lingkungan hidup.Namun komitmen dan keberadaan kementrian yang menjaga lingkungan hidup pun ternyata tidak mencukupi.Dapat dilihat dari kerusakkan lingkungan hidup Indonesia yang masih saja berlanjut, sehingga bencana alam semakin banyak terjadi di tanah air kita yang tercinta ini.Laut, hutan dan lingkungan hidup lainnya pada umumnya semakin rusak.

Seperti sudah dibahas sebelumnya bahwa menjaga lingkungan tidaklah dapat berdiri sendiri.Pembangunan berkelanjutan dengan melestarikan lingkungan hanya akan berhasil jika dipadukan secara terintegral dengan pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. Oleh karena itulah perlu kebijakan yang terintegral dalam pembangunan lingkungan dengan pembangunan ekonomi dan sosial agar dapat memberikan hasil yang optimal. Meski demikian desain program yang baikpun belum menjamin keberhasilan pembangunan berkelanjutan.Banyak bukti menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan berkelanjutan seringkali terganjal oleh kurangnya implementasi yang baik.Secara prinsip pembangunan berkelanjutan sebenarnya harus terefleksi dalam cara berfikir,hidup, memerintah dan berbisnis dari seluruh masyarakat.Oleh karena itulah dalam kerangka mensukseskan pembangunan berkelanjutan banyak sekali aspek yang perlu dibenahi.

Kegagalan implementasi kebijakan, program ataupun proyek-proyek pada pembangunan berkelanjutan seringkali karena tidak mempertimbangkan berbagai

aspek yang perlu dilihat, baik dari sisi teknis, legal, fiskal, administrasi, politik, etik dan budaya (Cooper and Vargas, 2004).Pertanyaannya adalah apakah secara teknis suatu kebijakan fisibel erat kaitannya dengan apakah kita tahu apa yang perlu dilakukan, bagaimana caranya? Seringkali tantangannya disini adalah lebih pada masalah keberlanjutannya suatu kebijakan,dan apa yang dilakukan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.Dari sisi legal tentu saja erat kaitannya dengan apakah secara legal kebijakan ataupun program yang dilakukan tidak melanggar rambu¬rambu yang ada.Dalam hal ini tantangan yang dihadapi adalah bagaimana kita mendesain infrastruktur legal yang diperlukan untuk pembangunan berkelanjutan.Ataupun kasus yang hangat akhir-akhir ini terkait dengan masalah illegal logging dan penegakkan hukumnya yang dinilai tidak memihak pada lingkungan.Jelas ini merupakan salah satu masalah terbesar bangsa Indonesia.Sedangkan dari sisi fiskal, tantangan yang dihadapi diantaranya adalah bagaimana mendesain kebijakan yang ongkosnya minimal ditengah beban fiskal yang berat untuk membayar hutang.Oleh karena itu dana untuk melaksanakan program pembangunan terbatas, sehingga perlu terobosan agar supaya secara fiskal baik dari sisi penerimaan dan pengeluaran dapat mendukung pembangunan berkelanjutan.Reformasi fiskal yang tengah kita gulirkan mestinya juga didasari oleh kepentingan melaksanakan pembangunan berkelanjutan.Adapun aspek administrasi erat kaitannya dengan kemampuan organisasi dan kemampuan manajerial untuk melaksanakan secara konsisten kebijakan yang ada.Dalam hal ini koordinasi baik secara horizontal ataupun vertikal, baik di pusat maupun daerah, ataupun antar pusat dan daerah, ataupun antar daerah, sangat krusial untuk dilakukan.Seringkali ego antar instansi dan juga antar pemerintah pusat dan daerah membuat koordinasi untuk melaksanakan kebijakan secara konsisten sulit untuk dilakukan.Aspek politik juga memegang peranan penting dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Selain political will untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan penting.Namun stabilitas politik juga memegang peranan penting dalam hal ini.Untuk itulah perlu pembangunan institusi dan juga perbaikkan pemerintahan untuk mensukseskan pembangunan berkelanjutan.Sedangkan aspek etika dan budaya juga memegang peranan penting dalam implementasi kebijakan pembangunan berkelanjutan.Itu semua menunjukkan bahwa mengimplementasikan kebijakan pembangunan berkelanjutan tidaklah mudah.Meski demikian tidak berarti tidak dapat dilakukan.

Pembangunan berkelanjutan tidaklah mudah dilakukan oleh negara yang masih menghadapi banyak masalah ekonomi seperti Indonesia.Beban hutang yang besar, kemiskinan dan pengangguran yang tinggi, serta stabilitas ekonomi yang rapuh serta pertumbuhan ekonomi yang berkualitas rendah membuat pemerintah

menghadapi tantangan besar dalam mengimplementasikan kebijakan ekonomi berkelanjutan.

Sementara itu kondisi keungan negara yang berat, hutang luar negeri yang besar, serta fundamental ekonomi yang masih rapuh, disertai dengan kualitas pertumbuhan ekonomi yang memburuk.Membuat Indonesia akan mudah terjebak memilih kebijakan ekonomi yang cenderung menguntungkan dalam jangka pendek.Khususnya dengan mengeksploitasi sumber daya alamnya, ataupun memberikan kelonggaran yang lebih besar pada kegiatan ekonomi yang berpotensi merusak lingkungan baik dari industrialis domestik ataupun asing. Pada gilirannya strategi ini harus memuat lima sasaran utama, yaitu:

(1) Dipenuhinnya kebutuhan sandang, pangan, dan perumahan serta peralatan sederhana dari berbagai kebutuhan yang secara luas dipandang perlu oleh masyarakat yang bersangkutan.
(2) Dibutuhkan kesempatan yang luas untuk memperoleh berbagai jasa public, pendidikan, kesehatan, pemukiman yang dilengkapi infrastruktur yang layakserta komunikasi dan lain-lain.
(3) Dijaminnya hak untuk memperoleh kesempatan kerja yang produktit(termasuk menciptakan kerja sndiri), yang memungkinkan adanya balas jasa yang setimpal untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
(4) Terbinanya prasarana yang memungkinkan produksi barang dan jasa, atau pedagang internasional untuk memperoleh keuntungan dengan kemampuan untuk menyisihkan tabungan untuk pembiayaan usaha-usaha selanjutnya, dan
(5) Menjamin partsipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaanproyek-proyek.

Akhirnya strategi ini perlu menggunakan sumber-sumber ekonomi baik dari dalam maupun dari luar (dalam bentuk bantuan luar negeri)terutama untuk pembangunan pedesaan danpertanian.

Dengan demikian tepat, apabila inti pokok sasaran pembangunan berkisar pada pemberantasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengisi kemerdekaan dalam bidang-bidang politik dengan pembangunan ekonomi dalam proses ini diwujudkan pembagian pendapatan secara adil dan merata dalam berbagai golongan masyarakat dalam ruang lingkup golongan Negara yang sedang berkembang itu sendiri, maupun antar Negara.Dengan mengusahakan secara konsisten maka sasaran kebijaksanaan itu akan tercapai secara nasional hingga Negara yang sedang berkembang berada dalam kedudukan yang makin kuat untuk memperjuangkan

tata ekonomi nasional baru.Pada akhirnya fenomena keterbelakangan haruslah ditinjau dari konteks nasionaldan internasional secara global.Kekuatan-kekuatan ekonomi, social, internal dan eksternal bertangg jawab terhadap kemiskinan dan ketidak adilan, prduktivitas yang rendah yang biasanya menjadi tanda atau karakteristik Negara sedang berkembang pada umumnya. Usaha pembangunan social ekonomi yang sukses akan memerlukan tidak hanya formalitas strategi yang te pat didalam dunia ketiga, tetapi jug suatu modifikasi tata ekonomi internasional baru yang sekarang untuk menjadikan lebih responsif terhadap kebutuhan pebangunan Negara-negara yang sedang berkembang atau Negara dunia ketiga.

Upaya untuk mencari solusi dari permasalahan diatas haruslah dari akar hingga ke daun sehingga baik permasalahan utama maupun permasalahan lainnya yang erat kaitannya dengan pembagunan ekonomi dapat segera diatasi oleh pemerintah bersama masyarakat secara sinergis.

BAB 7
STRATEGI PEMBANGUNAN

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program – program indiktif untuk mewujudkan visi dan misi.Strategi harus dijadikan sebagai satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan.Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran dapat dapat dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.Visi pembangunan ekonomi nasional Indonesia rentang waktu 20 tahun yakni mulai tahun 2005 sampai tahun 2025 adalah menjadikan Indonesia yang mandiri, adil, maju dan makmur.Bangsa mandiri adalah bangsa yang mampu mensejajarkan diri dengan bangsa lainnya yang telah maju menggunakan kemampuan dan kekuatan sendiri.Suatu negara dikatakan makin maju apabila sumber daya manusianya memiliki kepribadian bangsa, berakhlak mulia serta memiliki tingkat pendidikan yang tinggi.Bangsa yang adil adalah bangsa yang didalamnya tidak ada diskriminasi baik antar individu, kelompok maupun antar wilayah.Bangsa yang makmur adalah bangsa yang telah mampu memenuhi kebutuhannya dan mampu memberikan makna dan arti penting. Perencanaan pembangunan dapat dibedakan menjadi beberapa tingkatan, yakni: "rencana" yang terkait dengan ekonomi sebagai suatu keseluruhan dibagi dalam sector-sektor utama (perencanaan sektoral) dan dapat terjadi dalam wilayah-wilayah (perencanaan regional); dan "program" yang terkait dengan penentuan secara lebih detail yaitu berupa tujuan-tujuan khusus yang harus dicapai dalam berbagai sector atau wilayah; dan "proyek" merupakan komponen-komponen individual yang dapat bersama-sama menjadikan suatu program.

Perumusan setiap strategi pembangunan harus mempertimbangkan sejumlah kondisi dasar.Tahapan pengembangan jelas sangat penting artinya.Di negara-negara yang sangat miskin yang sangat bergantung kepada pertanian untuk mencukupi kebutuhan sendiri dengan ekonomi uang yang belum begitu berkembang/dikembangkan dan sumber-sumber alam atau keuangannya terbatas, kecil kemungkinan untuk dapat merumuskan rencana multisektoral yang kompleks.Sebaliknya bagi negara-negara yang kaya dan makmur dengan perdagangan yang berkembang baik ekonomi, pertanian dan pertambangan, mungkin dapat diharapkan untuk memulai perubahan pada industrialisasi dengan mengembangakan ketrampilan-ketrampilan serta sumbersumber yang diperlukan untuk realisasinya.(Dickenson, 1992).

Sehubungan dengan perumusan strategi pembangunan tersebut, maka perdebatan utama yang muncul,khususnya pada saat-saat awal perencanaan pembangunan berkisar pada persoalan apakah prioritas diberikan untuk pengembangan pertanian atau pengembangan industri.Untuk negara-negara yang bergantung pada pertanian tradisional yang dengan produktivitasnya rendah, haruskah prioritas diberikan untuk mengembangkan sektor industri modern yang efisien agar ekonominya menjadi dinamis dan bekenaan; atau haruskah pertanian diubah dahulu dan setelah berubah akan dapat menunjang proses industrialisasi. Dalam kaitan ini, Forbes (1986) mengemukakan, ilmu ekonomi yang muncul dalam tahun 1950-an dan tahun 1960-an pada dasarnya memusatkan perhaian pada kebutuhan untuk memindahkan negara-negara dengan basis pertanian yang rendah produktivitasnya ke basis industri yang tinggi produktivitasnya.Kemudian dijelaskan bahwa salah satu teori yang berusaha mewujudkan perpindahan/transisi ini secara efektif suatu pembangunan yang berangsur-angsur, non revolosioner yang didasarkan pada suatu keyakinan terhadap kemajuan, rasionalitas dan mekanisasi atau industrialisasi. Diantara contoh-contoh yang aling menonjol dari teori modernisasi difusionis ini adalah model "pusat pinggiran" *(core-periphery)* dari Pebrisch (1949) yang dikembangkan kemudian oleh Friedman (1969) menjadi "teori pembangunan regional"; konsep "kutup pertumbuhan" *(growth poles)* dari Perroyx (1950) dan "pusat pertumbuhan" *(growth centres)* dari Boudeville.Dilihat dari tingkat-tingkat pengembangan antara dua daerah yakni pedalaman serta daerah perkotaan antar kawasan dalam suatu negara, terdapat beberapa ketidak seimbangan atau banyak terjadi ketimpangan.Banyak perencanaan yang pada mulanya tidak bersifat keruangan dan tidak memperhitungkan lokasi pengembangan yang menjadi sasaran proyek. Tanpa penegendalian atau kepedulian pada aspek-aspek keruangan, proyek-proyek baru cenderung terletak di tempat-tempat atau wilayah-wilayah yang paling menarik dan banyak menguntungkan.Keadaan ini akan meningkatkan atau mengintensifkan pola *inti-pinggiran (core-periphery),* dalam suatu negara, sehingga keuntungan pembangunan cenderung terpusat pada suatu " wilayah " dari pada menyebar.

a. Konsep pusat pinggiran *(Core-periphery)*

Konsep pusat pinggiran ini pertama-tama dikemukakan pada tahun 1949 oleh pebrisch, seorang ahli ekonomi Amerika Latin.Tipe teori pembangunan ini mencoba memberikan gambaran dan menerangkan tentang perbedaan pembangunan *(development),* tetapi penekanannya dari aspek keruangan.Jadi konsep ini sesuai dengan kajian geografi yang juga melihat sesuatu dari segi keruangan. Perbedaan antara daerah pusat (C) dan daerah pinggiran (P)dapat dijumpai dalam beberapa skala: di dalam region, anatar regions dan anatara negara (pelabuhan dan daerah pendukungnya: kota dan desa;negara maju dan negara sedang berkembang).Dari konsep ini kemudian berkembang menjadi beberapa

pandangan teorits mengenai perbedaan pembangunan yaitu kemajuan anatara pusat dan pinggiran *(Core-periphery),*seperti teori polarisasi ekonomi dari Myrdal dan Hirscman, teori pembangunan regional dan Friedmann dan pandangan Marxist.Menurut Myrdal*"Core region"*adalah sebagai magnit yang dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi dengan sendirinya,karena adanya sebab-sebab kumulatif ke arah perkembangan*("Cumulative upward causation"):* seperti arus buruh dari pinggiran ke pusat (P ke C); tenaga trampil, modal dan barang-barang perdagangan yang secara spontan berkembang didalam ekonomi pasar bebas untuk menunjang pertumbuhan di suatu lokasi (wilayah) tertentu.

b. Konsep kutub-kutub pertumbuhan dan Pusat-pusat pertumbuhan *(Growth poles dan growth centres).*

Konsep kutub pertumbuhan diformulasikan oleh Perroux,seorang ahli ekonomi bangsa perancis pada tahun 1950.Kutub pertumbuhan adalah pusat-pusat dalam arti keruangan yang abstral,sebagai tempat kekuatan – kekuatan sentrifugal *(memencar)* dan kekuatan sentripetal tertarik kearah situ.Growth poles bukan kota atau wilayah,melainkan suatu kegiatan ekonomi yang dinamis (fima industri) dan hubungan kegiatan ekonomi yang dinamis demikian,tercipta didalam dan diantara sektor-sektor ekonomi.Sedangkan konsep pusat pertumbuhan dikemukakan oleh Boudeville, seorang ahli ekonomi Perancis.Ia menggunakan konsep kutub pertumbuhan yang sudah ada,dijadikan konsep keruangan yang kongkrit.Pusat pertumbuhan adalah sekumpulan (geografis) semua kegiatan.Pusat pertumbuhan adalah kota-kota atau wilayah perkotaan yang memiliki suatu industri *"propulsive"* yang komplek.*Propulsive industries adalah* industri yang mempunyai pengaruh besar (baik langsung maupun tidak langsung) terhadap semua kegiatan lainnya.

c. Strategi Pembangunan di Indonesia

1. Strategi Pertumbuhan,adapun inti dari konsep strategi yang pertama ini adalah:
   a. Strategi pembangunan ekonomi suatu negara akan terpusat pada upaya pembentukan modal,serta bagaimana menanamkannya secara seimbang,menyebar,terarah dan memusat,sehingga dapat menimbulkan efek pertumbuhan ekonomi.
   b. Selanjutnya bahwa pertumbuhan ekonomi akan dinikmati oleh golongan lemah melalui proses merambat ke bawah(trickle – down – effect) pendistribusian kembali.
   c. Jika terjadi ketimpangan atau ketidakmerataan hal tersebut merupakan syarat terciptanya pertumbuhan ekonomi.
   d. Kritik paling keras dari strategi yang pertama ini adalah bahwa pada kenyataan yang terjadi adalah ketimpangan yang semakin tajam.

2. Strategi pembangunan dengan pemerataan dimana inti dari konsep strategi ini adalah dengan ditekankannya peningkatan pembangunan melalui teknik sosial *engineering*, seperti halnya melalui penyusunan perencanaan induk, dan paket program terpadu.
3. Strategi ketergantungan, tidak sempurnanya konsep strategi pertama dan kedua mendorong para ahli ekonomi mencari alternatif lain sehingga pada tahun 1965 muncul strategi pembangunan dengan nama *strategi ketergantungan*. Inti dari konsep strategi tergantungan adalah kemiskinan di negara – negara berkembang lebih disebabkan karena adanya ketergantungan negara tersebut dari pihak / negara lainnya. teori ketergantungan ini kemudian dikritik oleh *Kothari* (…..) dengan mengatakan "Teori ketergantungan tersebut memang cukup relevan namun sayangnya telah mnjadi semacam dalih terhadap kenyataan dari kurangnya usaha untuk membangun masyarakat sendiri *(Self Development)*
4. Strategi yang berwawasan ruang, strategi ini dikemukakan oleh *Myrdall dan Hirschman*, yang mengemukakan sebab – sebab kurang mampunya daerah miskin berkembang secepat daerah yang lebih kaya / maju. Menurut mereka kurang mampunya daerah miskin berkembang secepat daerah maju dikarenakan kemampuan / pengaruh menyetor dari kaya ke miskin *(Spread Effects)* lebih kecil daripada terjadnya aliran sumber daya dari daerah miskin ke daerah kaya *(Back-wash-effects)*. Perbedaan pandangan kedua tokoh tersebut adalah, bahwa *Myrdall* tidak percaya bahwa keseimbangan daerah kaya dan miskin akan tercapai, sedangkan *Hirschman* dalam Sukirno (2000) percaya, sekalipun baru akan tercapai dalam jangka panjang.
5. Strategi Pendekatan kebutuhan pokok, sasaran dari strategi ini adalah menanggulangi kemiskinan secara masal. Strategi ini selanjutnya dikembangkan oleh *Organisasi Perburuhan Sedunia (ILO)* pada tahun 1975, dengan menekankan bahwa kebutuhan pokok manusia tidak mungkin dapat dipenuhi jika pembangunan ekonomi merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia. Kebijakan dan strategi pembangunan telah mengubah struktur ekonomi secara mengesankan dan mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.

   Sementara itu visi pembangunan Indonesia(Workshop RPJMN IPTEK 2010-2014)adalah sebaga berikut:
   1. Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila
   2. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing
   3. Mewujudkan Indonesia yang demokrasi dengan berlandaskan hokum
   4. Mewujudkan Indonesia yang aman , damai dan bersatu

5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan
6. Mewujudkan Indonesia yang asri dan lestari
7. Mewujudkan Indonesia sebagai negara kesatuan yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional
8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan bangsa didunia internasional

Strategi untuk melakukan visi dan misi tersebut dijabarkan secara bertahap dalam priode 5 tahunan atau RPJM (RENCANA PEMBANGUNAN JANGKAH MENENGAH) dengan skala prioritas dan strategi pembangunan pada priode – priode sebelumnya.Tahapan skala prioritas dan starategi RPJM dijelaskan secara ringkas sebagai berikut :

1. **RPJM ke– 1 (tahun 2005 – 2009)** diarahkan kembali untuk menata Indonesia di segala bidang yang ditunjukkan untuk menciptakan Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dan tingkat kesejahteraan raktyatnya meningkat.
2. **RPJM ke- 2 (tahun 2009 – 2014)** ditunjukkan lebih memantapkan pembangunan Indonesia disegala lini dengan penekanan lebih pada peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk dalam kemamuan iptek serta penguatan daya saing perekonomian.
3. **RPJM ke- 3 (tahun 2014 – 2019)** tujuannya adalah untuk lebih memantapkan pengembangan disegala bidang dengan penekanan pecapaian daya saing kompetitif perekonomian dengan berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta penguasaan iptek yang terus meningkat.
4. **RPJM ke- 4 (tahun 2020 – 2025)** ditujukan untuk meuwujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, adil, maju dan makmur melalui percepatan pembangunan diberbagai bidang dengan menekankan terbangunanya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang mempuni serta berdaya saing. Mengacu pada permasalahan dan tantangan yang sedang dihadapi Indonesia saat ini, maka arah kebijakan umum pembangunan adalah sebagai berikut :
   a. **Arah kebijakan umum untuk melanjutkan pembangunan mencapai Indonesia sejahtera.** Indonesia sejahtera tercermin dari peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dalam bentuk percepatan pembangunan ekonomi yang didukung oleh pengusaan ilmu pengetahuan serta teknologi, pengurangan kemisakinan, pengurangan tingkat pengangguran yang diwujudkan dengan bertumpuh pada

peningkatan kualitas sumber daya manusia., perbaikan infratruktur dasar, serta dengan menjaga kelestarian lingkungan secara bersinambung

b. **Arah kebijakan umum untuk memperkuat pilar –pilar demokrasi** dengan penguatan yang bersifat kelembagaan dan mengarah pada tegaknya ketertiban umum, penghapusan segala macam bentuk diskriminasi, pengakuan dan penerapan hak asasi manusia serta kebebasan yang bertanggungjawab.

c. **Arah kebijakan umum guna memperkuat dimensi umum keadilan dalam semua bidang** termasuk pengurangan kesenjangan pembangunan antar daerah (termasuk desa – kota) serta kesenjangan gender.Keadilan juga dapat diwujudkan bila sistem hukum berfungsi secara kridibel,bersih adil dan bebas pungli (pungutan liar) serta tidak pandang bulu.Demikian pula pemberantasan korupsi secara konsisten sangat diperlukan guna menciptakan pemerintaan yang bersih.

Strategi pembangunan untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah pada dasarnya diarahkan untuk (1) mendorong pertumbuhan wilayah-wilayah potensial di luar Jawa-Bali dan Sumatera dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa-Bali dan Sumatera; (2) meningkatkan keterkaitan antarwilayah melalui peningkatan perdagangan antarpulau untuk mendukung perekonomian domestik; dan (3) meningkatkan daya saing daerah melalui pengembangan sektor-sektor unggulan di tiap wilayah, (4) Mendorong percepatan pembangunan daerah tertinggal, kawasan strategis dan cepat tumbuh, kawasan perbatasan, kawasan terdepan, kawasan terluar dan daerah rawan bencana; serta (5) Mendorong pengembangan wilayah laut dan sektor-sektor kelautan.

Strategi dan arah kebijakan pengembangan di tiap wilayah mengacu pada strategi dan arah kebijakan yang berbasiskan perencanaan wilayah darat melalui Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan berbasiskan perencanaan wilayah laut melalui Arah Pengembangan Wilayah Laut.Selain itu, sesuai dengan arahan Presiden RI, strategi pembangunan juga mengacu pada paradigma Pembangunan untuk Semua (Development for All). Paradigma ini bertumpu pada 6 (enam) strategi diantaranya:

Pertama, strategi pembangunan inklusif yang mengutamakan keadilan, keseimbangan dan pemerataan. Semua pihak harus dan ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan melalui penciptaan iklim kerja untuk meningkatkan harkat hidup keluar dari kemiskinan. Seluruh kelompok masyarakat harus dapat merasakan dan menikmati hasil-hasil pembangunan terutama masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan, kawasan perdesaan, daerah pedalaman, daerah tertinggal dan

daerah pulau terdepan. Selain itu, pertumbuhan ekonomi harus dapat mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri; serta Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Pulau Terdepan dan daerah pasca konflik dan pasca bencana dengan pembangunan yang inklusif.

Kedua, strategi pembangunan berdimensi kewilayahan. Strategi pembangunan wilayah mempertimbangkan kondisi geografis, ketersediaan sumber daya alam, jaringan infrastruktur, kekuatan sosial budaya dan kapasitas sumber daya manusia menyebabkan yang tidak sama untuk setiap wilayah. Strategi pembangunan wilayah juga memperhitungkan basis daratan dan basis kepulauan atau maritim sebagai satu kesatuan ruang yang tidak terpisahkan. Oleh sebab itu, strategi pembangunan berdimesni kewilayahan memperhatikan tata ruang wilayah Pulau Sumatera, Pulau Jawa-Bali, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku dan Pulau Papua. Dengan strategi ini, kebijakan pembangunan diarahkan untuk mengoptimalkan potensi dan keunggulan daerah dan membangun keterkaitan antarwilayah yang solid termasuk mempercepat pembangunan pembangkit dan jaringan listrik, penyediaan air bersih, serta pengembangan jaringan transportasi (darat, laut dan udara) dan jaringan komunikasi untuk memperlancar arus barang dan jasa, penduduk, modal dan informasi antarwilayah.

Ketiga, strategi pembangunan yang mendorong integrasi sosial dan ekonomi antarwilayah secara baik. Dalam hal ini perhatian terhadap pengembangan pulau-pulau besar, kecil dan terdepan harus dilakukan dengan memperhatikan poteni daerah sebagai modal dasar yang dikelola secara terintegrasi dalam kerangka geoekonomi nasional yang solid dan kuat. Dengan kesatuan ekonomi nasional yang kuat untuk lima tahun mendatang, maka posisi tawar Indonesia dalam globalisasi percaturan perekonomian dunia, secara geo-ekonomi berada pada posisi yang lebih kuat, dan lebih berdaya saing. Kebijakan untuk memperkuat integrasi sosial dan ekonomi antarwilayah diarahkan pada pengembangan pusat-pusat produksi dan pusat-pusat perdagangan di seluruh wilayah terutama di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

Keempat, strategi pengembangan ekonomi lokal. Pengembangan ekonomi lokal menjadi penting dan mendesak sebagai upaya memperkuat daya saing perekonomian nasional. Para gubernur, bupati dan walikota mempunyai kewenangan yang luas dan peran dominan dalam pengembangan ekonomi lokal. Peran pemerintah dan pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan daerah pada intinya mempunyai arah sebagai berikut: (1) menciptakan suasana atau iklim usaha yang

memungkinkan potensi masyarakat berkembang; (2) meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja dan pasar; (3) mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, dan menciptakan kebersamaan dan kemitraan antara yang sudah maju dengan yang belum berkembang; (4) memperkuat kerjasama antardaerah; dan (5) membentuk jaring ekonomi yang berbasis pada kapasitas lokal dengan mengkaitkan peluang pasar yang ada di tingkat lokal, regional dan internasional; (6) mendorong kegiatan ekonomi bertumpu pada kelompok, termasuk pembangunan prasarana berbasis komunitas; dan (7) memperkuat keterkaitan produksi-pemasaran dan jaringan kerja usaha kecil-menengah dan besar yang mengutamakan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif daerah.

Kelima, strategi pembangunan disertai pemerataan (growth with equity) yang bertumpu pada keserasaian pertumbuhan ekonomi (pro-growth) dalam menciptakan kesempatan kerja (pro-jobs) dan mengurangi kemiskinan (pro-poor) yang tetap berdasarkan kelestarian alam (pro-environment). Kebijakan pembangunan diarahkan untuk memperkuat keterkaitan antarwilayah (domestic interconnectivity), membangun dan memperkuat rantai industri hulu hilir produk unggulan berbasis sumber daya lokal, mengembangkan pusat-pusat produksi dan perdagangan baik di Jawa-Bali maupun di luar wilayah Jawa Bali yang didukung dengan penyediaan prasarana dan sarana, peningkatan SDM, pusat-pusat penelitian, pembangkit listrik dan penyediaan air bersih; serta perbaikan pelayanan sesuai standar pelayanan minimal. Sejalan dengan arah kebijakan ini, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) merupakan salah satu dorong untuk menciptakan dan membangun pusat-pusat pertumbuhan dan perdagangan di seluruh wilayah.

Keenam, strategi pengembangan kualitas manusia. Orientasi pembangunan adalah peningkatan kualitas manusia (the quality life of the people) sebagai bagian dari penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat terutama pangan, pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, sanitasi dan air bersih, perumahan, sumber daya alam dan lingkungan, dan jaminan keamanan. Oleh sebab itu, kebijakan pembangunan akan diarahkan pada peningkatan akses dan mutu layanan dasar termasuk pangan, pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, sanitasi dan air bersih, perumahan, sumber daya alam dan lingkungan, dan jaminan keamanan terutama bagi masyarakat yang berada di daerah perdesaan, kawasan perbatasan, pulau-pula terluar dan daerah pasca konflik dan pasca bencana. Dengan meningkatnya kualitas manusia, kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat dan membaik secara merata di seluruh wilayah.

BAB 8
PEMBANGUNAN PERTANIAN DAN PERDESAAN

Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang termasuk dalam pertanian biasa dipahami orang sebagai budidaya tanaman atau bercocok tanam (bahasa Inggris: *crop cultivation*) serta pembesaran hewan ternak (*raising*), meskipun cakupannya dapat pula berupa pemanfaatan mikroorganisme dan bioenzim dalam pengolahan produk lanjutan, seperti pembuatan keju dan tempe, atau sekadar ekstraksi semata, seperti penangkapan ikan atau eksploitasi hutan dalam Eva (1995).Bagian terbesar penduduk dunia bermata pencaharian dalam bidang-bidang di lingkup pertanian, namun pertanian hanya menyumbang 4% dari PDB dunia.Sejarah Indonesia sejak masa kolonial sampai sekarang tidak dapat dipisahkan dari sektor pertanian dan perkebunan, karena sektor - sektor ini memiliki arti yang sangat penting dalam menentukan pembentukan berbagai realitas ekonomi dan sosial masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Berdasarkan data BPS tahun 2002, bidang pertanian di Indonesia menyediakan lapangan kerja bagi sekitar 44,3% penduduk meskipun hanya menyumbang sekitar 17,3% dari total pendapatan domestik bruto.

Secara umum pertanian yang ada di negara kita memiliki kelebihan-kelebihan yang patut menjadi motivasi untuk penguatan sektor riil,antara lain adalah:

1. **Memunculkan potensi yang dimiliki tiap-tiap daerah**
   Adanya pembangunan di enam koridor ekonomi akan menggali potensi-potensi yang dimiliki tiap-tiap koridor tersebut dan akan memaksimalkannya.Misal di pulau Sumatera akan memaksimalkan potensi sebagai sentra produksi dan pengolahan hasil bumi dan lumbung energi nasional.Begitu pula dengan pulau Kalimantan dapat memaksimalkan potensi sebagai pusat produksi dan pengolahan hasil tambang dan lumbung energi nasional, Papua-Maluku sebagai pengolahan sumber daya alam yang melimpah dan sumber daya manusia yang sejahtera, Bali-Nusa Tenggara sebagai pintu gerbang pariwisata dan pendukung pangan nasional, Jawa sebagai pendorong industri dan jasa Nasional, serta Pulau Sulawesi sebagai pusat produksi dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan nasional.

2. **Memperluas pertumbuhan dengan menghubungkan daerah tertinggal dengan pusat pertumbuhan**
   Dengan adanya pembangunan di enam koridor akan memperluas proses pertumbuhan di berbagai daerah.Pembangunan tidak hanya terjadi di pusat kota saja melainkan di seluruh kota termasuk daerah tertinggal. Dengan adanya pembangunan di enam koridor akan mempercepat dan memperluas pertumbuhan ekonomi dan menjadikan pembangunan yang merata di tiap-tiap daerah.
3. **Menghubungkan daerah terpencil dengan infrastruktur & pelayanan dasar dalam menyebarkan manfaat pembangunan secara luas**
   Pembangunan yang telah merata di tiap-tiap wilayah akan mempermudah pembangunan sarana infrastruktur yang baik.Seperti di daerah timur Indonesia yang sampai saat ini infrastruktur disana kurang memadai, nantinya dengan adanya pembangunan di enam koridor akan membawa dampak positif bagi daerah-daerah yang dulunya masih tertinggal sebagai contoh jalan raya yang baik, pemenuhan kebutuhan listrik, dan sarana prasarana yang lainnya.
4. **Memperluas lapangan kerja**
   Pembangunan di enam koridor ini akan mendatangkan banyak investor baik domestik maupun asing.Dengan begitu maka akan membuka lapangan kerja sehingga akan mengurangi jumlah pengangguran yang ada di Indonesia.
5. **Meningkatkan pendapatan daerah yang berujung pula pada meningkatnya pendapatan nasional**
   Karena tiap daerah dapat memaksimalkan potensi yang ada di wilayahnya, maka pendapatan daerah akan naik, apabila pendapatan daerah mengalami kenaikan, maka kenaikan juga akan terjadi pada pendapatan nasional.Dengan adanya MP3EI, pendapatan regional domestik bruto (PRDB) diperkirakan akan meningkat hingga empat kali lipat yakni dari US$555 miliar di tahun 2010 menjadi US$1,09 triliun di tahun 2015 dan US$2,16 triliun di tahun 2030.

Adapun kelemahan-kelemahannya yang perlu diamati dan dicari solusinya,antara lain adalah :

1. **Dapat mengakibatkan eksploitasi sumber daya alam**
   Dengan adanya pemaksimalan potensi di tiap-tiap wilayah maka yang akan terjadi adalah pemanfaatan sumber daya alam secara besar-besaran yang dalam artian bahwa akan terjadi eksploitasi alam karena tiap wilayah berlomba-lomba untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari potensi yang dimiliki.Akibatnya akan berdampak buruk bagi alam sekitar, misalnya eksploitasi hasil tambang, hal tersebut akan merusak daerah yang menjadi tempat galian tambang emas dan akan sulit untuk di perbaharui kembali seperti semula.

2. **Kalahnya investor domestik dengan inverstor asing**

Tidak menutup kemungkinan bahwa pembangunan di enam koridor ini akan mendatangkan investor-investor asing.Kita tahu bahwa sumber daya manusia yang di miliki indonesia masih agak kurang memadai untuk berdiri sendiri mengelola potensi-potensi alamnya.Seperi contoh di papua, pertambangan emas telah dikuasai investor asing untuk mengelolanya karena eterbatasan sumber daya manusia dan teknologi di Indonesia. Selain itu,Pemerintah daerah tentunya akan lebih senang jika proyek pembangunan dipegang oleh investor asing karena pasti investor asing akan berani membayar mahal untuk mendapatkan hasil alam misalnya bijih emas.Untuk itu perlu disiasati bagaimana agar investor domestik dapat bersaing dengan investor asing. Orientasi pembangunan seluruh sub sektor pada sektor pertanian saat ini diarahkan untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan bagi masyarakat, menghasilkan berbagai produk industri berbasis pertanian, membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, serta memperbaiki kondisi ekonomi dan lingkungan. Kekurangan bahan pangan, khususnya makanan pokok beras akan menimbulkan gejolak sosial ekonomi dan politik masyarakat, sehingga kemandirian pangan menjadi tantangan pembangunan pertanian di waktu yang akan datang. Dalam rencana strategis Kementerian Pertanian, sasaran utama Kementerian Pertanian dalam pembangunan pertanian nasional periode 2010-2014 adalah pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan dengan fokus utama pada lima komoditas unggulan nasional, yaitu (a) padi, (b) jagung, (c) kedelai, (d) gula, dan (e) daging sapi (Renstra Kementerian Pertanian, 2010). Dalam lima tahun terakhir ini, Kementerian Pertanian telah berupaya keras untuk mempercepat peningkatan produksi komoditas diatas.Namun demikian, harus diakui bahwa dalam pelaksanaan di lapangan, banyak tantangan yang harus dilalui dan tidak semua target dapat dicapai (Kementerian Pertanian, 2010).Berbagai masalah yang bersifat multidimensional yang dihadapi untuk memenuhi permintaan berbagai komoditas pertanian harus dicermati dan disikapi dengan beragam kebijakan peningkatan produksi.Masalah pertama adalah penurunan kualitas dan kuantitas sumber daya lahan pertanian.Kedua, terbatasnya aspek ketersediaan infrastruktur penunjang pertanian yang juga penting namun minim ialah pembangunan dan pengembangan waduk.Selanjutnya, masalah ketiga adalah lemahnya sistem alih teknologi.Ciri utama pertanian modern adalah produktivitas, efisiensi, mutu dan kontinuitas pasokan yang selalu meningkat dan terpelihara secara terus menerus.Keempat adalah muncul dari terbatasnya akses layanan usaha, khususnya dalam ketersediaan modal kerja.Kemampuan petani untuk membiayai usaha taninya sangat terbatas, sehingga produktivitas yang dicapai masih di bawah produktivitas potensial. Mengingat keterbatasan petani dalam permodalan

tersebut dan endahnya aksesibilitas terhadap sumber permodalan formal, maka dilakukan pengembangkan dan mempertahankan beberapa penyerapan input produksi biaya rendah yangg sudah berjalan tingkat petani.Selain itu, penanganan pasca panen dan pemberian kredit lunak serta bantuan langsung kepada Reformasi Kebijakan Menuju Transformasi Pembangunan Pertanian.Para petani sebagai pembiayaan usaha tani cakupannya diperluas. Pemerintah telah menyediakan anggaran yang sangat besar untuk bisa diserap melalui tim Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Bank BRI khusus Kredit Bidang Pangan dan Energi.Masalah kelima adalah masih panjangnya mata rantai tata niaga pertanian, sehingga menyebabkan petani tidak dapat menikmati harga yang lebih baik, karena pedagang telah mengambil untung terlalu besar dari hasil penjualan (Nugrayasa, 2012).Beberapa tahun terakhir ini, sektor pertanian juga dihadapkan pada tantangan yang semakin berat, tetapi sekaligus merupakan peluang dalam kaitan anomali iklim.Dalam hal ini Iklim ekstrim yang sulit diprediksi menjadi penghalang bagi kegiatan pengembangan usaha pertanian, khususnya usahatani padi. Berbagai jenis tanaman budidaya sulit diharapkan dapat berproduksi secara optimal, sehingga petani dihadapkan pada risiko kerusakan tanaman yang berujung pada kerugian.Namun di tengah tantangan itu, terbuka peluang mengoptimalkan berbagai potensi yang tersedia guna meningkatkan produksi berbagai produk pertanian Melalui sosialisasi penerapan teknologi budidaya terhadap perubahan iklim, perbaikan infrastruktur pertanian, perluasan areal pertanaman, sistem irigasi yang efisien, dan manajemen usahatani yang lebih baik, peluang meningkatkan produksi eberapa komoditas pertanian sangat terbuka.Hal inilah yang memberi keyakinan bahwa terdapat tantangan berat perubahan iklim global, produksi beras, misalnya diharapkan dapat meningkat. Sementara itu, pada waktu yang akan datang produksi bebagai komoditas bernilai ekonomi tinggi lainnya, seperti jagung, kedele, bahkan gula maupun daging sapi diharapkan dapat meningkat mencapai target peningkatan produksi yang direncanakan.Dengan semua permasalahan yang semakin kompleks untuk menyediakan bahan pangan dan hasil pertanian untuk industri lainnya, diperlukan upaya mengefektifkan setiap kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan pertanian baik oleh pemerintah, khususnya untuk meningkatkan kapasitas produksi padi/beras secara nasional, maupun oleh pihak-pihak terkait lainnya. Pembiayaan yang bersumber dari APBN akan semakin terbatas mengingat banyaknya kebijakan dan program pembangunan di erbagai sektor.Dalam konteks inilah skema pembiayaan untuk mendukung pembangunan sektor pertanian dan sekaligus menguatkan kelembagaan pertanian di perdesaan perlu dirumuskan dengan baik.

Kementerian Pertanian terus berupaya meningkatkan kinerja melalui peningkatan layanan berkualitas dan pemanfaatan sumberdaya secara optimal.Kementerian Pertanian diharapkan mampu mengimplementasikan fungsi-fungsi fasilitasi, regulasi, dan promosi dan proteksi dengan efektif serta mampu menarik serta mendorong peran para pemangku kepentingan lainnya secara optimal. Saat ini sangat diperlukan cara mencapai tingkat produksi dan produktivitas berbagai komoditas pertanian agar mampu bersaing secara global ditengah pengaruh perubahan iklim, keadaan ekonomi dan politik yang kurang menguntungkan, tingginya tingkat pengangguran, meningkatnya kemiskinan, dan melonjaknya harga-harga pangan di dunia yang berpengaruh terhadap posisi tawar masyarakat.Bagi petani (yang lemah dalam banyak aspek), sumber-sumber pembiayaan dan kegiatan pemanfaatan dana.

3. **Kebijakan untuk sektor pertanian dan pembiayaan pedesaan**

   Peran Pembiayaan dalam Pembangunan Pertanian Menjamin bahwa petani menerima kredit yang cukup menjadi tantangan serius bagi semua pemerintahan di dunia.Jumlah kredit yang tersedia untuk sektor pertanian telah menurun dalam dua dekade terakhir dibanyak negara berkembang.Reformasi pasar dan Swastanisasi belum cukup menghasilkan perbaikan dalam mendukung pembangunan sektor pertanian.Kredit Pertanian dan Tabungan Perdesaan Sektor pertanian baik yang labor intensif maupun kapital intensif memiliki tingkat pengembalian yang rendah dibanding sektor industri.Investasi modal sangat langka di sektor pertanian.Berdasarkan pandangan tradisional, pertumbuhan ekonomi harus didasarkan pada industrialisasi, sektor pertanian kurang menguntungkan untuk investasi.Tapi bukti empiris tidak menyatakan demikian.Sebagian besar petani meminjam modal di pasar keuangan informal dengan membayar tingkat bunga yang sangat tinggi.Rendahnya investasi sumber daya manusia di perdesaan menyebabkan rendahnya tingkat pengembalian investasi modal.Melalui kebijakan dan program yang tepat untuk memperbaiki alokasi modal di perdesaan, akan diperoleh tingkat pengembalian investasi modal yang lebih tinggi.

   Banyak petani di Indonesia, utamanya petani tanaman pangan, tidak mampu memperoleh kredit baru bersubsidi dan berbunga lunak ini,karena mereka masih tercantum dananya di dalam dari Bank Indonesia.Di sisi lain, daya serap penyaluran kredit bersubsidi ini di sektor pertanian masih cukup rendah.Misalnya, lebih dari 60 % KUR disalurkan bukan kepada petani atau sektor pertanian, tetapi kepada pedagang komoditas, penyedia jasa, pengecer dan sebagainya. Bahwa petani dan sektor pertanian memerlukan pembiayaan dari sektor perbankan dan lembaga keuangan lain tentu tidak terbantahkan.Sekian macam skema

pembiayaan pertanian telah dicobakan sepanjang sejarah modern pembangunan ekonomi Indonesia, baik melalui subsidi bunga seperti kredit program, maupun melalui kredit komersial tapi terkawal secara baik. Kisah keberhasilan Program Bimbingan Massal (Bimas), Intensifikasi Massal (Inmas), Intensifikasi Khusus (Insus) dan lain-lain dalam meningkatkan produksi dan produktivitas pangan pada era Orde Baru tentu tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan akses pembiayaan murah dan bersubsidi yang diberikan kepada petani tanaman pangan, khususnya padi.Sebagian lagi, kredit program itu juga disalurkan dalam bentuk natura dan/atau yang terpaket dengan program peningkatan produksi pangan dan pertanian umumnya. Menariknya lagi di lapangan, kredit program yang disebutkan di atas bahkan masih dapat "hidup berdampingan" dengan skema pembiayaan non-formal yang diberikan oleh peminjam uang tingkat desa (rentenir), yang tersebar di beberapa desa di Indonesia. Para pedagang pengumpul juga masih dengan leluasa memberikan pinjaman modal kepada petani untuk membeli sarana produksi pertanian, seperti benih, pupuk, pestisida, sampai pada modal kerja lain. Kredit program di sektor pertanian dengan bunga rendah ini sempat terlupakan dari hiruk-pikuk pola pembangunan yang bertumpu pada industrialisasi rapuh, yang hanya mengandalkan konglomerasi dan penguasaan aset secara tidak terkontrol, serta pola pembiayaan kepada kelompok usahanya sendiri.Prinsip-prinsip kehatihatian perbankan (prudential banking) nyaris tidak diperhatikan, sehingga terdapat kesenjangan yang signifikan dalam pembiayaan aktivitas ekonomi riil masyarakat.

Di satu sisi, terdapat akses pembiayan yang nyaris tidak terbatas bagi mereka yang memiliki kedekatan bisnis tertentu dengan sektor perbankan.Di sisi lain, bagi sektor ekonomi yang tidak memiliki kedekatan bisnis tertentu dengan perbankan, akses pembiayaan itu nyaris hanya berada di atas kertas.Semua paham bahwa pola yang terakhir inilah yang menjadi cikalbakal krisis ganda di sektor keuangan dan perbankan serta krisis nilai tukar, yang akhirnya menjadi krisis ekonomi dan politik yang mewarnai pergantian rezim di Indonesia.

Adapun program kebijakan- kebijakan pemerintah dalam sektor ini antara lain adalah:

A. KUT (Kredit Usaha Tani)

Pada awal era Reformasi, pemerintah mencoba menghidupkan kembali kredit program bagi sektor pertanian dengan meluncurkan Kredit Usahatani (KUT).Program perumusan KUT ini sebenarnya jauh lebih seru dan dahsyat

mengingat tarik-menarik kepentingan dan afiliasi politik karena Indonesia sedang fokus pada penyehatan perbankan, lembaga keuangan dan pemulihan perekonomian secara umum. Program KUT diberikan pemerintah pada 1998-1999 senilai Rp 7 triliun, untuk menanggulangi krisis ekonomi dan memberikan suntikan permodalan kepada sektor pertanian, yang mulai terimbas penurunan daya beli yang sangat signifikan.Benar, bahwa sektor pertanian sempat menikmati keuntungan sesaat (windfall profit) karena nilai jual komoditas pertanian melonjak berlipat-lipat, yang sebenarya identik dengan anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat.Ketika petani pada waktu itu juga harus memenuhi kebutuhan hidupnya dengan harga-harga yang semakin menjulang, maka keuntungan sesaat itu juga menjadi petaka bagi kehidupan petani, dan perekonomian Indonesia umumnya.KUT disalurkan oleh perbankan negara (BUMN) dan swasta, baik melalui mekanisme eksekusi langsung (executing) maupun mekanisme penyaluran biasa (channeling).

Debat publik pun pada waktu itu cukup ramai, di antaranya karena ada yang menganggap bahwa KUT itu bukan merupakan produk perbankan, tapi program pemerintah yang "dititipkan" kepada sektor perbankan. Misalnya, Bank Rakyat Indonesia (BRI) menyalurkan KUT dengan dana yang bersumber dari Kredit Likuiditas Bank Indonesia sebesar Rp 2,8 triliun melalui skema eksekusi dan skema saluran biasa. Bank Bukopin juga menyalurkan KUT sebesar Rp 1,8 triliun, walaupun cukup banyak persentase yang menunggak (Kompas, 24 Agustus 2011). Total jumlah KUT yang tertunggak diperkirakan Rp 5,7 triliun (81,4 %), suatu jumlah tunggakan yang sangat besar untuk suatu program pembiayaan pertanian.Tunggakan KUT inilah yang saat ini hendak diputihkan oleh pemerintah,dengan alasan untuk memberi kesempatan kepada petani penunggak agar mampu mengajukan kredit sejenis di kemudian hari.Nama-nama petani penunggak kredit akan dikeluarkan dari SID Bank Indonesia, konon untuk mewujudkan prinsip-prinsip keadilan ekonomi bagi petani.Gagasan pemerintah itu tentu secara populis akan mendapat simpati karena seakan-akan telah membantu melepaskan beban bagi petani, terutama dari kalangan miskin, yang memang tidak berdaya membayar kembali tunggakan KUT yang macet karena berbagai hambatan yang dihadapi usaha taninya.Akan tetapi, apabila benar bahwa macetnya KUT sebagian besar (65 persen) bukan disebabkan petani, tentu upaya pemutihan tunggakan KUT itu dapat menjadi preseden buruk. Pemutihan itu seakan memberikan perlindungan bagi nasabah nakal, yang biasanya bukan petani, melainkan penumpang gelap (free rider) yang mengambil untung dari adanya akses pembiayaan murah atau kredit program di sektor pertanian.Pemutihan itu juga seakan memberi "hukuman" bagi petani yang rajin

membayar angsuran utangnya, karena dipersamakan dengan mereka yang sengaja nakal tidak berniat membayar cicilan itu.

Perjalanan program KUT memang penuh liku dan beragam cerita, karena melibatkan lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi masyarakat madani, termasuk tidak kurang dari 27.000 koperasi unit desa (KUD) dengan berbagai tingkat kemajuan dan sofistikasi organisasi dan kelembagaannya.Sebagaimana kredit program lainnya, sistem administrasi dan birokrasi dari KUT jelas tidak sederhana, walaupun dengan pertimbangan untuk memperbaiki kinerja pengawasan, monitoring dan evaluasi program itu sendiri. Justru dari kerumitan administrasi dan birokrasi inilah yang membuat program pembiayaan KUT menemui banyak kesulitan, termasuk sekian kasus penyaluran dana bukan kepada petani, tapi juga ke usaha non-pertanian. Akumulasi sekian macam persoalan dan keraguan sektor perbankan untuk menganggap bahwa KUT itu adalah produk perbankan telah berkontribusi pada tunggakan kredit yang menumpuk sampai akhirnya menjadi kredit macet yang mencapai Rp 5,7 triliun tersebut. Dari pelajaran dan drama perjalanan KUT sejak awal era Reformasi, merumuskan dan melaksanakan pembiayaan sektor pertanian memang tidak mudah, karena selain persoalan kelembagaan, biaya transaksi yang ditimbulkannya, dan kemungkinan moral hazards dan penyalahgunaan wewenang yang cukup besar.Secara psikologis, apabila sampai tertanam persepsi di kalangan debitur petani (dan non-petani) bahwa kredit sektor pertanian kelakakan diputihkan, maka sangat sulit bagi siapa pun yang akan merancang dan merumuskan kebijakan pembiayaan sektor pertanian.Akibat berikutnya adalah bahwa target peningkatan produksi dan produktivitas pertanian sulit akan tercapai, sehingga upaya peningkatan kesejahteraan petani pun akan terkendala.

B. SRG (Sistem Resi Gudang)

Sistem Resi Gudang (SRG) merupakan instrumen perdagangan dan keuangan yang memungkinkan komoditas yang disimpan dalam gudang memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan tanpa diperlukan jaminan lainnya.Pelaksanaan SRG mengacu pada Undang-Undang No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2011. Oleh karena itu, beberapa jalan keluar berikut mungkin bermanfaat dalam merumuskan skema pembiayaan pertanian yang efektif ke depan. Pertama, perbaikan komunikasi sektor perbankan (dan lembaga keuangan lain) dengan sektor pertanian.Hal ini untuk menanggulangi missunderstanding atau kesaling-tidak pahaman di antara kedua sektor, karena buruknya komunikasi dan informasi yang diperoleh masing-masing sektor.Dengan perbaikan komunikasi dan pengemasan informasi yang lebih bersahabat, maka diharapkan

bahwa perbankan tidak lagi menganggap pertanian sebagai sektor kumuh, miskin, berisiko tinggi dan sebagainya.Demikian pula, pertanian tidak lagi menganggap perbankan sebagai sektor elit, tidak mau tahu karakter petani, usaha tani dan sektor pertanian secara umum.

Kedua, perbaikan produk perbankan yang lebih inovatif dalam membiayai sektor pertanian, sehingga tidak sepenuhnya mengandalkan kredit program yang sering bermasalah seperti diuraikan sebelumnya.Misalnya perbankan dapat mengembangan skema pembiayaan ke depan (forward financing), dengan tingkat bunga komersial biasa.Bahkan perbankan perlu lebih berani merangkul Sistem Resi Gudang (SRG) yang saat ini hanya dinakhodai oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). SRG ini kelak akan lebih kompatibel dengan bursa berjangka komoditas (futures trading), yang menjadi ciri khas negara-negara industri maju.

Ketiga, penyempurnaan skema perlindungan di sektor pertanian, termasuk pemberdayaan petani untuk menanggulangi hambatan permodalan yang dihadapi.Milsanya,wacana pengembangan asuransi tanaman (crop insurance) perlu dihidupkan kembali agar menjadi lebih operasional di lapangan.Asuransi tanaman ini akan sangat bermanfaat mengatasi risiko gangguan cuaca dan perubahan iklim,wabah hama dan penyakit,kegagalan panen dan lain-lain (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kementerian Perdagangan Gedung Bappebti : 2012)

Adapun beberapa kelebihan dari keberhasilan program tersebut adalah sebagai berikut:

a. **Memunculkan potensi yang dimiliki tiap-tiap daerah**
   Adanya pembangunan di enam koridor ekonomi akan menggali potensi-potensi yang dimiliki tiap-tiap koridor tersebut dan akan memaksimalkannya.Misal di pulau Sumatera akan memaksimalkan potensi sebagai sentra produksi dan pengolahan hasil bumi dan lumbung energi nasional.Begitu pula dengan pulau Kalimantan dapat memaksimalkan potensi sebagai pusat produksi dan pengolahan hasil tambang dan lumbung energi nasional, Papua-Maluku sebagai pengolahan sumber daya alam yang melimpah dan sumber daya manusia yang sejahtera, Bali-Nusa Tenggara sebagai pintu gerbang pariwisata dan pendukung pangan nasional, Jawa sebagai pendorong industri dan jasa Nasional, serta Pulau Sulawesi sebagai pusat produksi dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan nasional.
b. **Memperluas pertumbuhan dengan menghubungkan daerah tertinggal dengan pusat pertumbuhan,**dengan adanya pembangunan di enam koridor akan memperluas proses pertumbuhan di berbagai daerah.Pembangunan tidak

hanya terjadi di pusat kota saja melainkan di seluruh kota termasuk daerah tertinggal.Dengan adanya pembangunan di enam koridor akan mempercepat dan memperluas pertumbuhan ekonomi dan menjadikan pembangunan yang merata di tiap-tiap daerah.

c. **Menghubungkan daerah terpencil dengan infrastruktur & pelayanan dasar dalam menyebarkan manfaat pembangunan secara luas,** pembangunan yang telah merata di tiap-tiap wilayah akan mempermudah pembangunan sarana infrastruktur yang baik.Seperti di daerah timur Indonesia yang sampai saat ini infrastruktur disana kurang memadai, nantinya dengan adanya pembangunan di enam koridor akan membawa dampak positif bagi daerah-daerah yang dulunya masih tertinggal sebagai contoh jalan raya yang baik, pemenuhan kebutuhan listrik, dan sarana prasarana yang lainnya.
d. **Memperluas lapangan kerja,** pembangunan di enam koridor ini akan mendatangkan banyak investor baik domestik maupun asing.Dengan begitu maka akan membuka lapangan kerja sehingga akan mengurangi jumlah pengangguran yang ada di Indonesia.
e. **Meningkatkan pendapatan daerah yang berujung pula pada meningkatnya pendapatan nasional,**tiap daerah dapat memaksimalkan potensi yang ada di wilayahnya,maka pendapatan daerah akan naik,apabila pendapatan daerah mengalami kenaikan, maka kenaikan juga akan terjadi pada pendapatan nasional.Dengan adanya MP3EI, pendapatan regional domestik bruto (PRDB) diperkirakan akan meningkat hingga empat kali lipat yakni dari US$555 miliar di tahun 2010 menjadi US$1,09 triliun di tahun 2015 dan US$2,16 triliun di tahun 2030.

Pada kenyataannya sebuah kebijakan selalu berdampingan dengan tantangan kelemahan yang harus segera diatasi agar tidak menghambat program yang sedang berjalan, secara umum kelemahan tersebut adalah antara lain:

1. **Dapat mengakibatkan eksploitasi sumber daya alam**
   Dengan adanya pemaksimalan potensi di tiap-tiap wilayah maka yang akan terjadi adalah pemanfaatan sumber daya alam secara besar-besaran yang dalam artian bahwa akan terjadi eksploitasi alam karena tiap wilayah berlomba-lomba untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari potensi yang dimiliki.Akibatnya akan berdampak buruk bagi alam sekitar, misalnya eksploitasi hasil tambang, hal tersebut akan merusak daerah yang menjadi tempat galian tambang emas dan akan sulit untuk di perbaharui kembali seperti semula.
2. **Kalahnya investor domestik dengan inverstor asing**
   Tidak menutup kemungkinan bahwa pembangunan di enam koridor ini akan mendatangkan investor-investor asing.Kita tahu bahwa sumber daya manusia

yang di miliki indonesia masih agak kurang memadai untuk berdiri sendiri mengelola potensi-potensi alamnya.Seperi contoh di papua, pertambangan emas telah dikuasai investor asing untuk mengelolanya karena keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi di Indonesia.Selain itu, Pemerintah daerah tentunya akan lebih senang jika proyek pembangunan dipegang oleh investor asing karena pasti investor asing akan berani membayar mahal untuk mendapatkan hasil alam misalnya bijih emas.Untuk itu perlu disiasati bagaimana agar investor domestik dapat bersaing dengan investor asing. Orientasi pembangunan seluruh sub sektor pada sektor pertanian saat ini diarahkan untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan bagi masyarakat, menghasilkan berbagai produk industri berbasis pertanian, membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, serta memperbaiki kondisi ekonomi dan lingkungan. Kekurangan bahan pangan, khususnya makanan pokok beras akan menimbulkan gejolak sosial ekonomi dan politik masyarakat, sehingga kemandirian pangan menjadi tantangan pembangunan pertanian di waktu yang akan datang. Dalam rencana strategis Kementerian Pertanian, sasaran utama Kementerian Pertanian dalam pembangunan pertanian nasional periode 2010-2014 adalah pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan dengan fokus utama pada lima komoditas unggulan nasional, yaitu (a) padi, (b) jagung, (c) kedelai, (d) gula, dan (e) daging sapi (Renstra Kementerian Pertanian, 2010).Dalam lima tahun terakhir ini,Kementerian Pertanian telah berupaya keras untuk mempercepat peningkatan produksi komoditas diatas.Namun demikian, harus diakui bahwa dalam pelaksanaan di lapangan, banyak tantangan yang harus dilalui dan tidak semua target dapat dicapai (Kementerian Pertanian, 2010).

Berbagai masalah yang bersifat multidimensional yang dihadapi untuk memenuhi permintaan berbagai komoditas pertanian harus dicermati dan disikapi dengan beragam kebijakan peningkatan produksi.Masalah **pertama** adalah penurunan kualitas dan kuantitas sumber daya lahan pertanian.**Kedua**, terbatasnya aspek ketersediaan infrastruktur penunjang pertanian yang juga penting namun minim ialah pembangunan dan pengembangan waduk.Selanjutnya, masalah **ketiga** adalah lemahnya sistem alih teknologi.Ciri utama pertanian modern adalah produktivitas, efisiensi, mutu dan kontinuitas pasokan yang selalu meningkat dan terpelihara secara terus menerus.**Keempat** adalah muncul dari terbatasnya akses layanan usaha, khususnya dalam ketersediaan modal kerja.Kemampuan petani untuk membiayai usaha taninya sangat terbatas, sehingga produktivitas yang dicapai masih di bawah produktivitas potensial. Mengingat keterbatasan petani dalam permodalan tersebut dan endahnya aksesibilitas terhadap sumber permodalan formal, maka dilakukan pengembangkan dan mempertahankan beberapa penyerapan input produksi biaya

rendah yang sudah berjalan ditingkat petani.Selain itu, penanganan pasca panen dan pemberian kredit lunak serta bantuan langsung kepada Reformasi Kebijakan Menuju Transformasi Pembangunan Pertanian para petani sebagai pembiayaan usaha tani cakupannya diperluas. Pemerintah telah menyediakan anggaran yang sangat besar untuk bisa diserap melalui tim Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Bank BRI khusus Kredit Bidang Pangan dan Energi.Masalah **kelima** adalah masih panjangnya mata rantai tata niaga pertanian, sehingga menyebabkan petani tidak dapat menikmati harga yang lebih baik, karena pedagang telah mengambil untung terlalu besar dari hasil penjualan (Nugrayasa, 2012).

Beberapa tahun terakhir ini, sektor pertanian juga dihadapkan pada tantangan yang semakin berat, tetapi sekaligus merupakan peluang dalam kaitan anomali iklim.Iklim ekstrim yang sulit diprediksi menjadi penghalang bagi kegiatan pengembangan usaha pertanian, khususnya usahatani padi.Berbagai jenis tanaman budidaya sulit diharapkan dapat berproduksi secara optimal, sehingga petani dihadapkan pada risiko kerusakan tanaman yang berujung pada kerugian.Namun di tengah tantangan itu, terbuka peluang mengoptimalkan berbagai potensi yang tersedia guna meningkatkan produksi berbagai produk pertanian.Melalui sosialisasi penerapan teknologi budidaya yang adaptif terhadap perubahan iklim, perbaikan infrastruktur pertanian, perluasan areal pertanaman, sistem irigasi yang efisien, dan manajemen usahatani yang lebih baik, peluang meningkatkan produksi beberapa komoditas pertanian sangat terbuka.Hal inilah yang memberi keyakinan bahwa ditengah tantangan berat perubahan iklim global, produksi beras, misalnya diharapkan dapat meningkat. Sementara itu, pada waktu yang akan datang produksi bebagai komoditas bernilai ekonomi tinggi lainnya, seperti jagung, kedele, bahkan gula maupun daging sapi diharapkan dapat meningkat mencapai target peningkatan produksi yang direncanakan.

Dengan semua permasalahan yang semakin kompleks untuk menyediakan bahan pangan dan hasil pertanian untuk industri lainnya, diperlukan upaya mengefektifkan setiap kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan pertanian baik oleh pemerintah, khususnya untuk meningkatkan kapasitas produksi padi/beras secara nasional, maupun oleh pihak-pihak terkait lainnya.Pembiayaan yang bersumber dari APBN akan semakin terbatas mengingat banyaknya kebijakan dan program pembangunan di erbagai sektor.Dalam konteks inilah skema pembiayaan untuk mendukung pembangunan sektor pertanian dan sekaligus menguatkan kelembagaan pertanian di perdesaan perlu dirumuskan dengan baik. Kementerian Pertanian terus berupaya meningkatkan kinerja melalui peningkatan layanan berkualitas dan pemanfaatan sumberdaya secara optimal.Kementerian Pertanian diharapkan mampu

mengimplementasikan fungsi-fungsi fasilitasi, regulasi, dan promosi dan proteksi dengan efektif serta mampu menarik serta mendorong peran para pemangku kepentingan lainnya secara optimal. Saat ini sangat diperlukan cara mencapai tingkat produksi dan produktivitas berbagai komoditas pertanian agar mampu bersaing secara global ditengah pengaruh perubahan iklim, keadaan ekonomi dan politik yang kurang menguntungkan, tingginya tingkat pengangguran, meningkatnya kemiskinan, dan melonjaknya harga-harga pangan di dunia yang berpengaruh terhadap posisi tawar masyarakat. Bagi petani (yang lemah dalam banyak aspek), sumber-sumber pembiayaan dan kegiatan pemanfaatan dana.

BAB 9
HUTANG LUAR NEGERI DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

Utang luar negeri atau pinjaman luar negeri adalah sebagian dari total utang suatu negara yang diperoleh dari para kreditor di luar negara tersebut.Penerima utang luar negeri dapat berupa pemerintah, perusahaan, atau perorangan.Bentuk utang dapat berupa uang yang diperoleh dari bank swasta, pemerintah negara lain, atau lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia.Sebuah negara dapat mengambil kebijakan ini dengan berbagi pertimbangan dalam penyelenggaraan pemerintahannya.Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam uraian selanjutnya.

A. Penyebab Utang Luar Negeri

Pertama, Pada saat Indonesia meminta bantuan kepada IMF untuk menghadapi krisis pada 1997, lembaga tersebut memaksakan kehendaknya untuk mengintervensi semua bidang kehidupan berbangsa dan bernegara.Dalam letter of intent (LoI) terdapat 1.243 tindakan yang harus dilaksanakan pemerintah Indonesia dalam berbagai bidang seperti perbankan, desentralisasi, lingkungan, fiskal, kebijakan moneter dan Bank Sentral, privatisasi BUMN serta jaring pengaman sosial.Dengan kata lain, keuangan negara sengaja dibuat bangkrut terlebih dahulu, dan melalui ketergantungan dalam bidang keuangan ini, Indonesia telah sepenuhnya dikendalikan oleh negara pemberi hutang dan lembaga keuangan internasional.

Kedua,tudingan bahwa lembaga seperti IMF dan Bank Dunia diboncengi kepentingan perusahaan-perusahaan dari negara-negara kreditor bukanlah isapan jempol belaka.Hal tersebut juga diakui oleh pemerintah AS.Selama kurun tahun 1980-an hingga awal 1990-an saja, IMF sudah menerapkan program penyesuaian struktural di lebih dari 70 negara berkembang yang mengalami krisis finansial.Setiap tahun, Bank Dunia juga memberikan sekitar 40.000 kontrak kepada perusahaan swasta.Sebagian besar kontrak ini jatuh ke perusahaan-perusahaan dari negara-negara maju.Jadi sangat jelas bahwa negara-negara pendonor sangat berkepentingan untuk memberikan negara-negara berkembang untuk berhutang.Departemen Keuangan AS mengaku, untuk setiap dollar AS yang dikontribusikan AS ke lembaga-lembaga multilateral, perusahaan-

perusahaan AS menerima lebih dari dua kali lipat jumlah itu dari kontrak-kontrak pengadaan untuk program-program atau proyek-proyek yang dibiayai dengan pinjaman lembaga-lembaga tersebut.Hal tersebut tidak hanya terjadi pada pinjaman multilateral.Pinjaman bilateral seperti dari Jepang pun biasanya diikuti persyaratan sangat ketat yang menyangkut penggunaan komponen, barang, jasa (termasuk konsultan), dan kontraktor pelaksana untuk pelaksanaan proyek harus berasal dari Jepang. Melalui modus tersebut, Pemerintah Jepang selain bisa me-recycle ekses dana yang ada di dalam negerinya, juga sekaligus bisa menggerakkan perusahaan dalam negerinya yang lesu lewat pengerjaan proyek-proyek yang dibiayai dengan dana hutang ini. Pinjaman yang digelontorkan tersebut, dana yang mengalir kembali ke Jepang dan negara-negara maju lain sebagai kreditor jauh lebih besar ketimbang yang dikucurkan ke Indonesia sebagai pengutang.Dapat dikatakan bahwa Indonesia sebagai negara debitor justru mensubbsidi negara-negara kaya yang menjadi kreditornya.

Ketiga,hutang dianggap sebagai biang dari kerusakan lingkungan yang terjadi di negara-negara yang sedang berkembang khususnya negara kreditor.

B. Sejarah Utang Luar Negeri Indonesia dan Utang Pemerintah Kolonial Hindia Belanda

Pemerintah kolonial Hindia Belanda sudah memulai kebiasaan berutang bagi pemerintahan di Indonesia.Seluruh utang yang belum dilunasinya pun turut diwariskan, sesuai dengan salah satu hasil Konferensi Meja Bundar (KMB).Penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia pada waktu itu disertai dengan pengalihan tanggung jawab segala utang pemerintah kolonial.Dilihat dari perspektif utang piutang, maka Republik Indonesia bukanlah negara baru, melainkan pelanjut dari pemerintahan sebelumnya. Tradisi pengalihan utang kepada pemerintahan berikutnya bertahan sampai saat ini, terlepas dari perpindahan kekuasaan itu berlangsung dengan cara apa pun. Pemerintahan era Soekarno mewariskan utang luar negeri (ULN) sekitar USD 2,1 miliar kepada pemerintahan Soeharto.Secara spektakuler, pemerintahan Soeharto membebani Habibie dengan warisan utang sebesar USD 60 miliar.Bahkan, pemerintahan Habibie mewariskan utang yang lebih besar, hanya dalam kurun waktu dua tahun.ULN memang "hanya" bertambah menjadi sebesar USD 75 miliar dolar.Namun, utang dalam negeri yang semula nihil menjadi USD 60 miliar (jika dikonversikan), sehingga utang pemerintah secara keseluruhan menjadi sekitar USD 135 miliar.Tentu tidak adil jika hanya melihat angka utang yang fantastis di era Habibie secara begitu saja.Sebagian masalahnya adalah karena akumulasi utang beserta akibat lanjutan dari kebijakan pemerintahan Soeharto.Bisa

dikatakan bahwa Pemerintahan Habibie harus menghadapi krisis moneter dan ekonomi, yang berasal dari era Soeharto.

1. **Utang Pemerintah Orde Lama**

Sesuai dengan perjanjian ketika penyerahan kedaulatan kepada pemerintah Republik Indonesia,pemerintahan Soekarno menerima pula warisan utang pemerintah kolonial Hindia Belanda sebesar 4 miliar dolar Amerika.Utang tersebut memang tidak pernah dibayar oleh Pemerintahan Soekarno, namun juga tidak dinyatakan di¬hapuskan.Utang ini nantinya diwariskan kepada era-era pemerintahan berikutnya, dan akhirnya dilunasi juga.Pada awal kemerdekaan, sikap pemerintah Soekarno Hatta terhadap utang luar negeri bisa dikatakan mendua.Di satu sisi, mereka menyadari bahwa utang luar negeri sebagai sumber pembiayaan sangat dibutuhkan. Negara baru yang baru merdeka ini memerlukan dana untuk memperbaiki taraf kesejahteraan rakyat, yang sudah sedemikian terpuruk karena kolonialisme.Ketiadaan infrastruktur, dan rusaknya sebagian besar kapasitas produksi seperti ladang minyak, membuat penerimaan negara dari sumber domestik belum bisa diandalkan.Hibah dari negara-negara yang bersimpatik ketika awal kemerdekaan tentu saja tidak memadai dan lambat laun dihentikan.Pilihan yang tersedia adalah mempersilakan modal asing masuk ke Indonesia untuk berinvestasi, serta melakukan pinjaman luar negeri.Di sisi lain,pemerintah Soekarno-Hatta bersikap waspada terhadap kemungkinan penggunaan utang luar negeri sebagai sarana kembalinya kolonialisme.Semangat kemerdekaan masih amat kental, sehingga mereka peka dalam masalah yang berkaitan dengan kedaulatan Indonesia.Suasana ini juga mewarnai dinamika parlemen, sekalipun terdiri dari banyak partai dengan latar idelogis berbeda.Akibatnya, persyaratan yang ketat ditetapkan dalam setiap perundingan berutang kepada pihak luar negeri.Ini berlaku juga terhadap masalah penanaman modal asing, termasuk perundingan mengenai tambang dan kilang minyak di wilayah Indonesia. Sebagai contoh, Hatta dalam berbagai kesempatan mengemukakan antara lain: negara kreditor tidak boleh mencampuri urusan politik dalam negeri, suku bunga tidak boleh lebih dari 3-3,5 persen per tahun, dan jangka waktu utang yang lama.Jadi, selain melihat utang luar negeri sebagai sebuah transaksi ekonomi, mereka dengan sadar memasukkan biaya politik sebagai pertimbangan dalam berutang.Terkenal pula pernyataan sarkastis Soekarno, yang mengatakan "*go to hell with your aid*" kepada AS karna berusaha mengaitkan utang dengan tekanan politik.Bagaimanapun, transaksi utang luar negeri tetap terjadi pada awal kemerdekaan. Sampai dengan tahun 1950, utang pemerintah yang baru tercatat sebesar USD 3,8 miliar, selain utang warisan pemerintah kolonial.Setelah itu, terjadi fluktuasi jumlah utang pemerintah, seiring dengan sikap pemerintah yang cukup sering berubah terhadap pihak asing dalam soal modal dan utang. Selama kurun tahun 50-an tetap saja ada bantuan dan utang yang masuk ke Indonesia.Sikap

pemerintah yang berubah-ubah itu dikarenakan kerapnya pergantian kabinet, disamping faktor Soekarno sebagai pribadi. Sebagai contoh, pada tahun 1962, delegasi IMF berkunjung ke Indonesia untuk menawarkan proposal bantuan finansial dan kerjasama, dan pada tahun 1963 utang sebesar USD17 juta diberikan oleh Amerika Serikat. Pemerintah Indonesia pun kemudian bersedia melaksanakan beberapa kebijakan ekonomi baru yang bersesuaian dengan proposal IMF.Namun, keadaan berbalik pada akhir tahun itu juga, ketika Malaysia pemerintah Inggris menyatakan Malaysia di¬nyatakan sebagai bagian federasi Inggris tanpa pembicaraan dengan Soekarno.Hal ini sebetulnya juga berkaitan dengan nasionalisasi beberapa perusahaan Inggris di Indonesia.Yang jelas, hubungan Indonesia dengan IMF dan Amerika, turut memburuk.Berbagai kesepakatan sebelumnya dibatalkan oleh Soekarno, dan Indonesia keluar dari keanggotaan IMF dan PBB.Secara teknis ekonomi, telah ada pelunasan utang dari sebagian hasil ekspor komoditi primer Indonesia.Ada pula penghapusan se¬bagian utang oleh kreditur, terutama dari negara-negara yang bersahabat, setidaknya dalam tahun-tahun tertentu. Akhirnya, ketika terjadi perpindahan kekuasaan kepada Soeharto, tercatat utang luar negeri pemerintah adalah sebesar USD 2,1 miliar.Jumlah ini belum termasuk utang warisan pemerintah kolonial Belanda yang sekalipun resmi diakui, tidak pernah dibayar oleh pemerintahan Soekarno.

2. Perkembangan Utang Pemerintah Era Soeharto

Sejak awal, sikap pemerintahan Soeharto terhadap modal asing berbeda dengan sikap Soekarno-Hatta.Sebagai contoh, undang¬undang pertama yang ditandatangani Soeharto adalah UU no.1/1967 tentang Penanaman Modal Asing, yang isinya bersifat terbuka dan bersahabat bagi masuknya modal dari negara manapun.Beberapa bulan sebelumnya, IMF membuat studi tentang program stabilitas ekonomi, yang rekomendasinya segera diikuti oleh pemerintah.Indonesia juga telah secara resmi kembali menjadi anggota IMF.Seiring dengan itu, perundingan serius mengenai utang luar negeri Indonesia berlangsung lancar. Kembalinya Indonesia menjadi anggota IMF dan Bank Dunia, seketika diimbali oleh negara-negara barat berupa: pemberian hibah, restrukturisasi utang lama, komitmen utang baru dan pencairan utang baru yang cepat.Hibah sebesar USD 174 juta dikatakan bertujuan untuk mengangkat Indonesia dari keterpurukan ekonomi.Restrukturisasi utang yang disetuji bernilai sekitar USD 534 juta. Lewat berbagai perundingan, terutama pertemuan Paris Club, disepakati moratorium utang sampai dengan tahun 1971 untuk pembayaran cicilan pokok sebagian besar utang.Akhirnya, sejak tahun 1967 Indonesia mendapat persetujuan utang baru dari banyak kreditur, dan sebagiannya langsung dicairkan pada tahun itu juga.ULN dengan Persyaratan Lunak Pada mulanya, semua utang baru itu bisa dikatakan sebagai pinjaman dengan syarat lunak. Ada jenis pinjaman yang biasa disebut

bantuan program, yang terdiri dari bantuan devisa kredit dan bantu¬an pangan. Bantuan program ini berbentuk devisa tunai atau hak untuk memperoleh sejumlah komoditi yang ditentukan.Ada bantu¬an proyek, yang pada dasarnya adalah utang bagi pembagunan proyek tertentu dengan syarat-syarat pelunasan yang lunak.Bahkan, ada dana berbentuk sumbangan (grant) atau hibah yang berfungsi sebagai ”dana pendamping” dari utangnya.Para kreditur yang memberi utang kepada Indonesia awalnya hanya terdiri dari negara-negara dan lembaga-lembaga keuangan iternasional.Para kreditur tersebut mengkoordinasikan diri ke dalam Inter Governmental Group on Indonesia (IGGI).Beberapa tahun kemudian, kreditur swasta turut terlibat.Sebagian kreditur swasta yang besar kadang diundang dalam forum-forum IGGI. Lembaga ini didirikan pada tahun 1967 di Den Haag, yang anggotanya terdiri dari: Australia, Amerika Serikat, Belgia, Belanda, Italia, Jerman, Jepang, Inggris, Perancis, dan Kanada. Ada negara-negara yang hadir sebagai peninjau, seperti: Austria, Denmark, Norwegia, Selandia Baru, dan Swiss. Sedangkan lembaga-lembaga keuangan multilateral yang menjadi anggota forum adalah: IMF, IBRD, ADB, UNDP, dengan OECD sebagai peninjau.Pada tanggal 25 Maret 1992, dipicu oleh suatu insiden politik, IGGI dibubarkan dan kepemimpinan Belanda tidak diakui lagi oleh Indonesia.Namun, fungsi IGGI tetap berlangsung melalui wadah baru bernama Consultative Group for Indonesia (CGI), dengan pimpinan Bank Dunia. Selama perkembangannya, ada beberapa lembaga internasional, termasuk bentukan Bank Dunia, yang kemudian bergabung, seperti IDA, IFAD (International Fund for Agricultural Development) dan IFC (International Finance Corporation).Terjadi pula beberapa pergeseran besaran kontribusi masing-masing negara.Resminya, GGI/CGI hanyalah suatu forum pembicaraan me¬ngenai ULN pemerintah Indonesia.Namun, pada praktiknya IGGI/CGI menyerupai konsorsium.Sebagian besar ULN pemerintah pada era pemerintahan Soeharto dibicarakan dan disepakati dalam forum IGGI/CGI. Setiap tahun, forum ini memutuskan jumlah dan macam pinjaman yang akan diberikan, setelah mempertimbangkan “usulan” dari pemerintah Indonesia.Dalam artian tertentu, IGGI/CGI memang bukan onsorsium, karena masing-masing kreditur memiliki kesepakatan tersendiri tentang detilnya, dan tidak seluruh hasil forum bersifat mengikat kepada mereka.Pada saat pemerintahan Soeharto mulai menerima ULN dan satu dekade setelahnya, perkembangan wacana keuangan internasional memang sedang kondusif.Selain yang dinyatakan sebagai dimensi kemanusiaan atau charity, serta keterkaitan dengan masalah pe-rebutan pengaruh politik Blok Barat dan Blok Komunis, konsep dan praktik keuangan internasional memang tengah marak me¬ngembangkan berbagai bentuk ULN. Ada dua pemicu utama dari sisi wacana keuangan dan perekonomian.Pertama, upaya banyak negara maju untuk merestukturisasi sekaligus mengembangkan industri pengolahannya, yang

berlangsung mulai era 1960-an. Ada pertimbangan suplai sumber energi, bahan baku, pemindahan se¬bagian tahap produksi, sampai kepada penetrasi pasar.

Kedua, mulai ada kelebihan likuiditas pada lembaga keuangan internasional, yang kemudian mendapat momentum lanjutan dari petro dollar akibat kenaikan harga minyak sejak awal 70-an. Selain disimpan pada bank dan lembaga keuangan komersial, dana petro dollar dari negara-negara produsen minyak ini juga bisa diakses oleh IMF. Perkembangan wacana dan kondisi keuangan internasional itu kemudian antara lain menghasilkan ULN yang diterima pemerintah negara-negara sedang berkembang (NSB), termasuk Indonesia. Secara umum, jenisnya terdiri dari: dana pembangunan resmi (official development fund/ODF), kredit ekspor (export credit) dan pinjaman swasta (private flows). ODF adalah pinjaman resmi bersyarat lunak dari suatu negara donor melalui lembaga keuangan bilateral negara yang bersangkutan dan atau melalui lembaga dan bank pembangunan multilateral seperti: Bank Dunia, ADB, IDA, dan sebagainya.ODF dapat berupa pinjaman bersyarat sangat lunak (Official development assistance/ODA) atau pinjaman setengah lunak (less concessional loan/LCL).Kredit ekspor adalah pinjaman setengah resmi dengan per¬syaratan setengah lunak yang dananya berasal dari negara donor (disebut official financial support) atau yang bersumber dari pihak perbankan dan lembaga keuangan swasta yang dijamin dan disubsidi oleh pemerintah negara donor. Penggunaan kredit ekspor itu kadang-kadang terbatas hanya untuk pengadaan barang dan jasa di negara donor (tied), dan kadang tidak mengikat, atau kombinasi antara keduanya.Kredit ekspor disebut "*suppliers credit*" kalau pinjaman itu disalurkan melalui pemasok di negara donor. Pinjaman ini dinamakan "*buyers credit*" jika diberikan langsung oleh lembaga kredit ekspor kepada peminjam di negara penerima. Secara teknis, dikenal pembedaan jenis ULN dengan sebutan Pinjaman program dan Pinjaman proyek dalam pencatatan APBN saat ini.Pada masa sebelumnya, ULN dicatat dalam APBN setiap tahunnya sebagai bantuan program dan bantuan proyek.Pada tahun-tahun tertentu, ada yang dicatat sebagai pinjaman setengah lunak/komersial dan pinjaman tunai.Jenis yang masuk kategori dalam pinjaman swasta ini hanya pada periode tertentu memiliki arus masuk yang besar.Sebenarnya, pembedaan antara pinjaman program dan pinjaman proyek bersifat sumir atau tidak cukup tegas.Pada dasarnya, kedua jenis itu terdiri dari ODA, LCL dan Kredit ekspor dalam pengertian yang disinggung di atas.Meskipun demikian, ULN yang disebut pinjaman program, pada umumnya bersifat lebih lunak dan membantu.Pembedaan ini memang cukup jelas pada masa awal pemerintahan Soeharto. Pinjaman program pada awal Orde baru terdiri dari bantuan devisa kredit dan bantuan pangan.Pinjaman program diorientasikan untuk menyelesaikan masalah jangka pendek dan mendesak, serta bersifat sangat lunak.Pada masa berikutnya, tingkat kelunakan menjadi kurang

jelas.Sifat pinjaman program yang membantu mengatasi masalah ekonomi dan keuangan pemerintah yang mendesak tetap dipertahankan. Sifat utamanya adalah memberikan aliran devisa atau kas masuk secara langsung bagi pemerintah.

Akan tetapi, dalam beberapa tahun tersebut, pinjaman program terkait dengan perubahan kebijakan dalam bentuk undang-undang dan peraturan lainnya.Pencairan utang program selalu dikaitkan dengan capaian dalam perubahan kebijakan yang berhasil dilakukan pemerintah.Sedangkan yang dimaksud dengan pinjaman proyek terutama adalah utang yang diterima dalam bentuk fasilitas berbelanja barang dan jasa kepada negara/lembaga kreditur dalam bentuk kredit.Bedanya dengan pinjaman program, pinjaman proyek lebih ditujukan untuk proyek investasi jangka panjang. Sebagaimana telah disinggung di atas, sejak tahun 1967 Indonesia telah menerima pinjaman dengan syarat lunak atau dalam bentuk sumbangan (grant) dari negara-negara dan lembaga-lembaga keuangan iternasional yang tergabung dalam IGGI. Dalam beberapa tahun sejak itu, Indonesia mendapat pinjaman berbentuk bantuan program yang terdiri dari bantuan devisa kredit dan bantuan pangan, serta bantuan proyek dengan syarat-syarat pelunasan yang lunak.

3. Utang Pemerintahan Transisi (Habibie)

a) Tanggal 14 dan 15 Mei 1997, kurs bath terhadap US$ mengalami penurunan (depresiasi) sebagai akibat dari keputusan jual dari para investor yang tidak percaya lagi thd prospek ekonomi Thailand dalam jangka pendek. Pemerintah Thailand mengintervensi dan didukung oleh bank sentral singapora, tapi tidak mampu menstabilkan kurs Bath, sehingga bank sentral Thailand mengumumkan kurs bath diserahkan pada mekanisme pasar. 2 Juli 1997, penurunan nilai kurs bath terhadap US$ antara 15% - 20%

b) Bulan Juli 1997, krisis melanda Indonesia (kurs dari Rp 2.500 menjadi Rp 2.650.) Bank Indonesia (BI) mengintervensi, namun tidak mampu sampai bulan maret 1998 kurs melemah sampai Rp 10.550 dan bahkan menembus angka Rp 11.000/US$. Langkah konkrit untuk mengatasi krisis:
   b. Penundaan proyek Rp 39 trilyun untuk mengimbangi keterbatasan anggaran Negara
   c. BI melakukan intervensi ke bursa valas

c) Meminta bantuan IMF dengan memperoleh paket bantuan keuangan US$ 23 Milyar pada bulan Nopember 1997.

   d) Mencabut ijin usaha 16 bank swasta yang tidak sehat , januari 1998 pemerintah Indonesia menandatangani nota kesepakatan (LOI) dengan IMF yang mencakup 50 butir kebijakan yang mencakup:
   a. Kebijakan ekonomi makro (fiscal dan moneter) mencakup: penggunaan prinsip anggaran berimbang; pengurangan pengeluaran pemerintah seperti

pengurangan subsidi BBM dan listrik; pembatalan proyek besar; dan peningkatan pendapatan pemerintah dengan mencabut semua fasilitas perpajakan, penangguhan PPN, pengenaan pajak tambahan terhadap bensin, memperbaiki audit PPN, dan memperbanyak obyek pajak.

b. Restrukturisasi sektor keuangan
c. Reformasi structural

Bantuan gagal diberikan, karena pemerintah Indonesia tidak melaksanakan kesepakatan dengan IMF yang telah ditandatangani.Indonesia tidak mempunyai pilihan kecuali harus bekerja sama dengan IMF.Kesepakatan baru dicapai bulan April 1998 dengan nama "Memorandum Tambahan mengenai Kebijaksanaan Ekonomi Keuangan" yang merupakan kelanjutan, pelengkapan dan modifikasi 50 butir kesepakatan. Tambahan dalam kesepakatan baru ini mencakup:

a) Program stabilisasi perbankan untuk stabilisasi pasar uang dan mencegah hiperinflasi
b) Restrukturisasi perbankan untuk penyehatan system perbankan nasional
c) Reformasi structural
d) Penyelesaian utang luar negeri dari pihak swasta
e) Bantuan untuk masyarakat ekonomi lemah.

4.Utang Pemerintahan Reformasi (Abdurrahman Wahid)

Mulai pertengahan tahun 1999 pada masa ini memiliki target:

a) Memulihkan perekonomian nasional sesuai dengan harapan masyarakat dan investor
b) Menuntaskan masalah KKN
c) Menegakkan supremasi hokum
d) Penegakkan hak asasi manusia
e) Pengurangan peranan ABRI dalam politik
f) Memperkuat NKRI (Penyelesaian disintegrasi bangsa)

Kondisi yang terjadi pada saat itu adalah:

a) Pada tahun 1999 pertumbuhan ekonomi positif (mendekati 0)
b) Tahun 2000 pertumbuhan ekonomi 5%
c) Kondisi moneter stabil (inflasi dan suku bunga rendah)
d) Tahun 2001, pelaku bisnis dan masyarakat kurang percaya kepada pemerintahan sebagai akibat dari pernyataan presiden yang controversial, KKN, dictator, dan perseteruan dengan DPR
e) Bulan maret 2000, cadangan devisa menurun dari US$ 29 milyar menjadi US$ 28,875 milyar

f) Hubungan dengan IMF menjadi tidak baik sebagai akibat dari: penundaan pelaksanaan amandemen UU No. 23 tahun 1999 mengenai Bank Indonesia; penerapan otonomi daerah (terutama kebebasan untuk hutang pemerintah daerah dari LN); dan revisi APBN 2001.
g) Tahun 2001, pertumbuhan ekonomi cenderung negative, IHSG merosot lebih dari 300 poin, dan nilai tukar rupiah melemah dari Rp 7000 menjadi Rp 10.000 per US$.

5. Utang Pada Masa kepemimpinan Megawati Soekarnoputri

Masalah-masalah yang mendesak untuk dipecahkan adalah pemulihan ekonomi dan penegakan hukum.Kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi persoalan-persoalan ekonomi antara lain:

a. Meminta penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8 milyar pada pertemuan Paris Club ke-3 dan mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 116.3 triliun.
b. Kebijakan privatisasi BUMN. Privatisasi adalah menjual perusahaan negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban negara. Hasil penjualan itu berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,1 %. Namun kebijakan ini memicu banyak kontroversi, karena BUMN yang diprivatisasi dijual ke perusahaan asing. Di masa ini juga direalisasikan berdirinya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), tetapi belum ada gebrakan konkrit dalam pemberantasan korupsi. Padahal keberadaan korupsi membuat banyak investor berpikir dua kali untuk menanamkan modal di Indonesia, dan mengganggu jalannya pembangunan nasional.

6. Utang Pada Masa Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono

Kebijakan kontroversial pertama presiden Yudhoyono adalah mengurangi subsidi BBM, atau dengan kata lain menaikkan harga BBM.Kebijakan ini dilatar belakangi oleh naiknya harga minyak dunia.Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.Kebijakan kontroversial pertama itu menimbulkan kebijakan kontroversial kedua, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin.Kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak, dan pembagiannya menimbulkan berbagai masalah sosial.

Kebijakan yang ditempuh untuk faktor utama untuk menentukan kesempatan kerja.Mungkin ini mendasari kebijakan pemerintah yang selalu ditujukan untuk memberi kemudahan bagi investor, terutama investor asing, yang salahsatunya adalah revisi undang-undang ketenagakerjaan.Jika semakin banyak investasi asing di Indonesia, diharapkan jumlah kesempatan kerja juga akan bertambah.Pada pertengahan bulan Oktober 2006 ,Indonesia melunasi seluruh sisa utang pada IMF

sebesar 3,2 miliar dolar AS.Dengan ini, maka diharapkan Indonesia tak lagi mengikuti agenda-agenda IMF dalam menentukan kebijakan dalam negri. Namun wacana untuk berhutang lagi pada luar negri kembali mencuat, setelah keluarnya laporan bahwa kesenjangan ekonomi antara penduduk kaya dan miskin menajam, dan jumlah penduduk miskin meningkat dari 35,10 jiwa di bulan Februari 2005 menjadi 39,05 juta jiwa pada bulan Maret 2006. Hal ini disebabkan karena beberapa hal, antara lain karena pengucuran kredit perbankan ke sector riil masih sangat kurang (perbankan lebih suka menyimpan dana di SBI), sehingga kinerja sector riil kurang dan berimbas pada turunnya investasi.Selain itu, birokrasi pemerintahan terlalu kental, sehingga menyebabkan kecilnya realisasi belanja Negara dan daya serap, karena inefisiensi pengelolaan anggaran.Jadi, di satu sisi pemerintah berupaya mengundang investor dari luar negri, tapi di lain pihak, kondisi dalam negri masih kurang kondusif.

C. Tiga Komponen Biaya Yang Harus Dipenuhi Pemerintah Sebagai Peminjam

1. Biaya di muka (front and fee)
2. Biaya bunga (interest) yang harus disesuaikan dengan London Interest Bond and Obligation Rate (LIBOR)
3. Biaya komitmen (commitment fee) yang harus dibayarkan jika pemerintah terlambat (sesuai jadwal yang disepakati) melakukan pencairan pinjaman. Di antara tiga biaya yang sangat memberatkan itu, biaya front and fee dan commitment fee adalah biaya-biaya yang tidak tampak atau jelas ke mana alirannya. Biaya front and fee yang harus dikeluarkan pemerintah atau negara peminjam sebesar 1 persen dari total pinjaman yang diajukan ini tidak jelas untuk apa ditujukan, sebab segala hal yang berkaitan dengan urusan pinjam-meminjam telah terdapat biaya operasionalnya masing-masing. Karena itu, biaya di muka selama Indonesia terlibat dalam urusan utang luar negeri dengan pihak lender, selain sangat sulit untuk dilacak dan merugikan negara, bisa jadi telah terjadi "permainan" antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses ini dan Bank Dunia. Oleh karena itu, proyek-proyek yang dibiayai utang semacam ini, sebelum terjadi loan agreement, telah menguap, dan inilah yang menurut perhitungan ekonomis tidak dapat dipertanggungjawabkan. Akibatnya, kaitan antara pinjaman yang diterima dan tujuan penanggulangan kemiskinan secara nasional menjadi sangat lemah dan hanya menguntungkan sekelompok orang.

D. Peran IMF Dalam Perekonomian Indonesia

Pola dan proses dinamika pembangunan ekonomi di suatu negara ditentukan oleh banyak faktor baik domestik mapun eksternal. Faktor-faktor domestik antara lain kondisi fisik (termasuk iklim), lokasi geografis, jumlah dan kualitas sumber daya

alam (SDA), dan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki, kondisi awal ekonomi, sosial dan budaya, sistem politik, serta peranan pemerintah di dalam ekonomi.Adapun faktor-faktor eksternal di antaranya adalah perkembangan teknologi, kondisi perekonomian dan politik dunia, serta keamanan global.

Dari pengalaman di berbagai negara menurut Tulus T.H. Tambunan mungkin dapat dikatakan yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi bukan "warisan" dari negara penjajah, melainkan orientasi politik, sistem ekonomi, serta kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh rezim pemerintah yang berkuasa setelah lenyapnya kolonialisasi.Pengalaman Indonesia sendiri menunukkan bahwa pemerintahan orde lama, rezim yang berkuasa menerapkan sistem ekonomi tertutup dan lebih menguatkan militer dari pada ekonomi.Ini semua menyebabkan ekonomi nasional pada masa itu mengalami stagnasi, pembangunan praktis tidak ada.Walaupun ideology Indonesia adalah Pancasila namun pengaruh ideology komunis pada waktu itu sangat kuat.Indonesia umumnya memilih haluan politik berbau komunis sebagai refleksi dari perasaan anti kolonialisme dan anti imperialisme.Transisi pemerintahan dari orde lama ke orde baru berpenaruh pada paradigma pembangunan ekonomi dari yang berhaluan sosialis ke kapitalis-liberal.Pemerintahan orde baru menjalin kembali hubungan baik dengan Barat dan menjauhi ideologi komunis.Indonesia juga kembali menjadi anggota PBB dan anggota lembaga-lembaga dunia lainnya seperti Bank Dunia dan IMF. IMF yang didirikan sebagai hasil konferensi Bretton Woods pada tahun 1944 secara umum mempunyai tujuan memberi bantuan kepada negara anggota yang membutuhkan. Kesemuanya itu akan dapat memberi peluang memperbaiki ketidakseimbangan neraca pembayarannya tanpa mengambil jalan yang merusak neraca pembayaran nasional atau internasional.

Indonesia dan IMF

Indonesia pada masa orde baru kembali menjadi anggota IMF dilakukan pada masa Kabinet Ampera untuk melaksanakan pokok-pokok kebijakan stabilisasi dan rehabilitasi.Kondisi merupakan awal terjadinya bantuan IMF hingga sekarang.Setiap tahun, Indonesia mendapatkan bantuan dari IGGI (Inter Government Group on Indonesia) yang di dalamnya terkait dengan bantuan Bank Dunia.Sesudah IGGI berubah menjadi CGI,maka di dalamnya juga terkait bantuan IMF dan Bank Dunia dengan bantuan sekitar US$ 5 Milyar setiap tahunnya.Sejak terjadi krisis tahun 1997 Indonesia telah meminta bantuan IMF dengan paket bantuan senilai US$ 23 Milyar.Kondisi perekonomian nasional era orde baru lmenjadi lebih baik karena perubahan pada orientasi kebijakan ekonomi dari sistem sosialis ke sistem kapitalis.

Era reformasi kemudian mewarnai arena perpolitikan dalam negeri, IMF melalui Stanley Fisher (Wakil Dierektur IMF) yang didampingi Hubert Neiss (Direktur IMF untuk Asia Timur dan Pasifik) melakukan wawancara secara terpisah dengan pimpinan lima partai besara waktu itu yaitu PDIP, Golkar, PKB, PPP dan PAN. Dari hasil wawancara dianggap telah mewakili gambaran pemerintahan Indonesia pasca Pemilu 1999.dengan demikian hampir dapat dipastikan bahwa Indonesia masih sangat tergantung pada bantuan luar negeri dan sulit melepaskan diri dari pengaruh IMF .Begitu pula pemerintahan SBY dengan menghadirkan sosok Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan yang notabene mantan pejabat IMF.Ketergantugan yang Tinggi, Pertanyaan yang timbul diajukan berdasar paparan sebelumnya bahwa kenapa Indonesia begitu sangat bergantung pada campur tangan IMF?Dari sisi historis pengalaman Indonesia mengambil haluan ideologi sosialis terbukti telah gagal di samping beberapa faktor. Indonesia kemudian mengambil jalan ekonomi yang terbuka yang dimungkinkannya kerja sama dengan berbagai pihak termasuk IMF.Adam Smith dalam pandangannya menghendaki negara membiarkan kekuasaan membuat keputusan-keputusan ekonomi berada di tangan orang-orang ekonomi itu sendiri.

Jika perekonomian itu bebas maka para pengusaha akan menggunakan modalnya untuk usaha-usaha yang paling produktif dan pembagian pembagian pendapatan dapat menemukan sendiri tingkatnya yang wajar di pasar.Tidak bisa dipungkiri bahwa hingga sekarang tingkat ketergantungan Indonesia kepada pengaruh IMF sangat tinggi, karena pada dasarnya Indonesia terbantu dengan bantuan luar negeri ini. Sistem ekonomi yang liberal memberi potensi bagi suatu negara untuk membuka pintu kerja sama yang luas yang kemudian menjelma menjadi arena transaski internasional secara bebas. Sebagai negara dengan perekonomian terbuka, Indonesia tidak dapat menghindar dari proses globalisasi ekonomi dunia. Dampak utama dari proses globalisasi ekonomi adalah berubahnya konsep perdagangan internasional dalam menentukan pola perdagangan dan produksi suatu negara.Ketergantungan Indonesia yang tinggi semakin terasa ketika Indonesia tidak mampu megatasi sendiri krisisnya yang berujung pada kebutuhan bantuan dari IMF melalui mekanisme utang luar negeri.

E. Utang Luar Negeri Dan Neokolonialisme Indonesia

Sikap pemerintah terhadap utang luar negeri ternyata belum banyak berubah, anjuran koalisi Anti Utang (KAU) agar pemerintah "menghapuskan utang lama dan menolak utang baru", cenderung diabaikan oleh pemerintah.Alih-alih meminta penghapusan utang, sekedar mempercepat pelunasan utang kepada IMF pun pemerintah tampak berat hati.Sikap pemerintah yang sangat bersahabat dengan utang luar negeri dan

IMF itu jelas sangat bertolak belakang dengan kecenderungan internasional mengenai hal tersebut.Sebagaimana diketahui, secara internasional, kritik terhadap utang luar negeri cenderung semakin meningkat.Kritik tidak hanya muncul sehubungan dengan efektifitasnya, tetapi meluas hingga mencakup sisi kelembagaan, sisi ideologi, serta implikasi sosial dan politiknya.Pada sisi efektifitasnya, secara internal, utang luar negeri tidak hanya dipandang menjadi penghambat tumbuhnya kemandirian ekonomi negara-negara Dunia Ketiga. Ia diyakini menjadi pemicu terjadinya kontraksi belanja sosial, merosotnya kesejahteraan rakyat, dan melebarnya kesenjangan (Pearson, 1969, Kindleberger dan Herrick 1977).Sedangkan secara eksternal, utang luar negeri diyakini menjadi pemicu meningkatnya ketergantungan negara-negara Dunia Ketiga pada pasar luar negeri, modal asing, dan pada pembuatan utang luar negeri secara berkesinambungan.

Pada sisi kelembagaannya, lembaga-lembaga keuangan multilateral seperti IMF, Bank Dunia, dan Asian Development Bank (ADB), tidak hanya dipandang telah bersikap tidak transparan dan tidak akuntabel.Keduanya diyakini telah bekerja sebagai kepanjangan tangan negara-negara Dunia Pertama pemegang saham utama mereka, untuk mengintervensi negara-negara penerima pinjaman.Pada sisi ideologinya, utang luar negeri diyakini telah dipakai oleh negara-negara pemberi pinjaman, terutama Amerika, sebagai sarana untuk menyebarluaskan kapitalisme neoliberal ke seluruh penjuru dunia.Dengan dipakainya utang luar negeri sebagai sarana untuk menyebarluaskan kapitaliseme neoliberal, berarti utang luar negeri telah dengan sengaja dipakai oleh negara-negara pemberi pinjaman untuk menguras dunia.Sedangkan pada sisi implikasi sosial dan politiknya, utang luar negeri tidak hanya dipandang sebagai sarana yang sengaja dikembangkan oleh negara-negara pemberi pinjaman untuk mengintervensi negara-negara penerima pinjaman. Secara tidak langsung ia diyakini turut bertanggungjawab terhadap munculnya rezim diktator, kerusakan lingkungan, meningkatkan tekanan migrasi dan perdagangan obat-obat terlarang, serta terhadap terjadinya konflik dan peperangan.

F. Utang dan Imperialisme

Muara dari berbagai kritik tersebut adalah pada munculnya gagasan untuk menelusuri jejak utang luar negeri sebagai sarana imperialisme.Studi pertama yang secara khusus melakukan hal itu adalah yang dilakukan oleh Teresa Hayter.Berangkat dari hasil penelitiannya yang dibiayai Bank Dunia di empat negara Amerika Latin, Columbia, Chile, Brazil, dan eru Hayter kemudian menulis sebuah buku dengan judul "Aid as Imperialism".Dalam buku setebal 222 halaman yang terbit pada 1971 tersebut, Hayter (1971)secara tegas menyimpulkan bahwa "utang luar negeri pada dasarnya bukanlah transfer sumber daya yang bebas persyaratan". Menurut Hayter, hal-hal yang dipersyaratkan dalam pemberian utang luar negeri meliputi : (a) pembelian

barang dan jasa dari negara pemberi pinjaman; (b) peniadaan kebebasan dalam melakukan kebijakan ekonomi tertentu, misalnya, nasionalisasi perusahaan asing; dan (c) permintaan untuk melakukan kebijakan-kebijakan ekonomi "yang dikehendaki", terutama peningkatan peran sektor swasta dan pembatasan campur tangan langsung pemerintah dalam bidang ekonomi.Berdasarkan ketiga persyaratan tersebut, menurut Hayter. "*aid is, in general, available to those countries whose internal political arrangements, foreign policy alignments, treatment of foreign private investment, debt-servicing record, export politicies, and so on, are considered desirable, potentialli desirable, or at least accpetable, by countries or institution providing aid, and which do not appear to threaten their interest*".Selanjutnya, ketika berbicara mengenai IMF, Bank Dunia (dan USAID), Hayter secara jelas menyatakana bahwa sudut pandang ketiga lembaga itu dalam menetapkan syarat pemberian pinjaman cenderung seragam.Fokus kebijakan ketiganya, terutama IMF dan Bank Dunia, senantiasa mengarah pada pengendalian inflasi serta perintah untuk memotong investasi publik dan belanja kesejahteraan. Menurut Hayter, faktor utama di balik kecenderungan tersebut adalah posisi dominan Amerika pada ketiga lembaga itu. Implikasinya, walaupun tidak dinyatakan secara terbuka, dalam memberikan pinjaman, ketiganya tidak hanya mengevaluasi proyek yang akan mereka biayai, tetapi juga negara yang akan menerima pinjaman tersebut.Tujuan pemberian pinjaman oleh Amerika sejak 1960 memang tidak dimaksudkan untuk membantu negara-negara penerima pinjaman, melainkan untuk meringankan tekanan terhadap neraca pembayaran negara tersebut.Kebijakan itu erat kaitannya dengan upaya pemerintah Amerika untuk mensubsidi peningkatan ekspor berbagai barang dan jasa mereka ke seluruh penjuru dunia.

Dalam rangka itu, sebagaimana diakui Perkins (2004), Amerika tidak hanya bekerja melalui mekanisme hubungan ekonomi-politik biasa.Amerika secara terstruktur mengembangkan sebuah porfesi yang dikenal sebagai preman ekonomi (economic hit man), yang bernaung di bawah Badan keamanan Nasional (NSA) Amerika, yang secara khusus bertugas untuk membangkrutkan negara-negara Dunia Ketiga.Tiga catatan penting yang perlu diangkat ke permukaan mengenai keberadaan para preman ekonomi ini adalah sebagai berikut.

Pertama, preman ekonomi bekerja di bawah kordinasi Badan Keamanan Nasional (The National Security Agency).Walau pun secara resmi para ekonomi penjajah direkrut, dilatih, dan bekerja di bawah koordinasi NSA, tetapi secara eporasional mereka dipekerjakan secara terselubung melalui perusahaan-perusahaan swasta Amerika Perkins antara lain menyebut perusahaan-perusahaan seperti Monsanto, General Electric, Nike, general Motors, dan Wal-Mart, sebagai beberapa contoh.

Kedua,misi para preman ekonomi adalah memperoleh komitmen para pejabat negara-negara Dunia Ketiga untuk berbelanja secara kredit ke Amerika.Dalam menjalankan misinya, seorang preman ekonomi diperkenankan melakukan apa pun, termasuk melakukan cara-cara ilegal.Target mereka adalah mendorong para pejabat negara-negara Dunia Ketiga untuk berutang sebanyak-banyaknya, sehingga negara mereka tidak mampu membayarnya.

Ketiga, kegagalan para preman ekonomi bukanlah akhir dari upaya pemerintah Amerika dalam mewujudkan dominasinya.Dua hal dapat terjadi menyusul kegagalan tersebut.Pertama, berlangsungnya operasi CIA, yaitu yang ditandainya oleh terjadinya berbagai peristiwa yang mengarah pada penggulingan atau pembinasaan seorang pejabat negara Dunia Ketiga.Kedua, penaklukan negara-negara Dunia Ketiga yang besangkutan melalui operasi militer.

I. Solusi Utang Luar Negeri

Pertama,Debt swap.Solusi yang paling sederhana mengatasi utang luar negeri adalah dengan mengoptimalkan restrukturisasi utang, khususnya melalui skema debt swap, di mana sebagian utang luar negeri tersebut dikonversi dalam bentuk progran yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, pemeliharaan lingkungan, dan sebagainya.Program debt swap seperti ini sudah dijalankan dengan pemerintah Jerman, sebesar DM50 juta (Rp250 miliar) dari total utang sebesar DM178 juta, yang dikonversi dalam bentuk proyek pendidikan.

Kedua.Diplomasi ekonomi.Menurut Rachbini.1994, masalah utang LN tidak bisa lagi diselesaikan dengan terapi fiskal dan teknis ekonomi belaka.Potensi internal ekonomi kita tidak cukup kuat untuk melayani utang luar negeri yang salah dalam pengelolaannya.Kita tidak bisa secara terus-menerus menjadi "good boy" dengan melayani seluruh cicilan tersebut karena sumber ekonomi dalam negeri akan terus terkuras dan mengganggu kestabilan ekonomi serta politik.Suatu pendekatan diplomasi ekonomi politik harus terus menerus dijadikan program aksi (action program) untuk menghadapi lembaga dan negara donor. Diplomasi ekonomi juga penting dilembagakan dengan sasaran untuk memperoleh keringanan dan penghapusan sebagian hutang sehingga proses pengurasan sumberdaya dapat dihambat.

Ketiga.Adalah cara yang lebih berani seperti yang ditawarkan oleh mantan kepala BAPPENAS Kwik Kian Gie, dalam hal utang luar negeri, harus ada keberanian untuk menggugat dan tidak membayar sesuai jadwal karena pada kenyataanya Indonesia tidak dapat membayar kembali utang dan bunga yang jatuh

tempo. Hutang tersebut hanya bisa dibayar dengan cara melikuidasi kekayaan negara. Dalam hal utang dalam negeri, supaya menarik kembali OR yang masih dalam penguasaan pemerintah melalui bank-bank yang masih milik pemerintah.

Keempat.Adalah cara yang datang dari potensi internal pemerintah sendiri yaitu dengan menjaga kinerja makro-ekonomi dalam posisi yang stabil dan menstop hutang baru.Untuk tawaran terakhir ini, paling tidak terdapat tiga asumsi dasar yang harus dipenuhi agar kita dapat keluar dari debt trap.**Asumsi dasar pertama** adalah laju pertumbuhan ekonomi harus dijaga pada level antara minimum 3% setahun dan maksimum 7% setahun.Angka terakhir pernah tercapai di masa Orde Baru, tetapi didasari oleh penjagaan keamanan yang keras dan otoriter dan arus modal masuk yang puluhan milyar setahun. **Asumsi dasar kedua** adalah menjaga tingkat inflasi tetap rendah-rendah (di bawah 10% setahun, idealnya 6%), medium (sekitar 10% setahun) dan tinggi (di atas 10% setahun)- Semakin rendah inflasi semakin baik oleh karena pengeluaran untuk membayar bunga utang rekap perbankan dalam negeri akan turun banyak, dan inflasi rendah akan merangsang pertumbuhan ekonomi dan masuknya modal dari luar.**Asumsi ketiga** adalah dalam beberapa tahun kedepan diharapkan tidak ada lagi penambahan stock hutang yang ada.Ini berarti bahwa di dalam negeri tidak akan ada krisis perbankan lagi yang mengharuskan pemerintah mengeluarkan obligasi baru untuk menyelamatkan sistim perbankan.Asumsi ini juga berarti tidak ada tambahan utang luar negeri. Maka, kalau laju pertumbuhan ekonomi mulai tahun ini bisa mencapai 7% setahun dan inflasi hanya 6% setahun, dan pemerintah tidak perlu menambah stock utang lagi, maka (pasti) beban angsuran utang turun dan sebagai akibatnya kita tidak perlu lagi membebani generasi mendatang dengan cicilan hutang.Kedepan, untuk mengantisipasi jeratan utang yang sangat membebani bangsa dan negara ini, maka pemerintah harus mempunyai kemauan politik dan itikad baik untuk mengakhiri semua hasrat berhutangnya, dan menolak secara tegas pengaruh dan tekanan dari pihak negara mana pun yang berkepentingan menjerat negara ini dengan utang yang sebesar mungkin.

Utang pemerintah pada saat ini, khususnya utang luar negeri, sudah berperan sebagai faktor, yang mengganggu APBN.Bahkan faktor gangguan yang berasal dari utang luar negeri tersebut sudah menampakkan signal negatif pada pertengahan 1980-an ketika terjadi transfer negatif.Utang pokok dan bunga yang dibayar kepada negara donor dan kreditor ketika itu sudah lebih besar dari utang yang diterima oleh pemerintah.Hubungan utang dengan ekonomi rakyat terlihat pada dimensi APBN sekarang ini, yang sulit dijelaskan sebagai bentuk anggaran suatu pemerintahan yang normal.APBN dengan beban utang yang berat, baik utang luar negeri maupun utang

dalam negeri, merupakan simbol ketidakwajaran dari instrumen kebijakan ekonomi negara ini.Dalam keadaan seperti ini, maka ekonomi masyarakat sangat terganggu.

Pada satu sisi, utang luar negeri Indonesia sudah menjadi beban kronis dari APBN sehingga anggaran negara tersebut tidak memiliki ruang yang memadai untuk manuver.Anggaran pengeluaran habis terkikis oleh pengeluaran untuk utang luar negeri.Dengan demikian, APBN Indonesia sudah menjadi instrumen yang sulit bergerak, kartu mati, dan bahkan mengganggu ekonomi nasional secara keseluruhan.Pada sisi lain, APBN sendiri merupakan instrumen kebijakan pemerintah, yang sangat penting.Tetapi sekarang instrumen tersebut sudah menjadi kartu mati, yang tidak bisa dipakai secara leluasa untuk kepentingan ekonomi masyarakat luas, termasuk kepentingan ekonomi rakyat.

BAB 10
MODAL SOSIAL

Francis Fukuyama (2000)mengatakan bahwa modal sosial sebagai norma informal yang mendorong terjadinya kerjasama diantara dua orang atau lebih.Norma yang mengatur modal sosial bisa berasal dari norma resiprositas (hubungan timbalbalik) diantara dua teman,.Fakta sosial ini selalu ada dan terus meningkat karena adanya modal sosial dan bukan karena aturan/konstitusi modal sosial itu sendiri.Kata kunci dari definisi modal sosial menurut Fukuyama adalah norma informal dan bukan aturan konstitusi formal, ada aktivitas relasi antar dua orang atau lebih, ada resiprositas (hubungan timbal-balik), diwujudkan hanya dalam hubungan yang sangat erat (pertemanan) bukan hubungan formal, dan untuk pencapaian tujuan. Fukuyama membandingkan karakteristik masyarakat Asia Tenggara yang tingkat hubungan sosialnya tinggi dengan masyarakat Eropa dan Amerika yang cenderung individualistik.Partha Dasgupta dan Ismail Sirajudin (2002)menjelaskan modal sosial sebagai keberfungsian aturan sosial, selaras dengan identifikasi fungsi budaya, perasaan saling memiliki dan sepenanggungan, serta norma perilaku yang sama-sama dimiliki dan dilaksanakan. Tanpa adanya ini semua, maka masyarakat dalam ukuran yang lebih besar akan goncang dan berikutnya tidak akan mampu berbicara tentang pertumbuhan ekonomi, keberlangsungan lingkungan atau bagaimana menggapai kesejahteraan sosial bersama. Berdasarkan definisi Parta Dasgupta bersama Ismail Sirajudin di atas, dapat disimpulkan bahwa modal sosial adalah *interpersonal connection* (hubungan antar personal), melalui wadah networks (jejaring), ada norma perilaku bersama yang berfungsi sebagai social order (aturan sosial) bersama, ada budaya bersama, perasaan saling memiliki dan sepenanggungan, sehingga terjaga kesatuan dan kebersamaan, untuk mencapai tujuan bersama yang berupa kesejahteraan sosial bersama .

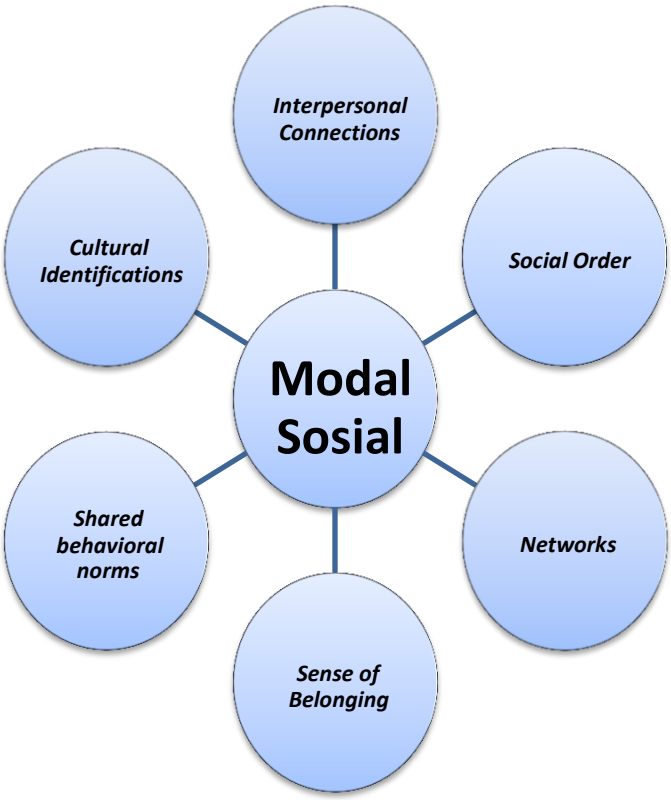

Gambar Model: Modal Sosial Menurut Dasgupta dan Ismail Sirajudin

Berdasarkan berbagai definisi modal sosial menurut lima ahli di atas, modal sosial terdiri atas lima hal, yaitu: (i) *Trust* (saling percaya), (ii) *Norms* (norma), (iii) *Network* (jejaring), (iv) *Reciprocity* (hubungan timbal-balik), (v) Untuk mencapai tujuan bersama.Hal tersebut adalah :

a. Trust (saling percaya) yang mana *Trust* atau saling percaya merupakan komponen penting dari adanya masyarakat. Masyarakat yang pada angggotanya tidak saling percaya, maka akan hancur. Saling percaya muncul tidak dengan tiba-tiba. Saling percaya akan muncul, manakala para anggotanya sudah saling menghargai dan saling jujur. Jadi sub-komponen dari *trust* adalah menghargai dan saling jujur. Maka, dari hal ini, ada larangan berbohong, larangan menghina, merendahkan orang lain, mencaci, memaki. Apabila para anggota masyarakat atau organisasi social sudah saling menghargai dan saling jujur, maka pasti akan muncul *trust* atau saling percaya.
b. Norm (tatanan/pranata sosial yang berlaku), kelembagaan social pada dasarnya menyangkut seperangkat norma atau tata nilai dalam bertindak.

c. Network (jejaring antar anggota) adalah model hubungan diantara para anggota masyarakat atau organisasi sosial. Manusia memang kalau hanya untuk sekedar tidak mati, bisa melakukan berbagai hal secara sendiri. Namun, ia akan mengalami kepayahan yang amat sangat. Bayangkan saja, satu orang jika ingin makan, maka ia harus mencari bahan baku sendiri di hutan lalu menemukan tanaman yang bisa dimakan, untuk memiliki pakaian ia harus membuat pakaian sendiri, dari mulai menanam kapas, memintal, menenun, dan menjahit. Untuk memiliki rumah, ia harus mencari kayu sendiri, menebang pohon sendiri, memikul kayu sendiri, membelah, dan menyerut kayu serta membentuknya menjadi rumah. Betapa payahnya manusia jika demikian. Maka, manusia memerlukan bantuan orang lain. Dalam komteks masyarakat, ada banyak tujuan dari berdirinya masyarakat. Maka, jejaring atau *network* adalah demikian penting bagi mereka. Dengan network, manusia bisa memperoleh keinginan dan memenuhi kebutuhan hidupnya dengan sangat mudah, nyaman, dan efektif serta optimal.
d. Reciprocity (tindakan bersama yang saling memberi respon) merupakan tindakan bersama yang ditunjukkan dengan saling memberi respon. Dalam bahasa lain hubungan timbal-balik. Namun, dalam *resiprocity* tidak mesti dimaknai bahwa jika Si A berkata kepada Si B maka Si B menjawab kepada si A. Bisa saja resiprocity itu Si A ke Si B, si B ke Si C, si C ke Si D, dan Si D ke Si A..
e. Pencapaian tujuan bersama, *Output* dari semua piranti modal sosial adalah untuk mencapai tujuan bersama, baik masyarakat, kelompok maupun organisasi sosial. Manusia adalah makhluk yang bertujuan, semua tindakannya, baik pribadi maupun kolektif adalah untuk alasan tertentu. Maka, dalam konteks kemasyarakatan, pasti ada tujuan-tujuan bersama yang hendak dicapai oleh mereka. Seperangkat tujuan bersama itulah yang merupakan sebab kenapa masyarakat mesti saling percaya (*building trust*), meski membuat aturan yang disepakati bersama (*norms*), dan membuat skema jejaring social (*social network*) yang biasanya berwujud informal, serta *reciprocity* (ada hubungan timbal-balik). Modal sosial bisa berimplikasi buruk dan bisa sebaliknya berimplikasi baik, tergantung maksud dan tujuan yang ingin dikerjakan. Misalnya, dalam komunitas pertanian yang sudah tertata rapi, kemudian muncul sekelompok orang yang ingin mengambil keuntungan sepihak berupa ingin agar tanah pertanian jatuh ke tangan para cukong atau rentenir dan memiskinkan warga. Maka, sekelompok orang itu bersepakat, membuat norma, membuat jejaring untuk mengelabuhi masyarakat, menciptakan *dis-trust* (ketidak saling percayaan), mengiming-imingi sebagian warga agar menjual atau meminjam uang ke rentenir, dan ujungnya adalah tanah pertanian jatuh ke rentenir. Setelah sebagian warga terpengaruh, maka pasti para warga yang lainnya juga akan terjerat —jebakan-jebakan ekonomi

yang diciptakan oleh sekelompok orang tersebut. Dan tidak lama lagi, pasti kita akan menyaksikan warga di situ jatuh posisinya dari petani, menjadi penggarap/buruh, dan kemudian jika cukong atau rentenir itu menyulap lahan pertanian jadi gedung perumahan, maka bisa dipastikan para warga akan terusir dari tanah-tanah yang dahulunya adalah milik mereka itu.

Kajian tentang ekonomi jaringan membahas dan memperkenalkan wawasan jaringan dalam fenomena ekonomi.Sampai 20 tahun lalu,hanya beberapa ekonom telah yakin bahwa banyak mendapatkan wawasan dari pendekatan jaringan.Ini secara bertahap berubah setelah adanya publikasi yang mengangkat minat pada jaringan sosial tidak hanya dalam sosiologi, tetapi juga di bidang ekonomi. Hal ini menjadi penting tentang bagaimana investasi ekonomi pada satu sektor, mampu menghela simpul ekonomi lainnya.Jaringan sosial dalam ekonomi menurut Granovetter dan Swedberg(1973) adalah suatu rangkaian hubungan yang teratur atau hubungan sosial yang sama antara individu-individu atau kelompok-kelompok. Jaringan sosial adalah sebagai suatu pengelompokan yang terdiri atas sejumlah orang, paling sedikit terdiri atas tiga orang yang masing-masing mempunyai identitas tersendiri dan masing-masing dihubungkan antara satu dengan yang lainnya melalui hubungan-hubungan sosial yang ada, sehingga melalui hubungan sosial tersebut mereka dapat dikelompokkan sebagai suatu kesatuan sosial.

Secara sederhana, jaringan sosial sebenarnya merupakan salah satu bentuk strategi dan tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok maupun masyarakat dalam menghadapi lingkungan pekerjaannya yang tidak menentu atau diliputi oleh berbagai keterbatasan- keterbatasan yang dimiliki.Oleh karena itu, konteks jaringan sosial pada suatu komunitas masyarakat dapat dibedakan atas tiga bentuk, yaitu jaringan vertikal (hirarkis), jaringan horizontal (pertemanan), dan jaringan diagonal (kakak-adik).Analisa jaringan sosial dapat diidentifikasi baik pada tingkatan antar individu maupun pada tingkatan struktur.Pada tingkatan antar individu, jaringan sosial dilihat melalui rangkaian hubungan yang khas di antara sejumlah orang dengan sifat tambahan, yang ciri-ciri dari hubungan tersebut digunakan untuk menginterpretasikan tingkah laku sosial dari individu- individu yang terlibat.Sementara pada tingkatan struktur memperlihatkan bahwa, pola atau struktur hubungan sosial dapat meningkatkan dan atau menghambat perilaku orang untuk terlibat dalam bermacam arena dari kehidupan sosial.Oleh karena itu, tingkat ini memberikan suatu dasar untuk memahami bagaimana perilaku individu dipengaruhi oleh struktur sosial.

Hubungan sosial merupakan hasil dari interaksi (rangkaian tingkah laku) yang sistematik antara dua orang atau lebih.Suatu hubungan sosial akan ada jika tiap-tiap

orang dapat meramalkan secara tepat macam tindakan yang akan datang dari pihak lain terhadap dirinya.Disebut sistemik karena terjadinya secara teratur dan berulang kali dengan pola yang sama.Pola dari interaksi ini disebut sebagai hubungan sosial dan hubungan sosial akan membentuk jaringan sosial.Agusyanto (2007) dalam tulisannya tentang jaringan sosial arek-arek Suroboyo mengatakan bahwa jaringan sosial terbentuk dalam masyarakat karena pada dasarnya manusia tidak dapat berhubungan dengan semua manusia yang ada; hubungan selalu terbatas pada sejumlah orang tertentu.Setiap orang belajar dari pengalamannya untuk masing-masing memilih dan mengembangkan hubungan-hubungan sosial yang terbatas jumlahnya dibandingkan dengan jumlah rangkaian hubungan sosial yang tersedia, disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada pada individu yang bersangkutan sehingga dalam usaha peningkatan taraf hidup juga tidak menggunakan semua hubungan sosial yang dimilikinya.

Suparlan (1982) mengatakan ada beberapa hal yang merupakan ciri-ciri utama dari jaringan sosial,yaitu:

1. Titik-titik, merupakan titik-titik yang dihubungkan satu dengan lainnya oleh satu atau sejumlah garis yang dapat merupakan perwujudan dari orang, peranan, posisi, status, kelompok, tetangga, organisasi, masyarakat, negara dan sebagainya.
2. Garis-garis, merupakan penghubung atau pengikat antara titik-titik yang ada dalam suatu jaringan sosial yang dapat berbentuk pertemuan, kekerabatan, pertukaran, hubungan superordinat-subordinat, hubungan-hubungan antarorganisasi, persekutuan militer dan sebagainya.
3. Ciri-ciri struktur. Pola dari garis yang menghubungkan serangkaian atau satu set titik-titik dalam suatu jaringan sosial dapat digolongkan dalam jaringan sosial tingkat mikro atau mikro,tergantung dari gejala-gejala yang diabstraksikan.Contoh dari jaringan tingkat mikro yang paling dasar adalah suatu jaringan yang titik-titiknya terdiri atas tiga buah yang satu sama lainnya dihubungkan oleh garis-garis yang mewujudkan segitiga yang dinamakan *triadic balance* (keseimbangan segitiga); sedangkan contoh dari jaringan tingkat makro ditandai oleh sifatnya yang menekankan pda hubungan antara sistem atau organisasi, atau bahkan antarnegara.
4. Konteks (ruang).Setiap jaringan dapat dilihat sebagai terwujud dalam suatu ruang yang secara empiris dapat dibuktikan(yaitu secara fisik),maupun dalam ruang yang didefenisikan secara sosial,ataupun dalam keduanya.Misalnya,jaringan transportasi selalu terletak dalam suatu ruangan fisik,sedangkan jaringan perseorangan yang terwujud dari hubungan-hubungan sosial tidak resmi yang ada dalam suatu organisasi adalah suatu contoh dari suatu jaringan yang terwujud dalam satu ruang sosial.Jaringan komunikasi dapat digambarkan sebagai sebuah

peta baik secara fisik, yaitu geografis maupun menurut ruang sosialnya, yaitu yang menyangkut status dan kelas sosial.

5. Aspek-aspek temporer. Untuk maksud-maksud sesuatu analisa tertentu, sebuah jaringan sosial dapat dilihat baik secara sinkronik maupun secara diakronik, yaitu baik sebagai gejala yang statis maupun dinamis.

Bila ditinjau dari tujuan hubungan sosial yang membentuk jaringan sosial yang ada dalam masyarakat,maka jaringan sosial dapat dibedakan menjadi tiga jenis.

Pertama, adalah jaringan kekuasaan (*power*),merupakan jaringan hubungan-hubungan sosial yang dibentuk oleh hubungan-hubungan sosial yang bermuatan kekuasaan.Dalam jaringan kekuasaan, konfigurasi-konfigurasi saling keterkaitan antarpelaku di dalamnya disengaja atau diatur oleh kekuasaan.Tipe jaringan ini muncul bila pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditargetkan membutuhkan tindakan kolektif dan konfigurasi saling keterhubungan antarpelaku yang biasanya bersifat permanen.Hubungan-hubungan kekuasaan ini biasanya ditujukan pada penciptaan kondisi-kondisi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.Unit-unit sosialnya adalah artifisial yang direncanakan atau distrukturkan secara sengaja oleh kekuasaan.Jaringan sosial tipe ini harus mempunyai pusat kekuasaan yang secara terus menerus mengkaji ulang kinerja (*performance*) unit-unit sosialnya, dan mempolakan kembali strukturnya untuk kepentingan efisiensi.Dalam hal ini kontrol informal tidak memadai, masalahnya jaringan ini lebih kompleks dibanding dengan jaringan sosial yang terbentuk secara alamiah.Dengan demikian jaringan sosial tipe ini tidak dapat menyandarkan diri pada kesadaran para angotanya untuk memenuhi kewajiban anggotanya secara sukarela, tanpa insentif.

Kedua, jaringan kepentingan (*interest*), merupakan jaringan hubungan-hubungan sosial yang dibentuk oleh hubungan-hubungan sosial yang bermuatan kepentingan.Jaringan kepentingan ini terbentuk oleh hubungan-hubungan yang bermakna pada tujuan-tujuan tertentu atau khusus.Bila tujuan-tujuan tersebut spesifik dan konkret – seperti memperoleh pekerjaan, barang, atau jasa – maka jika tujuan-tujuan tersebut sudah dicapai oleh pelakunya, biasanya hubungan ini tidak berkelanjutan.Struktur yang muncul dari jaringan sosial tipe ini adalah sebentar dan berubah-ubah.Sebaliknya, jika tujuan-tujuan itu tidak sekonkret dan spesifik seperti itu atau tujuan-tujuan tersebut selalu berulang, maka struktur yang terbentuk relatif stabil dan permanen.

Ketiga, jaringan perasaan (*sentiment*), merupakan jaringan yang terbentuk atas dasar hubungan-hubungan sosial bermuatan perasaan, dan hubungan-hubungan sosial itu

sendiri menjadi tujuan dan tindakan sosial.Struktur yang dibentuk oleh hubungan-hubungan perasaan ini cenderung mantap dan permanen.Hubungan-hubungan sosial yang terbentuk biasanya cenderung menjadi hubungan dekat dan kontinyu.Di antara para pelaku cenderung menyukai atau tidak menyukai pelaku-pelaku lain dalam jaringan.Oleh karena itu muncul adanya saling kontrol secara emosional yang relatif kuat antarpelaku (Agusyanto, 1997).

Dalam kenyataan di lapangan, sebuah jaringan sosial tidak hanya dibentuk oleh satu jenis jaringan sosial di atas.Namun, terjadi tumpang tindih antara tiga jenis bentuk hubungan sosial tersebut.Sebuah jaringan sosial dianggap sebagai jaringan kepentingan jika hubungan-hubungan yang terbentuk dalam jaringan sosial tersebut lebih dominan untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan atau kepentingan-kepentingan tertentu.Dua jenis jaringan sosial yang lain, yaitu jaringan kekuasan dan jaringan perasaan tetap ada tetapi tidak dominan. Terdapat empat prinsip utama yang mendasar untuk diketahui, antara lain :

1. Norma dan Jaringan Sosial. Norma sering merujuk pada sekumpulan aturan yang diharapkan dan diikuti oleh anggota masyarakat pada suatu entitas sosial tertentu. Akan tetapi pada prinsip ini, norma mengarah pada gagasan tentang tata berperilaku. Berkaitan dengan jaringan sosial, norma itu seperti aturan main yang dapat berpengaruh pada penyelenggarann jaringan itu sendiri.
2. *The Strength of Weak Ties*. Inti prinsip ini adalah bahwa ikatan yang lemah tidak selalu berimplikasi negatif terhadap jaringan sosial, justru sebaliknya dapat berimplikasi positif. Dalam hal ini ikatan yang lemah tersebut dapat menjadi kekuatan tersendiri dalam membangun jaringan sosial.
3. *The importance of "Structural Holes"*. Prinsip ini tidak terlepas dari pendapat Burt tentang "Ikatan lemah". Ia berpendapat bahwa inti penting dari sebuah ikatan tidak terletak pada kualitas ikatan yang tercipta dalam sebuah kelompok. Akan tetapi lebih pada cara yang dilakukan untuk membangun jaringan. Hal ini karena dengan membangun jaringan seorang individu secara tidak langsung terikat. Selain itu, ia juga menekankan pada keuntungan strategi yang dapat membuat individu terikat dengan berbagai jaringan yang berbeda-beda. Implikasinya adalah arus informasi dapat mengalir dari satu jaringan dengan jaringan lainnya.
4. Interpenetrasi ekonomi dan non-ekonomi. Prinsip keempat ini menekankan pada percampuran antara aktivitas ekonomi dengan non-ekonomi. Hal tersebut kemudian merujuk pada terjadinya "*Social Embedness"* dalam ekonomi. Dimana tindakan ekonomi terhubung atau tergantung pada tindakan atau institusi non-ekonomi, serta proses. Dalam konteks sosiologi sendiri, pembahasannya itu lebih mengarah pada *embedness* tindakan ekonomi di dalam jaringan sosial, budaya, politik dan religi.

Berdasarkan literature yang berkembang, Powell dan Smith-Doerr (1994) mengajukan dua pendekatan yang dapat digunakan untuk memahami jaringan sosial, yaitu:

1. Pendekatan analisis atau abstrak.Pendekatan terhadap jaringan sosial menekankan analisis abstrak pada :
   a. Pola informal dalam organisasi, pada dasarnya area ini memiliki kerangka pemikiran yaitu hubungan informal sebagai pusat kehidupan politik organisasi-organisasi.
   b. Jaringan juga memperhatikan tentang bagaimana lingkungan dalam organisasi diskontruksi. Ini berarti bahwa perhatian lebih banyak tertuju pada segi-segi normative dan budaya dari lingkungan seperti sistem kepercayaan, hak, profesi dan sumber-sumber legitimasi.
   c. Sebagai suatu alat penelitian formal untuk menganalisis kekuasaan dan otonomi,area ini terdiri dari struktur sosial sebagai suatu pola hubungan unit-unit sosial yang terkait(individu-individu sebagai aktor-aktor yang bersama dan bekerja sama)yang dapta mempertanggungjawabkan tingkah laku mereka yang terlibat.
2. Pendekatan perspektif atau studi kasus. Pendekatan perspektif memandang jaringan sosial sebagai pengaturan logika atau sebagai suatu cara menggerakan hubungan-hubungan diantara para aktor ekonomi. Dengan demikian ia dipandang sebagai perekat yang menyatukan individu-individu secara bersama kedalam suatu sistem yang padu. Pendekatan ini lebih pragmatis dan terkait dengan pendekatan antar-disipliner. Pendekatan ini cenderung untuk melihat motif yang berbeda kedalam kehidupan ekonomi seperti analisis jaringan sosial dalam pasar, tenaga kerja, etika bisnis, dan organisasi kelompok bisnis.

   Persamaan antara pendekatan analitis dan pendekatan perspektif didasarkan atas kerangka kerja konseptual dari:
   a) Keterlekatan, resiprositas dan koneksi. Kesemuanya itu merupakan jaringan hubungan bagi setiap tindakan tertentu yang melekat dalam struktur sosial yang lebih luas atau masyarakat sebagai suatu keseluruhan.
   b) Pemakaian bahasa dan model tindakan. Menurut Burt keuntungan informasional dari sosial merupakanakses, pengaturan tempo, dan penterahan.Kedua pendekatan tersebut sama menganggap penting kepercayaan (*trust*) bagi resiprositas dalam jaringan sosial.

Baik pendekatan analitis maupun pendekatan perspektif mempunyai keterbatasan.Keadaan tersebut menyebabkan kedua pendekatan tersebut tidak

mampu melihat kelseluruhan struktur atau bentuk dan isi jaringan sosial secara mendalam.

Pendekatan yang berorientasi abstrak sering terlalu sedikit memberi perhatian pada substansi, lebih menekankan pada struktur (ukuran) dibandingkan isi dari ikatan dari suatu jaringan sosial.Akhirnya dapat memperlihatkan bahwa jaringan sosial itu dapat digunakan untuk menginterpretasikan tingkah laku individu dalam berbagai keadaan sosial.Mitchell J Clyde (1987)mengungkapkan ada dua karakterisktik penting dari jaringan sosial :

1. Karakteristik Morphologi
   Karakteristik ini dilihat dari aspek struktural tingkah laku sosial individu yang ada dalam jaringan,antara lain:
   a. Achorage, totalitas hubungan yang terbentuk dalam suatu jaringan. Biasanya diletakan pada individu tertentu yang tingkah lakunya diamati dan diharapkan dpat diinterpretasikan
   b. Reachability, derajat dimana tingkah laku individu dipengaruhi oleh hubungannya dengan individu lain.
   c. Densitas, derajat dimana terdapat keterhubungan antara individu yang satu dengan yang lain.
   d. Range, menunjuk pada jumlah individu yang melakukan kontak secara langsung dengan individu yang berada dalam jaringan.

Karakteristik morphologi dapat dikatakan sebagai tempat yang berujud dan merupakan tempat yang digunakan dalam penjualan. Misalnya perbedaan dapat kita lihat pada pasar modern dengan pasar tradisional. Atau pada pasar tradisional dengan supermarket. Kedua hal itu saling berlainan. Pasar tradisonal tempatnya tidak sebagus seperti pasar modern. Pasar modern lebih bersih, sedangkan pada pasar tradisional harganya dapat ditawar. Tidak seperti pada pasar modern, yang tidak ada tawar menawarnya.

Peminat dari pasar tradisonal dengan pasar modern pun beragam, kebanyakan di pedesaan lebih banyak peminat pasar tradisional. Karena jarak yang dekat dan harga yang terjangkau, sehingga membuat orang dipedesaan yang kebanyaakan ekonomi menengah kebawah memilih alternatif pasar tradisional. Sedangkan di wilayah perkotaan memilih pasar modern, hal ini karena pasar modern lebih bersih dan tidak ribet, karena mereka tidak perlu menawar.

2. Karakteristik interaksional
   Dilihat dari tingkah laku individu, dari proses interaksi yang terjadi antara satu individu dengan individu lain. Karakteristik jenis ini antara lain :

a) Content, hubungan yang ada antara individu dengan individu lain berdasarkan tujuan tertentu. Content dari hubungan ini dapat dipahami karena berdasarkan norma, kepercayaan dan nilai yang telah disepakati bersama.
b) Directedness, dalam suatu jaringan dapat terlihat apakah suatu hubungan antara individu satu dengan yang lain hanya berupa hubungan yang berorientasi dari satu individu ke individu lain atau sebaliknya (resiprok).
c) Durability, jaringan sosial itu ada jika individu menyadari hak dan kewajiban untuk mengidentifikasi orang lain. Kesadaran akan hubungan ini dapat digunakan untuk suatu tujuan tertentu, untuk mencapai objek tertentu, untuk memperoleh beberapa informasi.
d) Intensitas, hubungan dalam suatu jaringan social dapat dilihat dari derajat dimana individu, dipersiapkan untuk memiliki tanggung jawab atau memiliki kebebasan untuk mengekspresikan haknya dalam hubungannya dengan orang lain.
e) Frekuensi, karakteristik nyata dari interaksi dalam suatu jaringan yang dapat dilihat secara simple dalam kuantitasnya yaitu kontak antar individu dalam jaringan.

Karakteristik interaksional lebih dilihat dari interaksi antara penjual dan pembelinya. Jaman sekarang ada banyak interaksi yang berlangsung, ada yang secara langsung dan tidak langsung. Pada contoh kasus morphologi diatas yaitu pasar tradisional dan pasar modern merupakan pasar yang bertatap muka langsung antara penjual dan pembelinya.

Sedangkan pasar yang tidak langsung ada pada pasar bursa saham atau online shop yang sekarang marak di indonesia. Mereka melihat barang yang ditwarkan lewat internet. Kemudian bagi yang berminat bisa menghubungi pada nomor yang tertera di gambar itu. Setelah mentransfer uangnya maka penjual akan mengirim paketan barang kepada pembeli.

Penjualan ini lebih memiliki resiko dibandingkan dengan yang bertemu secara langsung. Bisa jadi pembelian semacam itu merupakan penipuan, atau mungkin barang yang dipesan tidak sesuai dengan yang diharapkah. Berbeda dengan pasar yang bertemu langsung, pembeli bisa memilih barang yang terbaik untuk dipilih. Agar tidak mengecewakan.

Disiplin kebijakan publik memfokuskan diri pada bagaimana kepentingan masyarakat umum diarahkan untuk mewujudkan tujuan bersama.Kajian

mengenai kebijakan publik meliputi bagaiman para pelaku bersepakat dalam masalah tertentu agar menjadi perhatian bersama.Dalam pembangunan, kebijakan publik menjadi penting karena berperan dalam memandu arah pembangunan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.Dalam kacamata kebijakan publik, pembangunan diartikan sebagai *development*, yang berarti pembangunan yang juga pengembangan dari masyarakat, dan bukan sekadar *construction* sebagai pembangunan fisik semata (Anderson, 1984).

Dalam kebijakan pembangunan, kajian mengenai teknologi menjadi penting, karena dalam praktiknya, ada pengaruh signifikan teknologi (artifak teknis) dalam perubahan masyarakat.Artinya,meskipun kehendak untuk membangun tetap menjadi domain dari pelaku manusia (sebagai inisiator), namun teknologi bisa berperan sebagai mediator dalam mentranslasikan kehendak tersebut kepada pelaku lainnya.Teknologi pun perlu ditata kelola (*governanced)* sebagai bagian dari entitas sosial.Tatakelola teknologi berperan agar teknologi dapat berperan sebagai agen sebuah konstelasi masyarakat (Yuliar, 2009).

Salah satu teori yang berkembang untuk menjelaskan kehadiran teknologi (artifak teknis) dalam sebuah entitas sosial adalah teori jaringan aktor (*actor-network theory*/ ANT).Dalam jejaring tersebut, terdapat simpul-simpul, yang dapat berupa manusia ataupun bukan manusia, keduanya dianggap sebagai aktor.Teori ini mendasarkan pada prinsip simetri umum antara aktor manusia dan aktor non manusia (Yuliar, 2009).Dengan prinsip simetri umum ini, maka atribut aktor dapat diberikan kepada manusia maupun artifak teknis.Pembedaannya adalah bahwa aktor manusia mempunyai kehendak, sedangkan artifak teknis tidak.Dalam sebuah aksi sosial, para aktor manusia menjadi inisiator, dan artifak menjadi mediator (disebut juga sebagai intermediari).Dengan model seperti ini, maka teknologi sebagai artifak teknis dianggap sebagai intermediari dalam suatu jaringan aktor.Teknologi menjadi mediator suatu kehendak aktor tertentu untuk mempengaruhi aksi aktor yang lain (Callon, 1991, Yuliar, 2009).

MODAL SOSIAL DI INDONESIA

Indonesia adalah sebuah negara kepulauan di Asia Tenggara yang memiliki 17.504 pulau besar dan kecil, sekitar 6.000 di antaranya tidak berpenghuni, yang menyebar di sekitar khatulistiwa, dan memiliki iklim tropis. Posisi Indonesia terletak pada koordinat 6° Lintang Utara - 11° Lintang Selatan dan dari 95° Bujur Timur - 141° Bujur Timur.Indonesia juga berada pada zona cincin api yaitu daerah patahan yang rawan gempa.Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia.Indonesia memiliki posisi geografis yang sangat unik dan strategis.Hal ini dapat dilihat dari letak

geografis Indonesia yang berada di antara dua samudera yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasific.Letak geogrfis Indonesia sekaligus berada di antara dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia/Oseania. Di negeri yang besar seperti Indonesia dan dengan kompleksitas persoalannya, dimensi modal sosial hampir diabaikan, jauh berada di luar alam pikir pembangunan. Padahal, di berbagai belahan dunia dewasa ini, kesadaran kan pentingnya faktor tersebut cukup tinggi dan sedang menjadi kepedulian bersama. Modal sosial (*social capital)* diyakini sebagai salah satu komponen utama dalam menggerakkan kebersamaan, ide, kesaling percayaan dan saling menguntungkankan untuk mencapai kemajuan bersama. Sebuah komunitas terbangun karena adanya ikatan-ikatan sosial di antara anggotanya. Kita sering mendengar komunitas petani, komunitas tukang becak, perkumpulan nelayan, asosiasi insinyur dan sebagainya. Kualitas ikatan sosial akan terbangun apabila di antara warga saling berinteraksi pada waktu yang relatif lama dan mendalam. Biasanya kualitas ikatan sosial tadi akan lebih baik apabila sesama warga tergabung untuk melakukan kegiatan-kegiatan bersama dalam berbagai kelompok atau organisasi atau kegiatan kegiatan yang sifatnya sesaat. Adanya ikatan sosial yang kuat akan berujung pada peningkatan kesejahteraan. Modal sosial memegang peranan yang sangat penting dalam memfungsikan dan memperkuat masyarakat modern.

Salah satu bagian dari modal sosial yang sangat berpengaruh dewasa ini adalah modal sosial kepercayaan (*trust)* yang dapat memberikan andil yang besar dalam pembangunan ekonomi masyarakat. Ikatan-ikatan sosial yang ada dalam masyarakat harus direkatkan dengan kepercayaan. Modal dasar dari adanya ikatan sosial yang kuat adalah adanya kerjasama di antara anggota kelompok atau organisasi dalam hal komunitas kelurahan ikatan sosial akan terbanguan apabila ada kerjasama di antara semua warga masyarakat. Kerjasama akan terbangun dengan baik apabila berlandaskan kepercayaan di antara para anggotanya. Jika warga masyarakat saling bekerjasama dan saling percaya yang didasarkan kepada nilai-nilai universal yang ada , maka tidak akan ada sikap saling curiga, saling jegal, saling menindas dan sebagainya sehingga ketimpangan-ketimpangan antara kelompok yang miskin dengan yang kaya akan bisa diminimalkan. Modal sosial saat ini dipandang sebagai bumbu vital bagi perkembangan pembangunan ekonomi masyarakat dunia. Francis Fukuyama menunjukkan hasil-hasil studi di berbagai negara bahwa modal sosial yang kuat akan merangsang pertumbuhan barbagai sektor ekonomi karena adanya tingkat percaya yang tinggi dan kerekatan hubungan dalam jaringan yang luas tumbuh antar sesama pelaku ekonomi (Anonim[1], 2011).

Perkembangan ekonomi yang begitu cepat dialami oleh Asia Timur misalnya tidak terlepas dari kenyataan bahwa mereka memiliki tingkat kohesifitas jaringan yang tinggi. Koneksi-koneksi yang terbentuk di Asia Timur meliputi baik koneksi keluarga maupun koneksi yang berbasis suku-suku dari China. Walaupun berbasis keluarga atau suku, tetapi kelebihan mereka terutama pada pembentukan rasa percaya diri (*networks of trust)* yang dibangun melewati batas-batas keluarga , suku, negara dan agama. Di awal abad ke 21 ini, seiring dengan keterbukaan terus dicanangkan, China telah jauh melangkah maju membangun jaringan-jaringan bisnis secara luas dan memelihara semangat saling mempercayai yang tinggi (Hasbullah, 2006).

Modal sosial (*social capital)* sangat tinggi pengaruhnya terhadap perkembangan dan kemajuan berbagai sektor ekonomi. Di sektor pertanian misalnya, upaya pemerintah terutama di negara-negara agraris Asia, untuk meningkatkan produksi seringkali mengalami kegagalan walaupun berbagai input modal telah mengucur ke pedesaan seperti pupuk, perlatan-perlatan modern, irigasi modern, dan berbagai fasilitas kredit yang melimpah. Tanpa mengabaikan beberapa tekanan struktural, seperti misalnya yang bersumber dari disparitas yang tinggi atas penguasaan lahan, kegagalan meningkatkan produksi sangat berkait erat dengan spektrum modal sosial yang sangat lemah. Faktor ini sama sekali tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah (Putnam, 1993).

Pembangunan industri, baik industri besar, sedang mupun industri kecil akan mengalami hambatan di negara yang memiliki tingkat modal sosial yang rendah. Modal sosial akan menghasilkan energi kolektif yang memungkinkan berkembangnya jiwa dan semangat kewirausahaan di tengah masyarakat, yang selanjutnya akan mendorong berkembangnya dunia usaha. Industri besar yang akan dimiiliki para investor lokal maupun asing akan mungkin bertumbuih kembali di tengah masyarakat yang memiliki tradisi dan nilai kejujuran (*trust)*, terbuka (*positive externalities)*, dan memiliki tingkat empati yang tinggi. Tanpa itu investor akan menghindar karena suasana ketidakjujuran, kebencian, sakwasangka, intrik dan hilangnya toleransi. Faktor ini hampir tidak mendapat perhatian dari umumnya negara-negara berkembang sebagai dari upaya promosi investasi (Fukuyama,1995).

Indonesia mengalami kemiskinan *trust.*Ini tidak selalu berarti kebudayaan suku-suku di Indonesia memiliki rasa saling percaya yang tipis dengan sesama anggota masyarakat dalam keluarga, kelompok dan atau asosiasi yang ada di dalam sukunya.Kepercayaan itu, dalam beberapa hal, ada, tetapi bobot orientasinya yang miskin. Dalam perjalanan waktu dan terutama setelah mengalami lebih dari 30 tahun

Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Soeharto *trust* yang miskin itu mengalami situasi yang bertambah parah. Kehancurannya tidak dapat dielakkan terutama dengan beroperasinya dua mesin penghancur sekaligus yaitu faktor internal kebudayaan (dari dalam entitas sosial itu sendiri) dan oleh faktor-faktor yang berasal dari luar (kebijakan rezim dan perilaku negatif para tokoh masyarakat) (Anonim[2], 2011).

Nilai dan norma yang membentuk pola budaya masyarakat suku-suku Indonesia hampir tidak mengalami revitalisasi dan berusaha menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan zaman. Apa yang dari dulu dilakukan secara turun-temurun hingga kini tetap berlaku, sedikit sekali penyesuain-penyesuain yang sejalan dengan tuntutan baru kehidupan. Ketidak pedulian untuk melakukan revitalisasi budaya ini telah menyebabkan individu-individu yang ada dalam kelompok kebudayaan tersebut semakin baik, tuntutan kebutuhan ekonomi rumah tangga yang semakin berat, maka kohesifitas sosial yang pernah terjalin juga mengalami kehancuran (Hasbullah, 2006).

Kekerasan fisik berwujud pada tindakan represi bagi siapa yang berbicara tidak sejalan dengan apa yang diinginkan oleh pemerintahan otoriter. Dalam situasi seperti ini kemungkinan adanya inisiatif-inisiatif untuk menyatakan ide yang berbeda relatif tertutup. Kemungkinan munculnya kreatifitas yang datang secara sukarela untuk membentuk kelompok-kelompok swadaya mengalami kemandulan. Masyarakat hidup dalam situasi takut untuk berbuat yang tidak sejalan dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah (Putnam, 1993).

Lembaga-lembaga pendidikan formal misalnya, dimana anak-anak dididik guna mendapatkan dan memiliki pengetahuan, dan juga sebagai temapt pembentukan kepribadian dan moralitas yang baik, justru ikut berkontribusi memperlemah tingkat rasa saling mempercayai (*trust)* di tengah masyarakat. Ketidakpercayaan terhadap kejujuran para pengelola lembaga pendidikan tetentu mencapai puncaknya terutama berkaitan dengan komersialisasi dan eksploitasi terhadap orang tua si anak melalui penjualan buku yang harus dibeli oleh orang tua. Di atas semuanya, penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi diduga tetap berlangsung dimana-mana. Di pemerintahan, di lembaga legislatif, di lembaga penegak hukum, di perusahaan-perusahaan BUMN dan di berbagai lembaga dan organisai lainnya, dan berlangsung dalam skala yang massive dan terorganisir. Masyarakat yang kehilangan kepercayaan dan hidup dalam semangat kelompok yang *inward looking* akan mendorong tumbuh suburnya korupsi, tetapi pemerintahan dan masyarakat yang korup juga akan mendorong hilangnya modal sosial. Sesuatu hal yang saling pengaruh mempengaruhi (Anonim[1], 2011).

Para tokoh yang dewasa ini berada di balik konsep modal sosial semuanya menyepakati akan peran penting *trust* sebagai energi pembangunan masyarakat. *Trust* erat kaitannya dan menjadi salah satu unsur dan sumber kekuatan modal sosial. James Coleman (1998) menyatakan, sistem yang terbentuk dari rasa saling percaya merupakan komponen modal sosial sebagai basis dari kewajiban-kewajiban dan harapan masa depan. Putnam (1993) lebih jauh mengemukakan bahwa *trust* atau perasaan saling mempercayai, merupakan sumber kekuatan modal sosial yang dapat mempertahankan keberlangsungan perekonomian yang dinamis dan kinerja pemerintahan yang efektif. Suatu bangsa atau masyarakat yang kurang memiliki atau telah kehilangan rasa saling mempercayai, akan menjadi lemah dan sulit keluar dari berbagai krisis yang dihadapinya. Dinamika kehidupan masyarakat akan cenderung tumpul. Kegiatan lembaga kemasyarakatn dan perkumpulan-perkumpulan yang terbentuk di tengah masyarakat akan kehilangan orientasi dan jati diri. Mereka akan dihadapkan pada beragam kesulitan dalam melakukan berbagai kegiatannya secara efisien dan efektif. Rasa saling percaya adalah ruh dari institusi sosial.

Negara yang memiliki tingkat rasa saling percaya rendah (*low trust)* disebabkan oleh pola budaya yang berkembang terutama kaitannya dengan budaya yang terbiasa menempatkan rasa saling mempercayai hanya pada lingkungan keluarga dan kalangan teman dan relasi yang sangat terbatas. Dengan kata lain, suatu masyarakat yang memiliki pola budaya dengan rentang rasa percaya yamg pendek cenderung akan memiliki modal sosial yang lemah dan memperlemah masyarakat atau negara tersebut. Ini umumnya terjadi pada negara atau daerah yang masih terbelakang dengan pola-pola kehidupan tradisional yang masih kuat mendominasi nilai, norma dan pandangan hidup masyarakatnya (Hasbullah, 2006). Modal sosial (*social capital)* sangat tinggi pengaruhnya terhadap perkembangan dan kemajuan berbagai sektor ekonomi. Pembangunan industri, baik industri besar, sedang mupun industri kecil akan mengalami hambatan di negara yang memiliki tingkat modal sosial yang rendah. Modal sosial akan menghasilkan energi kolektif yang memungkinkan berkembangnya jiwa dan semangat kewirausahaan di tengah masyarakat, yang selanjutnya akan mendorong berkembangnya dunia usaha.

Indonesia mengalami kemiskinan *trust.* penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi diduga tetap berlangsung dimana-mana. Di pemerintahan, di lembaga legislatif, di lembaga penegak hukum, di perusahaan-perusahaan BUMN dan di berbagai lembaga dan organisai lainnya, dan berlangsung dalam skala yang massive dan terorganisir. Suatu bangsa atau masyarakat yang kurang memiliki atau telah kehilangan rasa saling mempercayai, akan menjadi lemah dan sulit keluar dari

berbagai krisis yang dihadapinya. *Trust* atau perasaan saling mempercayai, merupakan sumber kekuatan modal sosial yang dapat mempertahankan keberlangsungan perekonomian yang dinamis dan kinerja pemerintahan yang efektif.

BAB 11
EKONOMI BERKELANJUTAN

Pada prinsipnya konsep pembangunan berkelanjutan menyatakan bahwa pembangunan generasi sekarang tidak memerlukan pengorbanan atau kompromi dari generasi mendatang berupa kesejahteraan sosial yang lebih rendah daripada kesejahteraan generasi sekarang. Di sini, bantuan sosial berarti kesejahteraan ekonomi, kesejahteraan sosial termasuk kesehatan dan pendidikan, dan perlindungan lingkungan.

Memahami unsur-unsur yang diperlukan pembangunan berkelanjutan dan unsur-unsur yang diperlukan dan sarana pembangunan berkelanjutan (Pembangunan Berkelanjutan) untuk membuat rencana pembangunan berdasarkan konsep pembangunan berkelanjutan diperlukan. Untuk itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah menunjukkan unsur-unsur pelaksanaan pembangunan berkelanjutan baik pada tingkat pembangunan nasional maupun pada tingkat pembangunan daerah (provinsi, kabupaten, kota).

A. Pembangunan Berkelanjutan

Konsep pembangunan berkelanjutan menjadi populer setelah diumumkan oleh Komisi Brundtland yang dipimpin oleh Perdana Menteri Norwegia Gro Harlem Brundtland. Ia bekerja sejak Oktober 1984 hingga Maret 1987 dan melahirkan buku "The Common Future" yang diterbitkan oleh World Commission on Environment and Development (WECD) pada tahun 1987 (Ismid Hadad, 2010).

Selama abad ke-20 terjadi 2 (dua) revolusi yang berkaitan dengan peran lingkungan dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Revolusi pertama (1) 1960-1970. pada tahun-tahun lahirnya paradigma, konflik antara konsep pertumbuhan dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, dimana setiap pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia selalu diikuti dengan penggunaan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan (Meadows, Donella dan Meadows, Nancy, 1972). Meadows and Meadows yang termasuk dalam kelompok Roma, menulis buku "Limits to Growth". Buku itu mengatakan bahwa jika tingkat konsumsi masyarakat tidak menurun pada saat itu, maka dalam 100 tahun dunia akan runtuh, karena sumber daya alam akan habis dan lingkungan akan sangat tercemar dan rusak parah.

Konsep pembangunan berkelanjutan, yang didefinisikan sebagai pembangunan masa kini yang tidak memerlukan kompromi untuk generasi mendatang, lahir pada tahun 1987 pada pertemuan bangsa-bagsa di Norwegia yang diketuai oleh Perdana Menteri Norwegia Gro Harlem Brundtland. di waktu itu seolah-olah terjadi revolusi pembangunan nasioanal ke 2 (kedua) dengan argumentasi bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya merusak lingkungan, tetapi pembangunan ekonomi dan pembangunan lingkungan dapat bersinergi, sehingga kemakmuran yang benar dan diinginkan itu benar-benar tercapai. Pembangunan ekonomi mengarah pada peningkatan pendapatan nasional, yang memberi negara kemampuan untuk melestarikan lingkungannya, sehingga tidak mengalami kerusakan. Sebaliknya, kondisi lingkungan yang baik tidak menyerap sumber daya pembangunan tetapi menopang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya (Pearce dan Warford, 1993).

B. Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan

Di antara berbagai uraian di atas untuk mengembangkan rencana keberlanjutan, diperlukan beberapa. Pertama, harus tersedia modal pembangunan yang cukup, berupa modal manusia yang handal, modal buatan manusia yang cukup tersedia, dan modal lingkungan termasuk sumber daya alam dan lingkungan yang berkualitas baik. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana menyediakan ketiga jenis modal tersebut. Sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk melaksanakan pengembangan dan perumusan rencana dan kebijakan membutuhkan manusia yang cerdas dan beretika. Orang yang cerdas tetapi tidak bermoral akan lebih suka menggunakan kecerdasannya untuk menipu, menindas dan mengeksploitasi orang lain; Sebaliknya, orang yang berakhlak namun kurang arif akan menjadi sasaran perbuatan tercela seperti penipuan, penipuan, dan perampasan hak orang lain. (Jaetun, HS, 2014).

Padahal, sumber daya manusialah yang menjadi kunci keberhasilan pembangunan berkelanjutan, yaitu membutuhkan orang-orang yang benar-benar cerdas dan berbudi luhur, masalah permodalan baru tidak lagi muncul. Indonesia yang dibangun di atas sumber daya alam dan hutang, tidak lagi terancam oleh kutukan sumber daya alam, karena sumber daya alam diubah menjadi sumber daya manusia yang andal, terdidik, berilmu, jujur, dan bebas korupsi. Untuk modal buatan, perlu difokuskan pada pembangunan infrastruktur berupa pembangunan transportasi dan infrastruktur seperti jalan raya, pelabuhan laut, bandar udara, sungai serta fasilitas komunikasi dan koneksi lalu lintas yang tersedia secara lengkap dan sinkron. disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah. Infrastruktur adalah otot ekonomi yang harus hidup dan kuat agar ekonomi tumbuh kuat dan cepat. Untuk modal lingkungan dan sumber daya alam, diperlukan upaya eksplorasi terus menerus

untuk menemukan cadangan energi dan sumber daya mineral lainnya. Menciptakan suasana yang mendorong eksploitasi sumber daya alam yang dapat digunakan sebagai bahan baku dan bahan penolong kegiatan industri. Sektor energi Indonesia harus menggunakan sumber energi non-fosil (biofuel) yang semakin dibutuhkan akibat energi fosil yang semakin langka. Jenis energi terbarukan seperti biofuel dan sumber daya angin (wind), sumber daya panas bumi, dll. untuk meningkatkan penggunaannya.

C. Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan: Konsep dan Pemikiran

1. Dimensi Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan

Perekonomian dunia kini memasuki era baru atau abad baru (abad ke-3), dimana fokus kegiatan ekonomi dunia bergeser ke kekuatan baru, yaitu Asia; dan itulah mengapa abad ini disebut juga abad Asia. ADB dalam studi "Asia 2050: Realizing the Asian Century" (ADB, 2011), menyajikan dua kemungkinan skenario prospek perekonomian Asia 40 tahun mendatang, yaitu skenario optimis dan skenario pesimis dengan munculnya middle income trap. Pada skenario pertama (skenario Asian Century), kontribusi Asia terhadap PDB global diperkirakan setengahnya, sedangkan pada skenario middle income trap, Asia akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang moderat, sehingga kontribusinya terhadap PDB dunia hanya 30%. Perkembangan ini sejalan dengan peningkatan pendapatan per kapita dan bertambahnya jumlah orang Asia yang kaya.

Di bawah dua skenario ini, tantangan terhadap pembangunan ekonomi di masa depan akan semakin berat, dan keberhasilan transisi ke abad Asia membutuhkan model pembangunan berkelanjutan yang baru. Dalam kaitan ini, beberapa aliran pemikiran menunjukkan bahwa aspek pembangunan tidak hanya menyangkut pencapaian kesejahteraan/pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan dan

keadilan sosial, tetapi juga terkait dengan sinkronisasi kebijakan/kelembagaan. Keempat dimensi tersebut saling bergantung dan saling menguatkan.

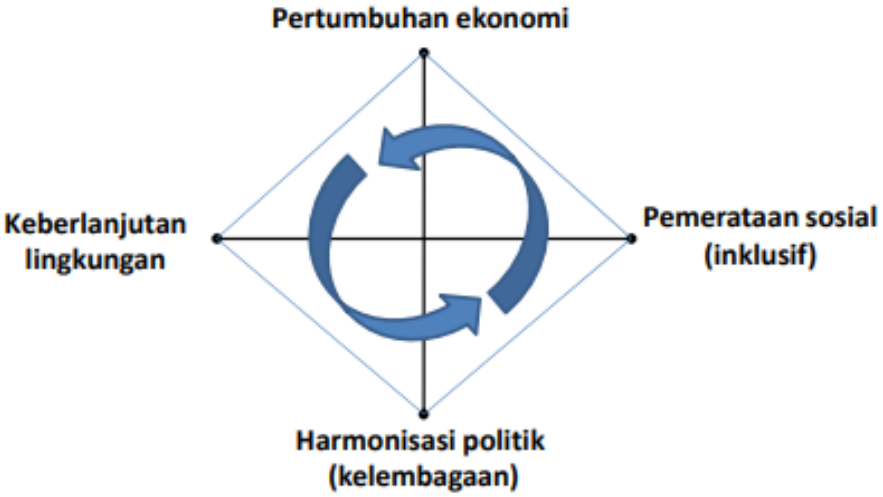

Gambar 11.1Dimensi Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan

Berkaitan dengan keempat aspek tersebut, beberapa tantangan pembangunan ke depan yang perlu diantisipasi adalah bagaimana menyusun strategi kebijakan yang tepat dan terkoordinasi untuk:

(i) menyeimbangkan sumber pertumbuhan ekonomi (rebalancing sources of growth);
(ii) mencapai pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan;
(iii) mencapai pembangunan sosial yang inklusif; dan
(iv) mendukung harmonisasi pembangunan daerah (harmonisasi politik).

Untuk itu, otoritas politik dari berbagai negara harus lebih serius dalam mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan terkait dengan keempat aspek tersebut. Di tingkat nasional, strategi kebijakan harus bertujuan antara lain untuk:

(i) mencapai pertumbuhan ekonomi yang kuat dan inklusif;
(ii) menciptakan sistem keuangan yang stabil;
(iii) mengurangi intensitas penggunaan energi dan sumber daya alam;
(iv) mendukung kewirausahaan, inovasi dan pengembangan teknologi; dan
(v) meningkatkan tata kelola dan struktur kelembagaan. Sementara itu, di tingkat kawasan, beberapa kajian menunjukkan pentingnya penguatan kerja sama

kawasan untuk mendorong stabilitas sistem keuangan, pertumbuhan ekonomi yang seimbang, kesiapsiagaan bencana dan isu energi serta melindungi kepentingan publik (Kawai, 2012).

Dengan pemikiran ini, koordinasi kebijakan di antara badan-badan politik lainnya menjadi sangat penting. Hal ini dapat dilakukan dalam kaitannya dengan empat aspek pembangunan berkelanjutan, antara lain sebagai berikut (Juhro, 2013).

(i) Kebijakan reformasi struktural untuk meningkatkan potensi pertumbuhan permintaan domestik (dan daerah). Untuk membantu pengelolaan keseimbangan internal dan eksternal, kebijakan ini harus diselaraskan dengan strategi utama penguatan struktur perekonomian.
(ii) Kebijakan penghapusan/pengurangan subsidi energi/BBM merupakan sinyal untuk mengurangi konsumsi BBM. Kebijakan ini harus dibarengi dengan program subsidi khusus bagi masyarakat miskin. Selain upaya menjaga kelestarian lingkungan, terdapat kebijakan industri untuk mendorong respons sisi penawaran, khususnya di bidang energi, transportasi, pertanian, dan ketahanan pangan.
(iii) Kebijakan ekonomi inklusif untuk mengurangi ketimpangan pendapatan dan kesempatan berusaha, termasuk diantaranya melalui peningkatan akses pada kredit dan sumber pembiayaan lainnya kepada seluruh lapisan masyarakat.

Penguatan kerjasama antar negara di kawasan regional dan internasional, yang menjamin keharmonisan hubungan, meminimalisir potensi konflik, dan menciptakan fondasi politik untuk tercapainya keamanan dan kedamaian kawasan.

2. Strategi Pembangunan Ekonomi: Export-Led vs. Domestic Demand-Led

Sebelum krisis keuangan global 2008/09, strategi pertumbuhan ekonomi global lebih didominasi oleh model export-led growth. Model ini muncul sebagai bagian dari konsensus umum di antara para ekonom dunia untuk mendapatkan keuntungan dari keterbukaan ekonomi (konsensus Washington). Krisis keuangan global tahun 2008/09 mengakibatkan melemahnya permintaan global secara mendalam dan berkepanjangan. Perkembangan perekonomian dunia pasca krisis keuangan global tahun 2008/09 telah memfasilitasi munculnya model terkait strategi pengelolaan pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh permintaan domestik (growth driven by domestic demand).

Seperti yang ditunjukkan Palley (2011), negara berkembang perlu mendorong ekspor. Namun, sistem perdagangan internasional tidak hanya berfungsi untuk

memberikan keunggulan kompetitif tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam hal ini, pertumbuhan permintaan domestik harus bertumpu pada empat pilar, yaitu:

(1) meningkatkan distribusi pendapatan;
(2) tata kelola yang baik;
(3) stabilitas sistem keuangan; dan
(4) menyediakan pembiayaan pembangunan yang cukup merata.

Kebijakan yang harus ada untuk menempatkan pilar-pilar tersebut antara lain:

(1) demokrasi dan hak-hak buruh;
(2) reformasi keuangan;
(3) kombinasi yang tepat antara pengampunan utang, peningkatan bantuan luar negeri, dan peningkatan bantuan pembangunan.

Berdasarkan pengalaman negara-negara berkembang, diyakini sulit untuk mengetahui sumber pertumbuhan ekonomi yang riil/potensial. Bukti nyata di beberapa negara Asia juga menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan sukses memerlukan dukungan permintaan domestik yang kuat dan ekspor bersih (Felipe dan Lim, 2005). Melihat kenyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa strategi pembangunan ekonomi tidak dapat mengabaikan strategi ekspor, dan hal ini harus diikuti dengan peningkatan permintaan domestik. Selain itu, konfigurasi politik harus diorientasikan untuk menghadapi masalah ketimpangan internal dan eksternal. Dari perspektif kebijakan bank sentral, hal ini berarti mengintegrasikan stabilitas moneter dan kerangka kebijakan sistem keuangan (Juhro, 2012).

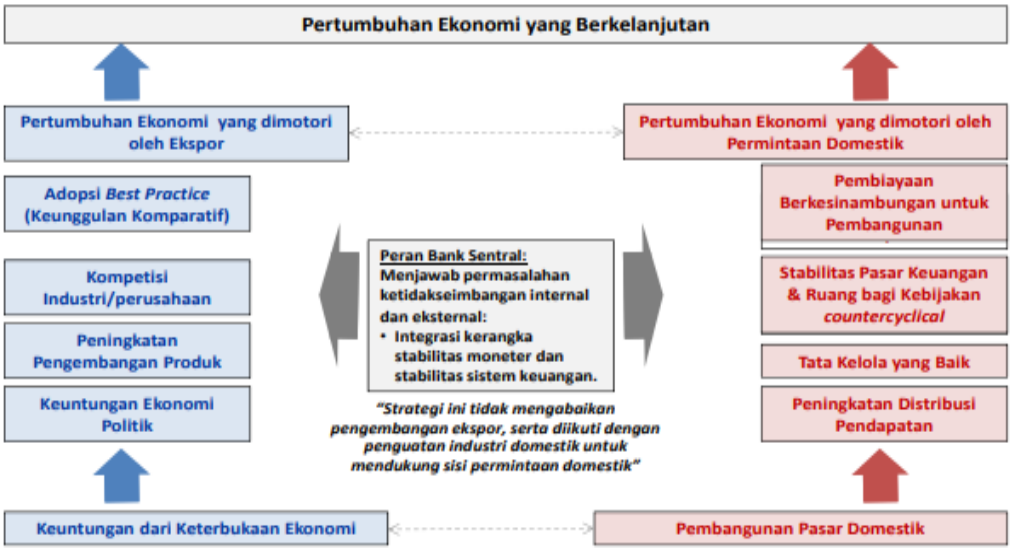

Sumber: Palley (2011) dan Juhro (2012)

Gambar 11.2 Integrasi SM dan SSK dalam Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan

D. Kunci keberhasilan nasional:

1. Memperkuat institusi ekonomi dan politik yang inklusif

Perkembangan teori institusi inklusif diprakarsai oleh Acemoglu dan Robinson (2012). Acemoglu dan Robinson, dalam studi mereka terhadap sekitar 70 negara di seluruh dunia selama periode 1000 tahun, menyimpulkan bahwa baik budaya, iklim, geografi, kepatuhan terhadap kebijakan yang benar, maupun agama. Agama tidak menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu negara. Keberhasilan atau kegagalan suatu negara ditentukan oleh baik buruknya pengelolaan lembaga ekonomi dan politik. Tesis utama Acemoglu dan Robinson menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan lebih mungkin terjadi di negara-negara dengan institusi inklusif, bukan ekstraktif.

Dalam kaitan ini, ada empat kondisi kelembagaan yang tercipta sesuai dengan pilihan masyarakat, yaitu:

(iv) Lembaga ekonomi ekstraktif. Kondisi dengan tatanan hukum dan peraturan yang lemah, tidak ada jaminan hak cipta, larangan atau peraturan menyebabkan disfungsi pasar dan menciptakan lingkungan bisnis yang tidak menguntungkan.

(v) institusi politik ekstraktif. Kondisi terbatasnya akses otoritarianisme, terutama

ketika institusi politik mendorong terjadinya konsentrasi kekuasaan pada segelintir orang/kelompok, tanpa regulasi yang baik dan check and balances.

(vi) Lembaga ekonomi inklusif. Kondisi yang menjamin hak cipta, peraturan dan perundang-undangan, dukungan pemerintah (utilitas dan peraturan) untuk operasi pasar, keterbukaan terhadap kegiatan baru, serta akses pendidikan dan peluang kemajuan yang tinggi bagi masyarakat pada umumnya.

(vii) institusi politik ekstraktif (inclusive political Institutions). Kondisi di mana lembaga politik memungkinkan pluralisme dan partisipasi luas masyarakat, menetapkan aturan dan memeriksa dan berimbang dengan politisi. Selain itu, sampai batas tertentu, terdapat sentralisasi politik bagi negara untuk dapat menegakkan peraturan dan hukum secara kolektif.

Acemoglu dan Robinson berpendapat bahwa ada sinergi yang kuat antara institusi ekonomi dan politik. Dalam hal ini, sinergi kelembagaan (ekonomi dan politik) yang menyeluruh akan menciptakan lingkaran kebaikan yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, melalui:

(i) mendorong investasi dan inovasi, melalui perlindungan hak cipta;

(ii) mendorong pasar agar berfungsi dengan baik, yaitu alokasi sumber daya yang lebih baik, masuknya perusahaan yang lebih efisien ke pasar, kapasitas keuangan untuk mendukung perusahaan baru;

(iii) partisipasi masyarakat luas dalam kegiatan pembangunan, termasuk kegiatan pendidikan dan bisnis. Dengan distribusi kekuasaan yang lebih luas, institusi inklusif cenderung membangun institusi ekonomi yang menyelaraskan penggunaan sumber daya potensial yang lebih luas, menghilangkan hambatan untuk masuk, dan mendorong tren Arah operasi pasar dapat bermanfaat secara luas.

Di sisi lain, lembaga politik ekstraktif mengkonsentrasikan kekuasaan pada kelompok elite dan cenderung memberikan kekuasaan diskresioner kepada mereka yang berkuasa. Demikian pula, lembaga ekonomi ekstraktif didominasi oleh sekelompok elit yang cenderung mengeksploitasi sumber daya untuk merugikan kepentingan publik. Maka sewajarnya kedua lembaga ekstraktif tersebut akan bekerja sama untuk menjamin kelangsungan kegiatannya yang jika tidak akan mendistorsi kepentingan masyarakat luas.

Sinergi antara institusi ekonomi dan politik ekstraktif juga akan menciptakan lingkaran umpan balik (vicious circle) yang kuat. Dalam hal ini, institusi politik yang memungkinkan elit untuk mengontrol kekuasaan mengatur/memilih institusi ekonomi memiliki kapasitas dan kapasitas perlawanan yang relatif terbatas. Mereka

juga dapat mengelola perubahan/perubahan struktur lembaga politik. Sebaliknya, lembaga ekonomi ekstraktif cenderung memperkaya elit lain, dan kekayaan serta kekuasaan mereka memungkinkan mereka mengkonsolidasikan dominasi politik mereka.

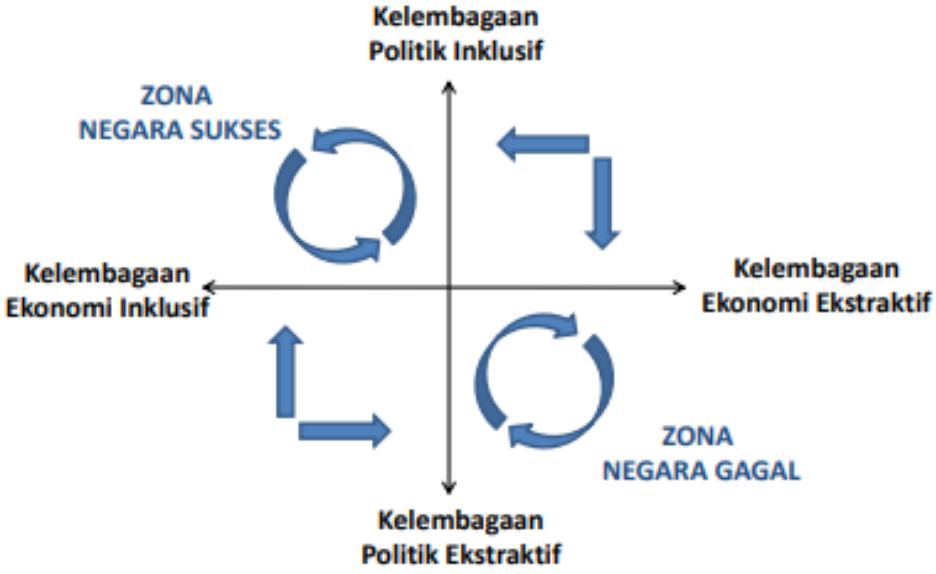

Gambar 11.3 Keterkaitan Kelembagaan Ekonomi dan Politik

Seperti halnya di banyak negara, kombinasi antara institusi ekstraktif dan inklusif umumnya tidak stabil dan tidak berkelanjutan. Meskipun kemungkinan besar terjadi pada institusi inklusif, pertumbuhan ekonomi dapat terjadi pada institusi ekstraktif. Hal ini disebabkan kemampuan untuk menemukan sumber daya dan menghasilkan output. Institusi ekonomi ekstraktif dapat mengalokasikan sumber daya untuk kegiatan yang sangat produktif yang dikendalikan oleh kelompok elit yang memegang posisi penting/aman (kasus Soviet, Barbados), serta menyediakan ruang untuk pengembangan institusi ekonomi yang relatif inklusif di bawah kendali mereka (kasus Korea di bawah kendali mereka). kepemimpinan General Park, Cina pada saat itu). Perbedaan besar dengan pencapaian pertumbuhan ekonomi dalam lembaga-lembaga inklusif adalah bahwa tidak ada penghancuran kreatif pada penggerak ekonomi (aktivitas investasi). Dengan demikian, meskipun dengan kombinasi kelembagaan ekstraktif dan inklusif dapat dicapai pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi, namun kondisi ini tidak akan berkelanjutan.

2. Strategi Kebijakan untuk Mencapai Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan

Sehubungan dengan berbagai tantangan perekonomian yang telah diuraikan di atas, maka perlu disusun suatu strategi kebijakan yang terintegrasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, antara lain:

(i) Pertama, strategi dan kebijakan harus memadukan banyak kepentingan untuk mendorong sumber daya bagi pertumbuhan ekonomi secara seimbang, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan; termasuk energi dan pangan, mendorong kegiatan ekonomi inklusif dan mendukung penguatan kelembagaan.

(ii) Kedua, strategi politik harus menjawab aspek persoalan ketimpangan internal dan eksternal. Kompleksitas permasalahan yang dihadapi membutuhkan koordinasi (blending) kebijakan moneter, fiskal, dan ekonomi makro.

(iii) Ketiga, implementasi strategi kebijakan mencakup visi jangka pendek dan jangka menengah. Dari perspektif jangka pendek, strategi kebijakan harus diarahkan untuk mengelola siklus bisnis dari sisi permintaan melalui kebijakan countercyclical dengan tujuan menjaga stabilitas ekonomi makro (misalnya kebijakan moneter), dan kebijakan makroprudensial). Sementara itu, dalam perspektif jangka menengah dan panjang, strategi kebijakan juga harus diarahkan untuk meminimalkan kemungkinan guncangan ekonomi, dan pada saat yang sama meningkatkan kapasitas perekonomian untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan mempercepat reformasi struktural, baik di sektor riil maupun keuangan.

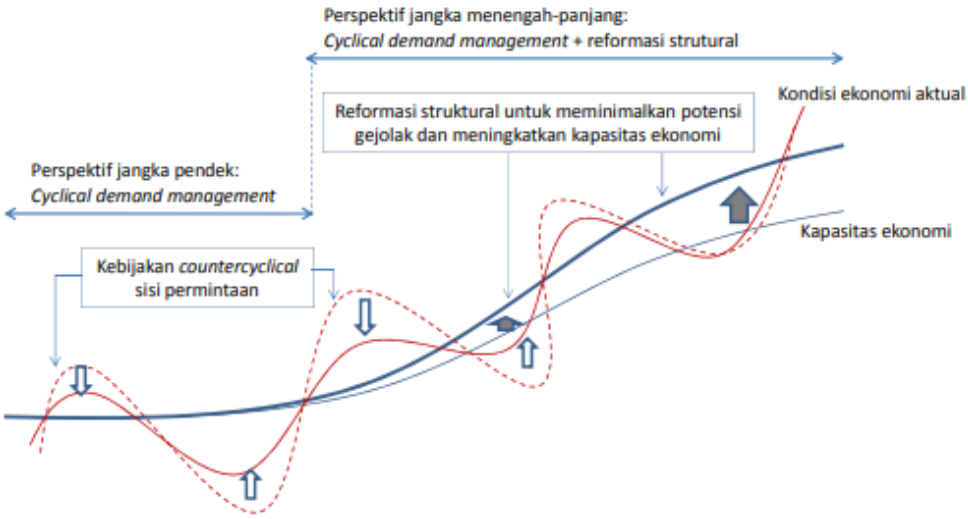

Sumber: Juhro (2015)

Gambar 11.4 Strategi Kebijakan Untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan

3. Kebijakan Countercyclical: Integrasi Stabilitas Moneter dan Stabilitas Sistem Keuangan

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan merupakan unsur kesinambungan yang sangat penting untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Dinamika yang terjadi pada krisis keuangan global 2008/09 menunjukkan bahwa kebijakan moneter harus semakin diarahkan untuk mengantisipasi risiko instabilitas ekonomi makro yang bersumber dari sistem keuangan. Hal ini berimplikasi bahwa pengelolaan ekonomi makro yang sehat juga harus memperhatikan stabilitas sistem keuangan sebagai landasan untuk menciptakan lingkungan ekonomi makro yang berkelanjutan. Dari perspektif kebijakan tersebut, dalam rangka memperkuat kerangka stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan, bank sentral perlu lebih kreatif dalam merespon ketidakpastian yang muncul dalam perekonomian di luar pemahaman umum. Dalam kaitan ini, perumusan kebijakan bank sentral harus mempertimbangkan peran strategis kebijakan moneter dan sistem keuangan. Bahkan, strategi penggabungan kebijakan dalam kerangka yang lebih luas, tidak hanya moneter dan makroprudensial, mulai diterapkan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas makroekonomi pasca krisis keuangan global mainstream 2008/09.

Implementasi strategi bauran kebijakan merupakan bentuk remediasi strategis dan respon terhadap berbagai perubahan struktural dan tantangan lingkungan ekonomi pasca krisis di mana bank sentral diharapkan memiliki peran yang lebih komprehensif, tidak terbatas. stabilitas harga di pasar komoditas, tetapi juga stabilitas sistem keuangan. Dalam konteks ini, Bank Indonesia perlu lebih fleksibel dalam mengantisipasi berbagai perubahan dan profil risiko yang terbentuk dan dapat mengganggu keseimbangan internal dan eksternal. Strategi yang memadukan kebijakan makroprudensial dan moneter diwujudkan dengan mengoptimalkan penggunaan seluruh perangkat yang tersedia secara terukur, baik dari segi ukuran maupun durasi (time and sequence).

Dari sisi pengelolaan keseimbangan internal dan eksternal, Bank Indonesia telah berhasil menerapkan strategi bauran kebijakan, baik melalui kebijakan suku bunga, nilai tukar dan nilai tukar valuta asing, keamanan dan keselamatan makro secara keseluruhan. Secara ringkas, cakupan bauran kebijakan selama lima tahun terakhir adalah sebagai berikut:

(i) Pertama, menetapkan suku bunga kebijakan (BI rate) sebagai sinyal komitmen dan upaya Bank Indonesia untuk mencapai sasaran inflasi ke depan. Hal tersebut juga didukung oleh penguatan operasi moneter untuk mendukung transmisi kebijakan moneter.

(ii) Kedua, menstabilkan nilai tukar Rupiah sesuai dengan prinsip dasar ekonomi. Langkah tersebut juga sejalan dengan optimalisasi pengelolaan cadangan devisa pada level yang memberikan lindung nilai terhadap potensi pembalikan yang mengganggu stabilitas ekonomi makro.

(iii) Ketiga, penerapan kebijakan makroprudensial, baik mengelola likuiditas sesuai kebutuhan perekonomian, maupun mengelola dinamika aliran modal asing guna meminimalkan risiko pembalikan modal dan mendukung pertumbuhan ekonomi financial shortfall.

(iv) Keempat, memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah dalam pengendalian inflasi dan stabilisasi sistem keuangan serta penguatan kebijakan struktural.

(v) Kelima, memperkuat strategi komunikasi untuk mengelola persepsi masyarakat terhadap prospek ekonomi ke depan.

Perlu dicatat bahwa efektivitas implementasi strategi bauran kebijakan sangat bergantung pada karakteristik tantangan perekonomian yang dihadapi. Oleh karena itu, respons kebijakan Bank Indonesia berkembang secara dinamis untuk mengakomodir perubahan tantangan dan risiko yang dihadapi. Di tengah ketidakpastian yang besar, kombinasi kebijakan yang tetap fokus untuk menjaga stabilitas makroekonomi diyakini akan bermanfaat bagi upaya pencapaian pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Sehubungan dengan itu, Bank Indonesia juga akan memastikan bahwa keseluruhan kerangka kebijakan ekonomi makro konsisten dan sepenuhnya mencerminkan kualitas pengelolaan ekonomi makro. Kualitas ini merupakan prasyarat paling mendasar bagi munculnya optimisme terhadap prospek ekonomi ke depan.

Berbagai tantangan struktural dapat membatasi ruang gerak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan transisi Indonesia menjadi negara maju masuk akal bagi urgensi implementasi kebijakan reformasi struktural yang kuat dan ketat. Dengan dukungan kebijakan countercyclical yang ditujukan untuk menjaga stabilitas sistem moneter dan keuangan, seluruh upaya reformasi struktural tersebut harus ditempatkan dalam rangka penguatan daya saing perekonomian, khususnya di sektor industri, mewujudkan kemandirian dalam pembangunan ekonomi, khususnya di bidang ekonomi. sektor energi. dan pangan, sekaligus memperluas basis pembiayaan pembangunan, memperluas kegiatan ekonomi, inklusivitas, dan memperkuat basis modal pembangunan.

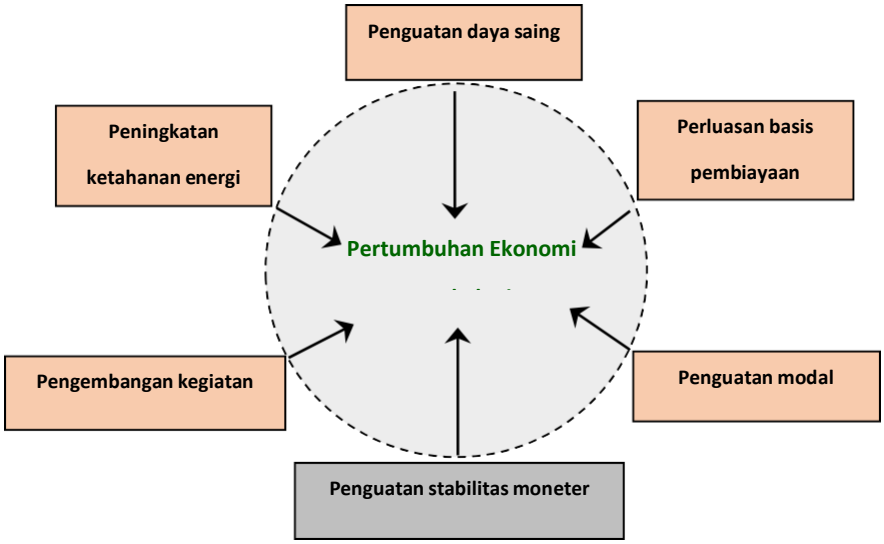

Gambar 11.5 Integrasi Reformasi Struktural untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan

4. Penguatan Daya Saing Industri Menuju Integrasi ke Rantai Nilai Global

Kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan daya saing sektor industri dalam reformasi struktural dapat diarahkan untuk memperkuat kemampuan beradaptasi dengan globalisasi ekonomi dan memanfaatkannya secara maksimal. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat peran Indonesia dalam co-production sepanjang rantai nilai global yang menyumbang 80% dari total ekspor global, khususnya ekspor industri teknologi menengah, menengah dan tinggi, baik produk jadi maupun produk setengah jadi. Hal ini merupakan suatu keharusan jika Indonesia ingin cepat menjadi negara maju berpenghasilan tinggi dan mengurangi kemiskinan.

Untuk itu, perlu terus didukung industri menengah dan teknologi tinggi yang berorientasi ekspor, memperluas keragamannya, dan memperkuat perannya dalam menciptakan nilai tambah nasional. Indonesia juga harus terus memfasilitasi FDI yang berminat pada produksi barang setengah jadi dan/atau perakitan barang akhir untuk diekspor kembali ke seluruh dunia. Jadi PMA perusahaan teknologi menengah dan tinggi pindah ke Indonesia, dan pemasok komponen lokal yang bekerja sama dengan mereka akan menjadi tulang punggung industri Indonesia di masa depan. Melalui strategi di atas, diharapkan proses peningkatan kapasitas industri (industrial upgrading) dapat lebih cepat, dimana terjadi transfer teknologi dan pengetahuan yang akan meningkatkan kehandalan dan produktivitas, kemampuan menyerap dan menggunakan teknologi industri dalam negeri. Selain itu, diharapkan juga berdampak

positif pada penyerapan tenaga kerja yang lebih berkualitas dan berkembangnya industri jasa penunjang yang handal.

5. Peningkatan Ketahanan Energi dan Pangan

Upaya pemerintah untuk mendorong reformasi energi, termasuk pengurangan (penghapusan) subsidi energi dan kenaikan harga BBM bersubsidi, merupakan upaya strategis untuk mengatasi masalah kesinambungan fiskal. Berkat langkah-langkah kebijakan tersebut, porsi subsidi energi dalam total belanja energi akan berkurang secara signifikan. Sehingga defisit anggaran bisa diturunkan ke level yang sehat.

Selain langkah perbaikan Pemerintah melalui kebijakan penyesuaian harga energi dengan subsidi, kebijakan konversi dan diversifikasi energi ke depan tentunya akan terus dilakukan untuk meningkatkan ketahanan energi. Kebijakan rekonversi merupakan kebijakan perantara untuk mencapai tujuan diversifikasi dan konservasi. Kebijakan konversi yang sudah dilakukan pemerintah, seperti konversi minyak tanah ke gas untuk keperluan rumah tangga dan konversi BBM transportasi ke BBG, perlu dituntaskan. Kebijakan diversifikasi harus ditujukan untuk mempercepat pertumbuhan bauran energi guna mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak. Sehubungan dengan itu, pengembangan kapasitas penyediaan energi alternatif seperti gas alam, metana dalam batubara, shale gas dan energi terbarukan seperti panas bumi, pembangkit listrik tenaga air, angin dan matahari harus dipercepat. Selain itu, langkah-langkah penghematan energi juga diperlukan, terutama untuk operasional truk dan logistik yang akan tumbuh seiring pertumbuhan aktivitas ekonomi dan kelas menengah. Sehubungan dengan itu, pengembangan jaringan transportasi logistik hemat energi dengan kapasitas muat yang besar dan angkutan penumpang bervolume besar yang nyaman, hemat energi dan terjangkau, seperti kereta api, juga harus dipercepat.

Sementara itu, dari segi pangan, pengalaman praktis menunjukkan bahwa pengelolaan pangan tidak hanya terbatas pada tingkat ketahanan pangan tetapi juga pada tingkat swasembada pangan. Pasalnya, dengan terus mengandalkan impor, ketahanan pangan nasional menjadi semakin rentan terhadap guncangan dari faktor eksternal. Dengan demikian, selain tidak bergantung pada impor, pemenuhan kebutuhan pangan juga harus mengandalkan kemampuan produksi negara.Kebijakan-kebijakan jangka menengah-panjang yang dapat ditempuh pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan yang mandiri dan berdaulat, antara lain adalah: (i) penataan lahan pertanian melalui pengendalian laju konversi lahan pertanian ke nonpertanian; (ii) pelaksanaan program-program intensifikasi pertanian pangan pokok secara lebih agresif guna mengimbangi semakin

menyusutnya lahan pertanian yang ada; dan (iii) peningkatan peran lanjutan pemerintah untuk mendorong terciptanya pasar komoditas pangan yang efisien.

6. Perluasan Basis Pembiayaan Pembangunan

Integrasi yang lebih dalam ke dalam rantai nilai global dan keterbukaan terhadap outsourcing, yang didukung oleh integrasi internal ekonomi Indonesia yang lebih dalam, diharapkan akan berdampak pada pesatnya peningkatan FDI dan kerjasama global antara FDI dan NDP untuk ekspor. Jika harapan itu terwujud, fondasi pembiayaan pembangunan akan semakin kokoh karena mengandalkan pembiayaan FDI jangka panjang. Dalam kaitan ini, peran kebijakan anggaran Pemerintah sangat dinantikan. Kontribusi belanja modal di bawah program PPP untuk memperkuat infrastruktur dan kebijakan sosial akan berdampak positif pada integrasi internal Indonesia dan daya tarik Indonesia untuk kegiatan pembangunan, pengembangan dan relokasi produsen global. Selain itu, peran kebijakan fiskal juga diapresiasi dalam mendorong pembangunan swasembada pangan dan ketahanan energi. Untuk itu, upaya memaksimalkan ruang fiskal dapat dipertimbangkan, khususnya dalam rangka memberikan ruang fiskal yang lebih luas bagi pembangunan melalui realokasi subsidi BBM.

Sementara itu, dari sisi pembiayaan kegiatan ekonomi melalui pasar keuangan, diperlukan penguatan lebih lanjut langkah-langkah pendalaman pasar keuangan untuk mendukung penguatan basis keuangan perekonomian. Sehubungan dengan itu, Bank Indonesia akan mengarahkan kebijakannya pada penguatan langkah-langkah pendalaman pasar modal yang telah dilakukan selama ini. Strategi pengembangan pasar keuangan bertujuan untuk menciptakan pasar keuangan yang likuid dan efisien, dengan tetap mengedepankan ketahanan dan prinsip kehati-hatian. Upaya pendalaman pasar keuangan ini pada hakekatnya merupakan tanggung jawab bersama antara Bank Indonesia sebagai otoritas pasar uang, Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator pasar modal, Kementerian Keuangan, otoritas pajak, pelaku pasar keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya. Karena sifatnya yang cross-cutting, maka untuk mencapai hasil yang diharapkan, strategi pengembangan pasar keuangan harus ditempuh secara sinkron.

7. Pengembangan Kegiatan Ekonomi Inklusif

Ada sejumlah kebijakan yang perlu dilaksanakan untuk menciptakan perekonomian nasional yang lebih inklusif. Dalam kaitan ini, pemerintah harus terus meningkatkan kepesertaan jaminan kesehatan, akses air minum dan sanitasi yang layak, akses informasi dan kepemilikan akta kelahiran, sehingga masyarakat kurang mampu dapat mengakses pelayanan dasar. Selain itu, pemerintah juga harus terus meningkatkan

besaran kepesertaan jaminan sosial bagi tenaga kerja, baik formal maupun informal. Diharapkan dengan semakin meningkatnya perlindungan terhadap pekerja informal dan akses terhadap pelayanan dasar seperti jaminan sosial dan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.

8. Produktivitas Nasional Dapat Ditingkatkan

Sementara itu, Bank Indonesia akan melengkapinya dengan program inklusi keuangan, untuk memperluas akses keuangan bagi masyarakat yang belum memiliki akses terhadap layanan keuangan. Dalam pandangan Bank Indonesia, inklusivitas sistem keuangan secara langsung akan membantu memperkuat fondasi stabilitas sistem keuangan domestik melalui diversifikasi risiko. Namun, dari perspektif yang lebih luas, inklusi keuangan akan membuka akses masyarakat miskin terhadap kegiatan ekonomi formal. Menghadirkan masyarakat berpenghasilan rendah ke dalam dunia formal melalui inklusi keuangan kemudian akan membuka ruang yang lebih luas bagi berlangsungnya program intervensi sosial dan ekonomi yang lebih beragam secara bertahap meningkatkan taraf hidup kelompok masyarakat tersebut. Jadi selain menjadi bagian penting dalam penguatan sistem keuangan, inklusi keuangan juga menjadi wahana untuk memberdayakan mereka yang masih tertinggal. Dengan mendorong inklusi keuangan, Bank Indonesia akan terus memperkuat dan memperluas solusi layanan keuangan bagi masyarakat yang masih unbanked. Peningkatan ini dilakukan dengan mendorong pengembangan Layanan Keuangan Digital (LKD). Berkat LKD, masyarakat tidak lagi bergantung pada keberadaan kantor cabang bank untuk layanan keuangan dan pembayaran. Masyarakat cukup mendatangi agen LKD (cabang bank) di sekitar tempat tinggalnya (bank sosial). Data pengguna LKD juga akan digunakan sebagai salah satu database sistem informasi UMKM yang selanjutnya dapat menjadi sumber data pemeringkatan kredit UMKM dalam rangka peningkatan peringkat kredit, akses kredit dan pertumbuhan UMKM.

9. Penguatan Modal Dasar Pembangunan

Gagasan membangun nusantara sebagai ekosistem industri berbasis inovasi dalam banyak hal merupakan penguatan dari ciri dan pola keterkaitan ekonomi yang sudah ada saat ini. Secara karakteristik, pertumbuhan ekonomi di Jawa terutama ditopang oleh dampak positif aglomerasi perkotaan atau pemusatan berbagai industri di kawasan perkotaan. Konsentrasi ini memiliki hubungan spasial yang kuat di dalam pulau Jawa sendiri dan merupakan sumber pertumbuhan pendapatan per kapita dan lapangan kerja di Jawa. Sementara itu, perekonomian berbagai daerah di luar Jawa didukung oleh dampak positif dari kegiatan industri yang lebih terspesialisasi.

Konsentrasi pertumbuhan berbagai industri di Jawa bersifat mandiri dan berdampak positif berupa permintaan bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi dari luar Jawa. Sebagai contoh, data input-output (IO) regional yang menunjukkan arah perdagangan domestik barang setengah jadi dan akhir dari luar Jawa sangat ditentukan oleh permintaan Jawa, selain ekonomi Mondial l'. Pengembangan nusantara sebagai ekosistem industri berbasis inovasi tidak hanya akan meningkatkan spillover effect positif perekonomian Jawa di luar Jawa, tetapi juga memberikan umpan balik positif ke pihak lain.

Oleh karena itu, transportasi laut dan darat berperan dalam menghubungkan permukiman yang ada. Terkait konektivitas maritim, pembangunan pelabuhan harus mempertimbangkan efisiensi nasional, sesuai dengan yang direncanakan di tingkat nasional. Di wilayah Jawa, pengembangan pelabuhan dapat ditujukan untuk menambah jumlah pelabuhan bongkar muat untuk keperluan impor dan ekspor serta meningkatkan kapasitas pelabuhan-pelabuhan utama yang ada. Sedangkan di luar Jawa, penguatan kapasitas lokal dan regional untuk pelabuhan pengumpul dan suplai dapat dilakukan. Terkait konektivitas jalan raya, peran angkutan kereta api nasional dalam angkutan nasional perlu didorong agar terintegrasi dengan moda pelayanan lain seperti angkutan udara dan jalan.

Prioritas lain yang sangat penting adalah meningkatkan sumber daya manusia yang tersedia di masa depan untuk meningkatkan kemampuan menyerap teknologi. Dalam hal ini, simpul kebijakan utama adalah sebagai berikut. Pertama, memperluas akses sarana dan prasarana pendidikan berkualitas di luar Jawa, khususnya di Indonesia bagian timur, untuk mengurangi kesenjangan akses pendidikan berkualitas. Hal ini ditunjukkan oleh Indeks Komposit Pendidikan yang berkaitan dengan kualitas infrastruktur pendidikan di Jawa dan luar Jawa. Kedua, meningkatkan jumlah lulusan perguruan tinggi di empat bidang matematika, sains, teknologi, dan kesehatan dengan kualitas berdaya saing global. Seperti disebutkan sebelumnya, kapasitas inovasi sangat ditentukan oleh ketersediaan tenaga kerja terampil di sektor-sektor tersebut. Kondisi saat ini menunjukkan bahwa peningkatan yang signifikan dalam kualitas pendidikan sains dan matematika diperlukan untuk memenuhi permintaan global. Pemberian akses pendidikan tinggi yang lebih luas pada keempat bidang studi di atas diyakini dapat meningkatkan mobilitas sosial antargenerasi yang tergolong rendah di Indonesia. Hal ini juga berimplikasi pada pentingnya intervensi sosial untuk memperluas akses pendidikan tinggi yang berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

"Penguatan Peran Bank Indonesia dan Optimalisasi Strategi Bauran Kebijakan untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan", Makalah SESPIBI, Bank Indonesia, Jakarta.

"The Role of Central Bank in A New Sustainable Growth Model", SEACEN and CeMCoA/BOJ Conference Proceeding, Kuala Lumpur.

Acemoglu, Daron and Robert A. Robonson (2012), *Why Nations Fail: The Origins Of Power, Prosperity andPoverty*, Crown Archetype, a division of Random House, Inc.

Anglingkusumo, Reza dan Desthy V.B. Sianipar (2012), "Proyeksi Kelas Menengah Hingga 2045", CatatanRiset Depertemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter, Bank Indonesia, Desember.

Ariefn Budiman , 1995, Teori pembangunan Dunia Ketiga, Gramedia Pustaka Utama,Jakarta Beckermen, Economic Progress and Environmental Concerns,Spinger Berlin Heidlberg, Germany, 1993.

Asian Development Bank (ADB) (2011), *Asia 2050: Realizing the Asian Century*, Sage, Delhi.Bank Indonesia, *Laporan Perekonomian Indonesaia*, beberapa Publikasi.

Bank Indonesia (2015), "Kajian Output Potensial Pasca Krisis Keuangan Global 2015", Depertemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter, Oktober.

Bennett, Andrew. "Case Study Methods: Design, Use, and Comparative Advantages". Models, numbers, and Cases: Methods for Studying International Relations.Eds. Detlef F. Sprinz and Yael Wolinsky-Nahmias. Ann Arbor: University of Michigan Press, 2004.

Beria, Leimona, Munawir, "Nanang Rafandi Ahmad, Gagasan Kebijakan Konsep Jasa Lingkungandi Indonesia", *Rewards for Use of And Shared Investment in Pro Poor Countries, (RUPES)*, Bogor, Indonesia (No years)

Bintarto R. 1989. Interaksi Desa Kota dan Permasalahannya. Jakarta: Ghalia Indonesia. Blakely, Edward J. 1989. Planning Local Economic Development : Theory and Practice. Sage Publication.

Bruntland Commission, Our Common Future, the World Commission on Environment and Development (WCED), the United Nations (UN) 1987

Budiman Arief. 1995. Teori Pembanguan Dunia III. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Coats, David (Ed.) (2011), *Exiting from The Crisis: Towards a Model of More Equitable and Sustainable Growth*, European Trade Union Institute (ETUI).

Coleman, J.S.1988.Social capital in the creation of human capital.The American Journal of Sociology, 94(Suplplement).

Corten, David. The Post Corporate World: Life After Capitalism, 2000, Berrett-Koehler Publishers

Cox, Eva.1995. A Truly Civi Pertanian, IPB, Bogor l Society. ABC Books: Sydney

Daldjoeni N. 1991. Pengantar Geografi. Bandung: Alumni.

Dickenson, J. P. 1992. Geografi Negara Berkembang. Semarang: IKIP Semarang Press.

Djaetun H.S, *Memahami Hakikat BudiLuhur,* Yayasan Pendidikan Budi Luhur Sakti, Jakarta, 2014

Electrodes on Hydrogen Production by Electrolysis,Kun Shan University, Taiwan.

Emil Salim, "Paradigma Pembangunan Berkelanjutan", dalam Iwan Jaya Azis, Lydia M. Napitupulu, Arianto Patunru, dan Budi Reksosudarmo, *Pembangunan Berkelanjutan, Peran dan Kontribusi Emil Salim,* Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2010, halaman 21 – 30

Ernan Rustiadi, et., al. 2006, Perencanaan dan Pengembangan Wilayah, edisi Mei 2006, Fakultas Pertanian, IPB, Bogor

European Trade Union Institute (ETUI).

Felipe, Jesus and Joseph Lim (2005), "Export or Domestic- Led Growth in Asia?", *Economic and Research Department (ERD) Working Paper Series* No. 69, Asian Development Bank.

Forbes, Dean K. 1989. Geografi Keterbelakangan, Sebuah Survey Kritis. Jakarta: LP3ES.

Frankel, Jeffrey A. "The Natural Resource Curse: A Survey" *National Bureau of Eeconomic Research, Working Paper No. 15836*, NBER Program(s): Environment and Energy Economics, March 2010.

Friedman,Lawrence M."Sistem Hukum perspektif ilmu sosial",Penterjemah:M. Khosim, diterjemahkan dari buku Lawrence M. Friedman, The Legal System: A Social Science Perspective (New York: Russel Sage Fundation, 1975, Bandung: Nusa Media, 2009.

Fukuyama, Francis.1995.The end of History and the last man.NY: Free Press.

Ginanjar Kartasasmita,(1996)Pembangunan Untuk Rakyat:Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan, Jakarta , Cides, Implementing Sustainable Development: From Global Policy to Local Action.

Grafindo Persada, Jakarta.

Hasbullah, Jousairi.2006. Social Capital (menuju keunggulan budaya manusia Indonesia). MR-United Press: Jakarta.

Haskarlianus Pasang, "Kajian Awal Dampak Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim diIndonesia", Jurnal Analisis CSIS, Vol. 40, No. 4, 2011

Henderink,J & Murtomo R.1988.Konsep dan Teori Pembangunan, Nr XII.

Irawan dan M. Suparmoko. (2002). Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta . BPFE

Ismid Hadad, "Gerakan Lingkungan dan Advokasi Pembangunan Berkelanjutan" dalam Iwan JayaAzis, Lydia M. Napitupulu, Arianto Patunru, dan Budi Reksosudarmo, *Pembangunan Berkelanjutan, Peran dan Kontribusi Emil Salim*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta,2010

Iwan Jaya Azis, Lydia M. Napitupulu, Arianto Patunru, dan Budi Reksosudarmo *Pembangunan Berkelanjutan, Peran dan Kontribusi Emil Salim,* Kepustakaan Populer

Gramedia, Jaka Kementerian Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 32, Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, 2010rta, 2010

Jaya Appalray & Safier M. 1976.Growth Centre Strategies in Less-Developed Countries: in A. Gilbert (ed): Development Planning Spatiel Structure. London.

Jayadinata, J. T. 1992. Tataguna Lahan Dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan, dan Wilayah. Bandung: IT

Juhro, Solikin M. (2015), **"**The Role of the Central Bank in Promoting Sustainable Growth: Perspectives onthe Implementation of Flexible ITF in Indonesia", A paper presented in The Singapore Economic Review (SER) Conference, August 2015, *Afro Eurasian Studies* (forthcoming).

Kawai, Masahiro (2012), "Asia's Sustainable Economic Development", A Keynote Address at USM-AUT International Conference 2012 "Sustainable Economic Development: Policies and Strategies" Penang, November.

Kothari, R., Buddhi, D., Sharma, A., Allen, T.(2007) ,Effect of Distance Between

Kuncoro, Mudrajat, 2001, Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi , Yogyakarta . Erlangga

Kuncoro, Mudrajat, 2010, Masalah, Kebijakan, dan Politik – Ekonomi Pembangunan, Yogyakatra, Erlangga.

M. Suparmoko, Editor, *Neraca Sumberdaya Alam (Natural Resource Accounting*, BPFE, Yogyakarta, Edisi 2005/2006.

M. Suparmoko, *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktik*, Edisi Keenam, BPFE, Yoyakarta, 2011

Mabogunye, A. C. 1978. Growth Poles and Growth Centre in Regional Development of Nigeria, in A. Kuklinshi; Regional Policies in Nigeria, India, and Brazil. The Hague.

Maria Ratnaningsih, Aristin Tri Apriani, Dwi Sudharto, M, Suparmoko, *PDRB Hijau (Produk Domestik Regional Bruto Hijau)*, BPFE, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM, Yogyakarta, Cetakan Kempat,January 2013

Palley, Thomas I. (2011), "The Rise and Fall of Export-led Growth", Levy *Economics Institute Working* PaperNo. 675.

Pearce,David W. and Jeremy J. Warford, *World Without End*, *Economics, Environment and Sustainable Development* sy, OxfordUniversity Press, New York, N.Y,1993)

Perkasa, Jakarta.

Perryox, General Economic Theory of Francois Perroux, Rowman and Little Field, 1985

Phillip J. Cooper,Claudia Maria Vargas, (2004), analys and control of dynamic economic system, Rowman & Littlefield Publishers,

Putnam, Robert.1993.Social Capital. Pricenton University: Princenton

Salim, Emil (1990), "Sustainable Development: An Indonesian Perspective", Makalah , AIESEC, Jakarta.

Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia, beberapa Publikasi.

Stiglitz,Joseph,2002,Globalization and Its Discontent , Penguin Books, London, Dickenson. (1992).

Suhardjo, A. J.. 1995. Konsep-Konsep Dasar Dalam Geografi. Yogyakarta: Fakultas Geografi PPS UGM. Suryana. Pembangunan Problematika dan Pendekatan. Jakarta. Salemba Empat. 2000.

Sukirno, Sadono 2005.Mikro Ekonomi Teori Pengantar Penerbit PT. Raja

Sukirno, Sadono. 1985. Ekonomi Pembangunan . Jakarta : LPEF - UI Bima Grafika

Sukirno, Sadono.2000.Makro Ekonomi Modern.Penerbit PT. Raja Grafindo

Sumitro Djojohadikusumo (1994),Perkembangan Pemikiran Ekonomi: Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan , LP3ES, Jogjakarta

Todaro, Michel P. (2004). Ekonomi Pembangunan Di Dunia Ketiga. Jakarta: Erlangga.

Watt, Andrew and Andreas Botsch (Eds.). 2010, After the Crisis: Towards a Sustainable Growth Model.

Weeler, J. O. & Muller, Peter, O. 1986. Principles of Spatial Interaction. Terjemahan J. Esomar (1992). Manado: FPIPS IKIP.

Yogyakarta: Fakultas Hasbullah, Jousairi.2006. Social Capital (menuju keunggulan budaya manusia Indonesia). MR-United Press: Jakarta.Geografi UGM.

Hani Siti Hanifah merupakan penulis dalam beberapa jurnal nasional maupun internasional yang dihasilkan baik dari tulisan langsung dalam jurnal maupun dari hasil proceding internasional. Penulis kelahiran Garut, 18 September 1965 mengawali karir menulisnya saat duduk perguruan tinggi. Jenjang perguruan tinggi pertama diperoleh dari jurusan Ekonomi Studi Pembangunan kemudian jenjang selanjutnya jurusan Administrasi Negara. Tulisan banyak terinspirasi dari fakta dan latar belakang pendidikan penulis. Hingga sekarang masih terus aktif menulis beberapa kajian akademis untuk instansi pemerintah dan penelitian dalam ruang lingkup kampus dan maupun hibah Dikti. Selain berprofesi sebagai penulis, juga sering menghadiri berbagai forum penulisan ilmiah sebagai tugas menjadi dosen. Semoga karya tulis ilmiah ini mampu menginspirasi semua kalangan untuk bisa lebih bersemangat dalam meraih keberhasilan.

Husni Muharam ialah seorang penulis dalam beberapa jurnal nasional maupun internasional yang dihasilkan baik dari tulisan langsung dalam jurnal maupun dari hasil proceding internasional. Penulis kelahiran Garut, 19 September 1986 mengawali karir menulisnya saat duduk di perguruan tinggi. Jenjang perguruan tinggi S1 diperoleh dari Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen kemudian jenjang S2 pada Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Tulisan banyak terinspirasi dari fakta dan latar belakang pendidikan penulis. Hingga sekarang masih terus aktif menulis pada beberapa kajian akademis dan penelitian dalam ruang lingkup internal kampus maupun hibah external. Selain berprofesi sebagai penulis, juga sering menghadiri berbagai forum penulisan ilmiah sebagai tugas menjadi dosen.

Erik Kartiko sebagai penulis dibuku ini adalah seorang dosen dan praktisi kelahiran Tasikmalaya pada tanggal 21 April 1975, di mana pendidikan penulis baik di S1 dan S2 dibidang Akuntansi. Terdapat beberapa penulisan yang telah dihasilkan dan telah dipublikasi dalam bentuk jurnal dan proceeding, kajian akademik dalam membantu pihak Eksekutif atau Pemerintah Daerah. Harapan penulis semoga tulisan kolaborasi kami ini bisa memberikan referensi bagi pihak yang membutuhkan baik untuk rujukan akademik dan pengambilan keputusan strategis, serta menjadi motivasi kepada kami untuk tetap terus berkaya salah satunya dalam membuat tulisan-tulisan seperti ini.

ISBN 978-623-6918-18-0

9 786236 918180